



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**ANALISIS PENGARUH KETERLIBATAN RUSIA TERHADAP
KONFLIK DI SURIAH DALAM PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK
JOHAN GALTUNG (2011-2017)**

JOVITA A. N. PONTOH

120170303014

Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Mendapatkan
Gelar Magister Pertahanan

**FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL
PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK**

BOGOR

September 2018

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Jovita A. N. Pontoh
NIM : 120170303014
Program Studi : Damai dan Resolusi Konflik
Judul Tesis : **Analisis Pengaruh Keterlibatan Rusia terhadap Konflik di Suriah dalam Perspektif Resolusi Konflik Johan Galtung (2011-2017)**

Telah berhasil diseminarkan di hadapan para Reviwer dan diterima sebagai persyaratan untuk melanjutkan penelitian pada Program Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

REVIEWER

Pembimbing I : Mayjen TNI (Purn) I Gede Sumertha KY, PSC., M.Sc
(.....)

Pembimbing II : Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno B.Sc, M.Pd
(.....)

Reviewer I : Dr. Ichsan Malik, M.Sc. (.....)

Reviewer II : Mayjen (Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus., M.A. (.....)

Reviewer III : Ir. Bayu Asih Yulianto, M.Si. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraph, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, 5 Februari 2019

Jovita Pontoh

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas ilmiag saya yang berjudul:

Analisis Keterlibatan Rusia Terhadap Perang di Suriah dalam Perspektif Resolusi
Konflik Johan Galtung (2011-2017)

Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor,

Jovita Pontoh

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang maha pengasih, atas kasih dan setianya sepanjang penelitian tesis ini hingga penelitian berjudul “Analisi Pengaruh Intervensi Rusia terhadap Konflik di Suriah dalam Perspektif Resolusi Konflik Johan Galtung (2011-2017)” dapat diselesaikan dengan baik. Tesis yang ditujukan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Pertahanan ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari pihak-pihak yang telah berjasa di dalam penyusunan penelitian. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti mengungkapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP beserta jajaran warek atas kepemimpinannya terhadap Universitas Pertahanan dan atas kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk dapat mendalami ilmu-ilmu pertahanan di Universitas Ini.
2. Dekan Fakultas Keamanan Nasional Laksda TNI Dr. Siswo Hadi Sumantri, ST., MT yang telah menjadi dekan terbaik bagi mahasiswa-mahasiswinya. Kebaikan bapak Dekan akan selalu berkesan bagi Prodi DRK Cohort VI dan bagi peneliti secara pribadi.
3. Sesprodi DRK Kol Inf. Dr. Bambang Wahyudi, MM., M.Si yang telah dengan sabar membimbing mahasiswa-mahasiswi DRK Cohort VI dengan segala keunikannya. Terima kasih telah menjadi sesprodi yang suportif bagi kami dan secara pribadi bagi penulis dalam menghadapi dinamika dan eskalasi de-eskalasi konflik selama perkuliahan.
4. Pembimbing 1 Majyen TNI (Purn) I Gede Sumertha KY, PSC., M.Sc atas saran dan masukannya selama proses penyusunan tesis. Penelitian ini tidak akan berhasil tanpa adanya pembimbing yang kompeten yang mampu memberikan arahan kepada mahasiswanya.

5. Pembimbing 2 Brigjen TNI (Purn) Makmur Supriyatno B.Sc., M.Pd yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada peneliti dalam proses penulisan tesis. Terima kasih telah sabar menerima kedatangan peneliti baik di tanggal hitam maupun di tanggal merah untuk bimbingan tesis ini.
6. Narasumber bagi penelitian ini, dari instansi Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Rusia untuk RI dan Badan Intelijen Negara yang telah berkontribusi di dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas kesediaan dalam memberikan informasi dan meluangkan waktu yang telah menghantarkan peneliti ke depan pintu gerbang kelulusan.
7. Keluarga peneliti yang telah memberikan dukungan secara moril, finansial, dan candaan garing. Terima kasih kepada Mami, Arnold, dan Leonard untuk kasih dan pengertiannya dalam mendukung penulisan tesis ini.
8. Sahabat DRK Cohort VI yang telah menghabiskan waktu satu tahun setengah dalam suka dan duka. Sungguh tidak ada kelas yang semenarik dan sesuper kalian. Terima kasih atas memori yang telah terukir bersama di Universitas Pertahanan. Juga peneliti juga ingin memberikan ucapan terima kasih kepada sahabat Faris yang telah dengan sabar mendukung penelitian ini baik dalam keadaan termotivasi maupun sedikit frustrasi.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi menunjang kesempurnaan penelitian ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait resolusi konflik Rusia terhadap konflik Suriah.

Bogor, 6 Februari 2019

Jovita Pontoh

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KETERLIBATAN RUSIA TERHADAP KONFLIK DI SURIAH DALAM PERSPEKTIF RESOLUSI KONFLIK JOHAN GALTUNG (2011-2017)

JOVITA PONTOH

Konflik di Suriah telah terjadi selama 7 tahun semenjak fenomena Musim Semi Arab yang menjatuhkan rezim-rezim otoriter di Timur Tengah. Perlawanan Bashar al-Assad melawan oposisi mendapatkan sorotan utama bagi aktor-aktor internasional yang berusaha untuk meresolusi konflik tersebut. Permasalahan yang diteliti yaitu menganalisis pengaruh keterlibatan Rusia terhadap konflik Suriah dengan menggunakan perspektif resolusi konflik Johan Galtung. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis konflik Suriah, resolusi konflik Rusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan resolusi konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan studi literatur. Data diperoleh dari informan dan literatur yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suriah memiliki tingkat kekerasan langsung, struktural dan kultural yang besar, dan dalam perang kekerasan langsung mendominasi kekerasan lainnya. Kekerasan yang terjadi diakibatkan oleh faktor internal dan politik internasional yang mempengaruhi. Keterlibatan Rusia berhasil mende-eskalasi konflik Suriah melalui pendekatan *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Rusia mampu meredakan kekerasan langsung melalui intervensi bersenjata, dan secara signifikan mampu meredakan kekerasan di Suriah melalui jalur negosiasi. Dalam kekerasan struktural belum banyak yang bisa dilakukan di tahapan ini. Namun meskipun berhasil dalam meresolusi konflik Suriah dalam operasinya terdapat faktor-faktor yang menghambat Rusia dalam meresolusi konflik Suriah, hal-hal tersebut meliputi pengambilan keputusan terhadap konflik yang bergantung pada kepentingan nasional maupun sekutu dan kelompok, persaingan kekuatan global dan regional di dalam konflik Suriah, aktor-aktor yang terlibat hampir keseluruhannya berada pada area abu-abu, yang berarti aktor-aktor tersebut secara bersamaan membakar dan memadamkan konflik sesuai dengan kepentingan nasional ataupun golongan. Kesimpulan dalam tesis ini adalah secara umum Rusia berhasil dalam meresolusi konflik Suriah meskipun terdapat beberapa faktor yang menghambat proses resolusi konflik.

Kata Kunci: Konflik Suriah, Rusia, intervensi, dan Johan Galtung

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPACT OF RUSIA'S INVOLVEMENT ON SYRIAN CONFLICT IN THE PERSPECTIVE OF JOHAN GALTUNG CONFLICT RESOLUTON

JOVITA PONTOH

Syrian conflict has been occurred for more than 7 years since *Arab Spring* phenomenon overthrew many authoritarian regimes in Middle East. Civilian fights against Bashar al-Assad came under the spotlight in international world, which attracted many foreign actors to get involve in the conflict in order to find the conflict resolution. The problem of the research is to analyze the impact of Russia's involvement on Syrian conflict through the perspective of Johan Galtung's theories of conflict resolution. The purpose of the research is to analyze: Syrian conflicts, Russian conflict resolutions, and certain factors that affect the success or failure of the conflict resolution efforts. This research is a qualitative research using its methods of interview and literature research. Researcher obtained data from interview respondents and literature and are analyzed using qualitative methods. The result of the research shows that Syria has a high level of direct violence, structural violence and cultural violence, in this case direct violence dominated the others during the civil war. Those violence are the result of the accumulative of internal factor and international politics that are related. Rusia's involvement towards the conflict was able to de-escalate the conflicts through peacebuilding, peacekeeping and peacemaking efforts. Russia succeeded to reduce direct violations through physical intervention and was able to significantly resolve the conflict through negotiation. However there were several factors that obstructed the conflict resolution, which were: decision making related to the conflict depends on national and groups interests; competition of global and regional powers in the conflict, and almost all the actors in Syrian conflict were in gray area. The conclusion of this research is in general Russia succeeded in de-escalating the conflict despite all the obstructed factors.

Key Words: Syrian Conflict, Russia, intervention, and Johan Galtung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Manfaat Teoritis	10
1.5.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN TEORITIK	12
1.6 Deskripsi Konseptual	12
1.6.1 Teori Konflik	12
1.6.2 Teori Resolusi Konflik	18
1.6.3 Teori Eskalasi De-Eskalasi Konflik	24
1.6.4 Konsep <i>Collective Self-defense</i>	31
1.7 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan	34
1.8 Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
1.9 Tempat dan Waktu Penelitian	44
1.9.1 Tempat Penelitian	44
1.9.2 Waktu Penelitian	44
1.10 Subyek dan Sampel Penelitian	45

1.10.1 Subyek Penelitian	45
1.10.2 Sampel Penelitian	46
1.11 Teknik Pengumpulan Data.....	47
1.12 Pemeriksaan Keabsahan data	47
1.13 Teknik Analisa Data	49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	51
2.1 GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	51
2.1.1 Latar Belakang Hubungan Rusia-Suriah	51
2.1.2 Gambaran Umum Negara Suriah.....	54
2.2 Hasil Penelitian.....	56
2.2.1 Hasil Penelitian Kekerasan di Suriah	56
2.2.2 Hasil Penelitian Intervensi Rusia	83
2.3 Pembahasan Hasil	102
2.3.1 Pembahasan Kekerasan di Suriah	102
2.3.2 Pembahasan Intervensi Rusia	109
2.3.3 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Eskalasi – De-Eskalasi.....	117
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	126
2.4 Kesimpulan	126
2.5 Rekomendasi	130
2.5.1 Rekomendasi Teoritis.....	130
2.5.2 Rekomendasi Praktis	131
DAFTAR PUSTAKA	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	15
Gambar 2.2	16
Gambar 2.3	19
Gambar 2.4	25
Gambar 2.5	28
Gambar 2.6	43
Gambar 3.1	49
Gambar 3.2	50
Gambar 4.1	57
Gambar 4.2	62
Gambar 4.3	63
Gambar 4.4	65
Gambar 4.5	90
Gambar 4.6	90
Gambar 4.7	98
Gambar 4.8	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	13
Tabel 2.2	21
Tabel 2.3	24
Tabel 2.4	34
Tabel 3.1	45
Tabel 4.1	69
Tabel 4.2	88

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2011, dimana terjadi fenomena *Arab Spring*¹ yang menjatuhkan rezim-rezim otoriter di kawasan negara-negara Arab, Suriah juga turut terkena imbasnya dengan terancamnya eksistensi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dikarenakan tuntutan rakyatnya yang menginginkan demokrasi, perang sipil pecah terjadi antara pihak pro pemerintahan dan oposisi.² Melihat keberhasilan rakyat dalam menjatuhkan presiden Tunisia, Mesir, dan Libya, rakyat pro-demokrasi di Syria optimis dalam melakukan protes atas dinasti kepresidenan al-Assad yang telah terjadi sejak Hafiz al-Assad berkuasa pada tahun 1971 agar terjadi proses demokrasi, melihat melemahnya perkembangan ekonomi dan minimnya kebebasan yang terjadi di Syria merupakan bagian dari penyimpangan kekuasaan dari Bashar al-Assad. Namun respon pemerintah dalam menangkal aksi –aksi protes tersebut sangat keras, sehingga aksi protes berubah menjadi konflik antara anti-pemerintah melawan pasukan nasional Suriah yang kemudian bertransformasi menjadi perang sipil atau *Non-International Armed Conflict* dengan berkembangnya pemberontakan di Suriah.

Konflik bergerak sangat dinamis hingga memunculkan aktor-aktor baru pemicu eskalasi konflik. Keterlibatan kelompok-kelompok teroris dan pemberontak telah mengubah peta perang konflik yang semula hanya dua polar menjadi jauh lebih

¹ Atau dalam bahasa Indonesia “Musim Semi Arab”, merupakan sebuah rangkaian revolusi unjuk rasa kaum pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada awal tahun 2010 dan 2011 dalam rangka menantang rezim-rezim otoritas yang sudah berkuasa hingga puluhan tahun. Gelombang revolusi tersebut dilaksanakan dengan cara kekerasan dimana melibatkan pasukan nasional dari negara-negara tersebut. *Arab Spring* terjadi di Tunisia, Mesir, Yemen, Libya, dan Suriah.

²Dennis Romero, “From Arab Spring to chemical attacks: A timeline of the Syrian conflict and the U.S. response”, dalam <https://www.nbcnews.com/news/us-news/arab-spring-chemical-attacks-timeline-syrian-conflict-n865961>, diakses pada 12 Agustus 2018.

kompleks. Kubu oposisi tidak hanya sebuah kelompok yang ingin menjatuhkan Assad, hubungan diantaranya berkembang sangat kompleks. Kelompok-kelompok pemberontak terbagi menjadi beberapa kubu dengan tujuan yang berbeda-beda, terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang beroperasi di tingkat lokal dan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar dengan afiliasi antar negara dan antar kelompok.

Koalisi dari pemberontakan utama terdiri dari *Free Syrian Army* sebagai yang terbesar, *Martyrs of Syria Brigades*, *Northern Storm Brigade* dan *Ahrar Souriya Brigade*.³ Disamping itu terdapat Front Islam dengan *Syrian Islamic Front* yang terbesar dengan perkiraan jumlah pasukan 45.000, *The Harakat Ahrar al-Sham al Islamiya*, *Jaysh al-Uslam*, *Suqour al-Sham*, *Liwa al-Tawhid*, *Liwa al-Haqq*. *Kataib Ansar al-Sham*, dan *Kurdish Islamic Front*.⁴ Selain front Islam terdapat juga *Syrian Islamic Liberation Front* yang merupakan aliansi dari sekitar 20 kelompok pemberontak yang terdiri dari kelompok-kelompok dari Islam moderat sampai Islam Salafis ultra-konservatif. Kelompok jihadis menjadi salah satu ancaman utama dengan kehadiran *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang memiliki ribuan pejuang dari negara luar. Kelompok Jihadis lainnya seperti *Al-Nusra Front*⁵ memiliki jumlah pejuang yang juga besar, terdiri atas 5000-7000 orang, pemberontak Kurdish yang merupakan gabungan partai-partai Kurdish, dan kelompok-kelompok independen seperti *Ahfad al-Rasoul Brigades* dan *Asala wa al-Tanmiya Front* dengan jumlah kekuatan besar, *Duroou al-Tharawa Commision*, *Tajammu Ansar al-Islam*, *Yarmouk Martyrs' Brigade* dan *National Unity Brigades*.⁶

Pada tahun 2013 pemerintahan Assad dituduh menggunakan senjata kimia untuk melawan oposisi. Hal tersebut diketahui karena banyaknya jumlah korban

³ Anonim, "Guide to the Syrian rebels", dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003>, diakses pada 12 Agustus 2018.

⁴ *Ibid.*

⁵ Kemudian berganti nama menjadi *Jabhat al-Sham*

⁶ Anonim, *Loc. Cit.*

meninggal tanpa luka yang terlihat, yang menurut para korban berbau seperti klorin menimbulkan sensasi terbakar pada mata dan tenggorokan.⁷ Zat kimia tersebut dipercaya oleh pihak posisi adalah Sarin yang langsung menyerang syaraf, dimana para korban menimbulkan gejala muntah-muntah, mengeluarkan liur yang berlebihan, tercekik dan tremor. Hal tersebut kembali terjadi pada tahun 2014, dengan pernyataan dari *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) dan PBB yang menyatakan terdapat bukti-bukti penggunaan klorin sebagai senjata.⁸ Setelah Assad menandatangani perjanjian pelucutan senjata kimia, hingga pada April 2018 masih diduga bahwa pemerintah menggunakan agen kimia sebagai senjata melawan pemberontak.

Perubahan bentuk konflik bersenjata menjadi *International Armed Conflict* ketika negara-negara yang merasa memiliki keprihatinan atas konflik ini turut melibatkan diri. Negara-negara ini pun terbagi atas pro dan kontra pemerintah. Yang terbesar dari kedua polar tersebut adalah pihak Rusia didukung oleh Iran untuk mendukung presiden al-Assad dan Amerika dan Turki di pihak oposisi. Rusia yang semula hanya menyokong *supply* senjata kepada pemerintah Syria kemudian lebih lanjut melakukan keterlibatan militer secara langsung dalam meresponi kelompok-kelompok Jihadis yang disponsori oleh Saudi dan Qatar yang dapat mengancam keberlangsungan pemerintah negara Suriah dan mencegah masuknya aliran radikal fundamentalis.⁹ Rusia memulai *counter-terrorism* dengan menyediakan pasokan persenjataan bagi pasukan udara Suriah dan militan sekutu untuk meningkatkan kontrol atas kota dan desa yang dikuasai oleh insurgen, diikuti dengan pasukan Hizbullah, Iran dan Iraq yang membantu penyerangan darat Suriah dengan tujuan

⁷ Yonette Joseph dan Christina Caron, "Burning Eyes, Foaming Mouths: Years of Suspected Chemical Attacks in Syria", dalam <https://www.nytimes.com/2018/04/08/world/middleeast/syria-chemical-attacks-assad.html>, diakses pada 12 Agustus 2018.

⁸ *Ibid.*

⁹ Michael Jansen, "Russias intervention in Syria has given it regional clout", dalam <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/russia-s-intervention-in-syria-has-given-it-regional-clout-1.3241587>, diakses pada 13 Agustus 2018.

untuk mengamankan Damaskus dan sekitarnya, serta bagian barat dan tengah ditengah kehadiran al-Qaeda, Jabhat Fatah al-Sham, dan ISIS.¹⁰ Pemerintah Rusia menyatakan bahwa campur tangan militer yang dilakukannya merupakan permintaan formal dari Assad yang tidak mampu membendung kekuatan pemberontak meskipun pernyataan Walid Mualllem, Menteri Luar Negeri Suriah memiliki kontradiksi bahwa serangan udara Rusia telah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya.¹¹

Kemudian Rusia mengirimkan penasehat, anti ranjau, dan perwira senior ke dalam tentara Suriah dan pada tahun 2016 pesawat Rusia membantu pasukan darat Suriah untuk merebut kota bersejarah Palmyra yang dikuasai ISIS pada tahun 2015.¹² Pada tahun yang sama pasukan Suria bersama dengan Rusia melancarkan operasi untuk mengusir insurgen di timur Aleppo, yang meraih kemenangan di kawasan tersebut pada Desember 2016. Pada tahun 2017 dengan kembali memberikan bantuan udara dan penasehat militer, Suriah berhasil mengalahkan ISIS dan merebut Deir al-Zor, sebuah kota kaya minyak dan gas yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS. Namun serangan ini menimbulkan reaksi dari *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* karena penggunaan senjata kluster dan penyerangan pada obyek-obyek non-militer yang dilarang di dalam hukum humaniter. Akibatnya, Rusia dituduh bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan menimbulkan 350.000-400.000 korban jiwa yang terdiri dari kombatan dan sipil.¹³

Menurut media barat, tindakan Rusia dalam mendukung Assad merupakan tindakan sokongan sebagai sekutu. Hal ini dapat dilihat dari hubungan keduanya pada perang dingin dimana Uni Soviet mendapatkan pengaruh yang besar di Suriah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

dengan memberikan pasokan pasukan dan bantuan pada tahun 1970-an.¹⁴ Namun hal ini disanggah melalui pernyataan Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev bahwa tindakan Rusia di Suriah bukan karena hubungan sekutu, hubungan aliansi Rusia justru lebih dekat kepada negara-negara Eropa saat ini, serta kesalahan al-Assad adalah tidak merangkul pihak oposisi dengan cara damai, yaitu negosiasi.¹⁵ Lanjutnya, tujuan Rusia disana adalah untuk menghindari kejadian di Libya, dimana tidak ada negosiasi yang terjadi sebelum tindakan anarkis yang menghilangkan nyawanya terjadi, yang berimplikasi pada keadaan Libya yang tetap dalam ketegangan tinggi dan tidak ada pemimpin yang dapat membawa Libya diluar dari masa depan kehancuran. Lebih lanjut ia menyatakan:

“ ...the task of the world community – the United States, Europe and regional powers like Saudi Arabia and Qatar – is to bring the sides together at the negotiating table rather than demand that al-Assad go...”¹⁶

Meskipun dalam pernyataan Presiden Vladimir Putin keterlibatan Rusia bertujuan untuk memberantas terorisme internasional dan ISIS telah mengalami kekalahan yang signifikan di Suriah, namun Rusia mendapatkan kritik dari pihak AS, bahwa target operasi dalam serangan militer Rusia tidak hanya kelompok teroris internasional, tetapi juga kelompok-kelompok oposisi moderat pemerintah al-Assad, menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari keterlibatan Rusia adalah untuk mempertahankan sekutu utama Rusia, Presiden Bashar al-Assad untuk tetap berkuasa. Dengan besarnya peran Rusia dalam mempertahankan status quo, maka Rusia akan mendapatkan pengaruh yang besar di Suriah dengan mempertahankan dua pangkalan militer di bagian utara Suriah: Hmeimim dekat Latakia dan pangkalan

¹⁴ Henden Amile, “Russia news: What has Russia got to do with Syria? Why are Putin and Assad allies?”, dalam <https://www.express.co.uk/news/world/945139/Russia-news-what-has-Russia-got-to-do-with-Syria-Putin-Assad-allies-world-war-3>, diakses pada 18 Agustus 2018

¹⁵ “Dmitry Medvedev’s interview with CNN” dalam <http://government.ru/en/news/160/>, diakses pada 18 Agustus 2018.

¹⁶ *Ibid.*

laut di Tartus.¹⁷ Dengan pengaruh yang besar Rusia juga dapat memainkan perannya di regional Timur Tengah, yakni dengan negosiasi penggunaan wilayah dan pangkalan udara Mesir, penjualan senjata udara dengan Turki, dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Arab Saudi.

Meskipun keduanya bertujuan untuk memberantas terorisme, AS dan Rusia saling melempar argument mengenai siapa yang salah dalam tindakan intervensi di Suriah. Ketegangan antar AS dan Russia semakin meningkat dengan pergantian presiden AS, Donald Trump yang mengutuk dukungan Putin terhadap *“gas killing animal who kills his people and enjoys it.”*¹⁸ Sedangkan Putin menyatakan bahwa tindakan AS dalam intervensi militer tidak memiliki basis hukum. Rusia bergerak dibawah permintaan langsung pemerintahan yang berdaulat. Hingga saat ini, dengan mayoritas kekuatan ISIS dan pemberontak telah dilumpuhkan kedua negara tetap memutuskan untuk melanjutkan pengaruhnya di Suriah dengan tujuan yang sama, yakni memberantas terorisme untuk membangun perdamaian.¹⁹

Meresponi konflik tersebut pada akademisi melakukan banyak penelitian terkait dengan isu yang terjadi di Suriah. Dengan ruang lingkup konflik yang luas maka penelitian dilakukan dalam berbagai macam perspektif. Seperti penelitian tentang perang sipil di Suriah khususnya mengenai konflik antara Sunni dan Alawi (Syiah) yang menjadi penyebab munculnya perang.²⁰ Serta kajian mengenai kegagalan kebijakan luar negeri Bush dan Obama dalam meresponi penggunaan

¹⁷ Steven Rosenberg “Syria war: Putin's Russian mission accomplished”, dalam <https://www.bbc.com/news/world-europe-42330551>, diakses pada 19 Agustus 2018

¹⁸ Dikutip dalam tweetnya pada tanggal 11 April 2018

¹⁹ Alex Ward, “The real (but small) danger of a US-Russia war over Syria” dalam <https://www.vox.com/2018/4/11/17225190/syria-trump-russia-attack-war-strike-response>, diakses pada 19 Agustus 2018.

²⁰ Tareq Hawari, “Syria's civil war and the sectarian violence dilemma: A study on the development of the Sunni-Alawite struggle”, *Tesis Magister*, (Western Illinois University, 2016), hlm. abstrak

senjata kimia pada perang Suriah.²¹ Serta penelitian mengenai intervensi AS dengan melalui pendekatan hukum kriminal internasional, dengan kesimpulan bahwa jika AS menggulingkan rezim Assad, maka kubu Sunni akan dengan mudah mengambil alih kekuasaan, dimana kubu tersebut disokong oleh kelompok-kelompok ekstrimis.²² Berkaitan dengan Rusia di Suriah, terdapat beberapa penelitian mengenai hal tersebut, diantaranya penelitian mengenai kegagalan *Responsibility to Protect* di Damaskus dan posisi Rusia dan Cina terkait penolakan intervensi militer di negara tersebut.

Namun, penelitian yang membahas mengenai upaya Rusia dalam resolusi konflik Suriah masih terbatas. Rusia dengan upaya bertujuan untuk menciptakan perdamaian perlu diuji perannya dalam eskalasi/de-eskalasi konflik Suriah. Hal ini dirasa perlu untuk diteliti, terutama di tengah-tengah arus media barat yang mendominasi, sehingga masyarakat global dipenuhi pengetahuannya oleh pemberitaan yang bias. Pada tesis ini, penulis akan menggunakan pendekatan resolusi konflik oleh Johan Galtung dengan menganalisa bentuk kekerasan yang terjadi di Suriah dan upaya Rusia dalam *counter violence* di Suriah. Maka, dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul **Analisis Pengaruh Keterlibatan Rusia terhadap De-eskalasi Konflik di Suriah melalui Perspektif Resolusi Konflik Johan Galtung (2011-2017)**.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh keterlibatan Rusia terhadap De-eskalasi konflik di Suriah. Secara lebih spesifik penelitian dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi sub fokus, antara lain:

²¹ Karel Milmine, "Is The Red Line Only Rhetoric: Weapons Of Mass Destructions (WMDS), Syria's Civil War, The United States Failed Foreign Policy And Its Unintended Ramifications", *Tesis Magister*, (Texas Woman's University, 2016), hlm. abstrak.

²² Sarah N. Pedigo, "United States Interventions: Power Vacuums and the Rise of Extremist Groups", *Tesis Magister*, (Old Dominion University, 2016), hlm. abstrak.

1. Kekerasan struktural, kultural, dan langsung dari konflik di Suriah. (2011-2017)
2. Upaya peace making, peace keeping, dan peace building Rusia terhadap konflik di Suriah. (2011-2017)
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan de-eskalasi konflik.

1.3 Rumusan Masalah

Perang yang berlarut di Syria semakin menyengsarakan warga sipil dan stabilitas regional dan global. Dengan perkiraan sekitar 400.000 korban jiwa di dalam kurun waktu 6 tahun menunjukkan bahwa konflik tersebut membutuhkan sebuah resolusi yang mampu mentransformasi konflik. Rusia dengan tujuan untuk menurunkan intensitas konflik kemudian turut terlibat dalam perang Suriah melalui upaya-upaya militer dan non-militer. Keputusan Rusia untuk terlibat secara langsung di dalam konflik Suriah kemudian menjadi sebuah pertanyaan upaya tersebut mampu mende-eskalasi konflik yang terjadi. Serta di dalam fokus yang sama, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan de-eskalasi..

Maka upaya perdamaian oleh Rusia terhadap konflik Suriah perlu untuk di analisa untuk mengetahui apakah kehadiran Rusia di Suriah memperbaiki situasi yang terjadi di Suriah pasca Arab Spring, atau sebaliknya, memperkeruh konflik dengan menjadi aktor eskalasi konflik.

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana kekerasan struktural, kultural, dan langsung dari konflik di Suriah (2011-2017)?

2. Bagaimana implikasi keterlibatan Rusia terhadap de-eskalasi konflik di Suriah dalam perspektif resolusi konflik Johan Galtung (2011-2017)?
3. Bagaimana faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan de-eskalasi konflik?

1.4 Tujuan Penelitian

1.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan apa yang ingin penulis capai dan mengapa ingin melakukan penelitian tersebut, dimana di dalamnya termasuk sasaran, maksud, dan gagasan umum diadakannya penelitian.²³ Tujuan penelitian kualitatif umumnya membahas mengenai fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.²⁴ Penelitian berfokus pada satu fenomena besar yang dapat dikembangkan melalui eksplorasi hubungan ataupun perbandingan gagasan.²⁵

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kekerasan struktural, kultural, dan langsung dari konflik di Suriah. (2011-2017)
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan de-eskalasi.
3. Untuk menganalisis implikasi keterlibatan Rusia terhadap de-eskalasi konflik di Suriah dalam perspektif resolusi konflik Johan Galtung (2011-2017).

²³ John W. Creswell, *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 4th Edition, , (California: SAGE Publications, 2014), hlm. 124

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan tentang upaya de-eskalasi di Syria dengan pisau analisis resolusi konflik Johan Galtung. Disamping hal tersebut, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dalam bidang studi pertahanan dan resolusi konflik. Data-data yang menjadi sumber penelitian ini sekiranya bermanfaat bagi sumbangan ilmu terkait dengan konflik Syria.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian terhadap upaya Rusia dalam de-eskalasi konflik Suriah sangat penting untuk dilakukan mengingat konflik yang terjadi atas Syria telah secara luas berdampak pada dunia internasional dan secara tidak langsung kepada Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan temuan yang signifikan implikasi keterlibatan Rusia dan dapat memberikan penilaian yang obyektif terhadap dampak dari implikasi strategi yang telah dilakukan. Hal tersebut agar menjadi saran dan masukan bagi penyelesaian konflik di Syria. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan dalam upaya peninjauan terhadap keterlibatan dalam meresolusi konflik di Syria dan menciptakan stabilitas global. Penelitian ini merujuk pada pencaharian sumber data primer yang dapat dipercaya, agar akurasi penelitian ini dapat terjaga ditengah-tengah pemberitaan media yang didominasi oleh produksi barat. Penelitian ini bersignifikansi kepada:

1. **Untuk Indonesia.** Penelitian ini akan berkontribusi bagi Indonesia dalam pembaharuan penelitian mengenai konflik di Asia Timur Tengah dan strategi Rusia dalam menangani konflik di negara tersebut. Hal ini akan membantu negara dalam membaca pola lingkungan strategis yang berkembang secara cepat. Upaya yang dilakukan Rusia kemudian dapat dijadikan pembelajaran di dalam meresolusi konflik yang terjadi di dalam negeri.

2. **Untuk Rusia.** Penelitian ini akan menjadi refleksi terhadap upaya perdamaian mereka, dimana di dalam kesimpulan penelitian akan terlihat eskalasi/deeskalasi strategi tersebut. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran besaran kontribusi mereka terhadap Suriah dan dapat menjadi pertimbangan evaluasi bagi pelaksanaan strategi tersebut untuk tetap dilanjutkan maupun diformulasikan kebijakan baru untuk perbaikan.
3. **Untuk Suriah.** Sebagai negara yang memiliki konflik yang cukup rumit dengan banyaknya keterlibatan aktor-aktor baik negara maupun non-negara, implikasi strategi Rusia akan memberikan gambaran mengenai kontribusi negara tersebut dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melanjutkan maupun mengubah strategi dalam menyelesaikan konflik di Suriah.
4. **Untuk Akademisi.** Tesis ini diharapkan dapat menutup kesenjangan ilmu pengetahuan yang berkembang, dengan belum adanya penelitian mengenai hal ini, Hasil dari penelitian ini dapat memperluas penelitian dan menjadi inspirasi dalam meneliti hal-hal yang baru terkait dengan permasalahan di dalam tesis ini. Diharapkan juga mahasiswa dapat terbantu dalam konteks pengembangan teori agar lebih kreatif pengembang konsep, penulisan dan pengorganisasian konsep.

BAB II KAJIAN TEORITIK

1.6 Deskripsi Konseptual

1.6.1 Teori Konflik

Secara epistemologi konflik berasal dari kata kerja latin *confligere* yang berarti saling memukul. Pengertian konflik sendiri di dalam KBBI berarti percekocokan; perselisihan; pertentangan.²⁶ Pengertian konflik sangat beragam karena konflik terjadi di setiap lapisan berkehidupan. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.²⁷

Tipologi Hubungan Ruang Dunia (*World Space Relations*) Johan Galtung²⁸

Galtung membagi tipologi konflik ke dalam kategori aktor dan kekuatannya. Dalam tipologi ini aktor dibedakan menjadi dua, yaitu aktor negara dan aktor bukan negara. Aktor negara ini kemudian digolongkan berdasarkan kekuatannya menjadi dua, yakni negara kuat dan negara lemah. Negara kuat adalah negara-negara *superpower*, poros kekuatan dunia seperti Amerika, Cina, Rusia, maupun negara-negara kuat di regional seperti Israel di Timur Tengah dan Jerman di Eropa. Negara lemah adalah

²⁶ Kemendikbud, "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>, diakses pada 20 Agustus 2018

²⁷ Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary conflict resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, 3rd edition (Cambridge: Polity Press, 2011), hlm. 15

²⁸ Johan Galtung, "On The Causes of Terrorism and Their Removal", New Jersey: Princeton University, 1976, hlm. 4-7

penggambaran relatif bahwa tidak mungkin negara tersebut memenangkan peperangan terbuka.

Aktor non-negara sangatlah lebih beragam dan kompleks dibandingkan dengan aktor negara. Aktor non-negara berdasarkan ruang lingkungannya dapat dikategorikan sebagai non-negara nasional dan transnasional. Aktor transnasional tidak hanya memiliki kerjasama dengan negara lain, namun juga beranggotakan komunitas internasional. Hal ini yang membedakan Terrorisme Internasional (TI) dan terorisme intra-negara.

Tabel 2.1 Tipologi Hubungan Ruang Dunia Johan Galtung

Who	To whom	Strong state	Weak state	Strong state	non-state	Weak state	non-state
Strong state		Superpower conflict	Conquest: bullying (ST)	Penetration; co-optation		Repression	state terrorism
Weak state		Insubordination (ST)	Conventional conflict	Accommodated; penetrated; co-opted		Penetration; co-optation	
Strong non-state		Internal war; accomodation	Penetrated; co-opted; accomodated				
Weak non-state		Guerrilla terrorism	Internal war; accomodation				

Daerah berwarna kuning menunjukkan perang konvensional antar negara dimana konflik yang sering terjadi berdasarkan kepentingan teritorial ataupun politik. Jika kekuatan tidak berimbang, ketika negara kuat melawan negara lemah maka yang terjadi adalah terorisme negara (ST). Pada daerah berwarna hijau menunjukkan upaya negara dalam menguasai aktor non-negara, jika aktor non-negara seimbang maka dapat terjadi tawar-menawar dan berasimilasi dalam sistem kenegaraan dengan paksaan dan monopoli dari negara. Namun jika negara lemah dan aktor non-negara kuat, maka aktor non-negara dapat menembus sistem pemerintahan, kepemilikan, dan militer. Sebaliknya, jika negara kuat melawan non-negara lemah maka negara akan melakukan represi terhadap kelompok tersebut, sehingga menghasilkan ST.

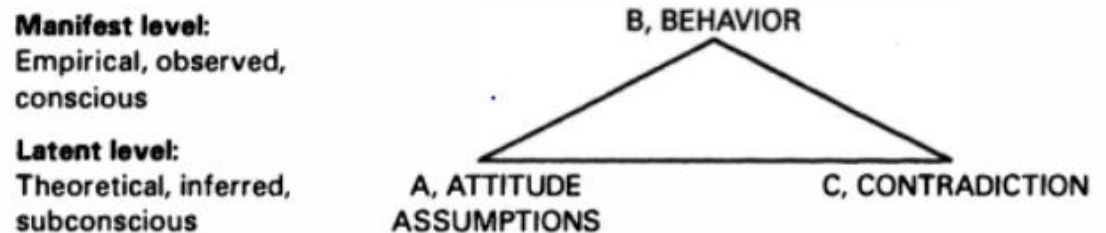
Pada daerah berwarna abu-abu, non-negara melakukan inisiasi untuk melawan negara. Jika kekuatan simetris maka yang terjadi adalah pemberontakan rakyat, hal ini disebut juga perang internal atau perang sipil. Asimetris kekuatan pada warna hijau dan abu-abu menentukan perubahan yang signifikan pada situasi non-negara, dimana yang kuat akan menembus dan menguasai negara sedangkan yang lemah tidak akan mampu berbuat banyak. Hal yang sama juga terjadi pada negara, jika kuat maka akan hanya mengakibatkan kerusuhan, namun jika lemah aspek-aspek negara seperti militer, ekonomi, budaya, dan politik akan dikuasai oleh teroris.

Segitiga Konflik ABC dan Segitiga Kekerasan Johan Galtung

Menurut Johan Galtung, di dalam setiap konflik terdapat kontradiksi, dimana ada sesuatu dalam keinginannya untuk mencapai sesuatu. Maka adanya pertikaian tersebut dapat dengan mudah bergeser menjadi upaya untuk menyakiti atau menghancurkan. Konflik dapat dijelaskan di dalam segitiga, yang bernama segitiga ABC, $\text{Konflik} = A + B + C$, yang berarti konflik merupakan akumulasi dari *attitude/assumptions*, *behavior*, dan *contradiction*

content.²⁹ Dimana B berada pada lapisan permukaan yang terlihat, A dan C berada pada level laten. Tindakan agresif dapat dipicu oleh rasa frustrasi dimana tujuan yang ingin dicapai dihalangi oleh sesuatu, dengan melakukan diagnosis maka konflik dapat terselesaikan dari akarnya.

Kontradiksi merupakan penyebab konflik utama, dimana terjadi kegagalan pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama, yang merupakan akar dari setiap konflik.³⁰ Hal ini termanifestasikan dalam keinginan untuk mencapai atau memiliki sesuatu, baik individu, kelompok, negara, atau sekumpulan negara memiliki 'tujuan' yang ingin dicapai, maka konflik dapat terjadi mulai dari antar individu, kelompok, negara, hingga aliansi negara selama memiliki 'tujuan' disertai dengan kegagalan dalam pencapaiannya. Namun penanganan konflik dengan menyamaratakan semua individu sesuai dengan identitas kelompoknya tidak akan menyelesaikan masalah, karena perspektif konflik haruslah melibatkan yang 'hidup' (manusia) dan tidak melibatkan yang 'tidak hidup' (identitas kelompok, negara, aliansi).³¹



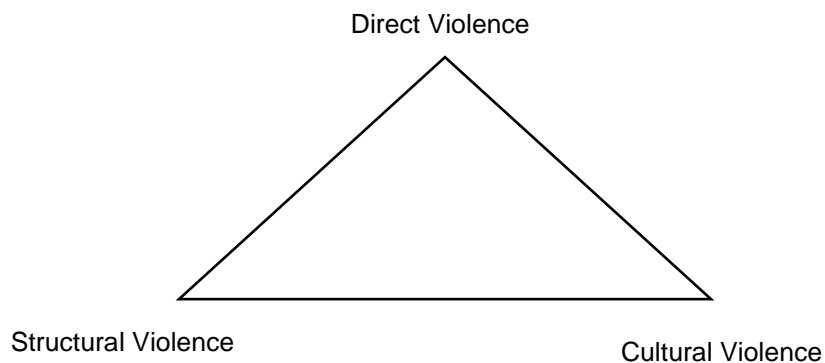
Gambar 2.1 Segitiga ABC
Sumber: Galtung (1996)

²⁹ Johan Galtung, *Peace by Peaceful Means*. (London: SAGE, 1996), hlm. 71

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Segitiga ini menjelaskan konflik dalam enam arah yang dapat dimulai dari titik manapun. Jika dimulai dari kontradiksi, maka perasaan frustrasi akibat tujuan yang terhalangi dapat menciptakan sikap agresif dan berujung pada tindakan agresi yang kemudian menimbulkan kontradiksi pada pihak lainnya yang dapat menstimulasi tindakan yang lebih agresif.³² Segitiga konflik akan terus terjadi hingga kedua pihak merasa kelelahan, baik pada sudut 'A' kelelahan emosional maupun sudut 'B' kelelahan fisik, namun selama masih ada sudut 'C' maka konflik terbuka akan dapat selalu terjadi.³³ Konflik yang dimulai dari *Attitude* merupakan bentuk akumulasi sikap negatif dan bertemu dengan *Contradiction*, yang kemudian berkembang menjadi *Behavior* yang negatif.



Gambar 2.2 Segitiga Kekerasan

Berkaitan dengan ABC, kekerasan juga berada pada tingkatan terlihat dan tidak terlihat. Keterkaitan pada setiap sudut segitiga menjadikan *Direct violence* yang berbentuk perang, pembunuhan, dan tindakan kekerasan fisik lainnya merupakan bentuk dari *behavior*, *cultural violence* merupakan *attitude* dan kepercayaan yang membenarkan dan melegitimasi kekerasan struktural

³² *Ibid*, hlm. 72.

³³ *Ibid*.

sehingga rasional kekerasan dianggap yang paling benar dalam menghadapi situasi, dan *cultural violence* merupakan ketidakadilan dan eksploitasi di sistem sosial, sehingga menghambat kemampuan seseorang untuk mengembangkan kemanusiaannya secara utuh.³⁴

Kekerasan yang paling jelas terlihat adalah kekerasan langsung (*direct/personal*), karena setiap ancaman fisik seperti pemerkosaan, pembunuhan, perang, dan genosida termasuk di dalam kategori ini. Kekerasan langsung disebut juga kekerasan personal karena pelaku dari kekerasan adalah manusia (baik individu maupun kelompok). Kekerasan langsung merupakan kekerasan yang paling tidak stabil dan sangat mudah untuk di deteksi dengan melibatkan kekerasan fisik maupun verbal, dimana baik pelaku maupun korbannya mudah untuk diidentifikasi. Kekerasan langsung sangat bergantung kepada kekerasan kultural dan struktural, dimana kekerasan kultural dan struktural menyebabkan kekerasan langsung, kekerasan langsung dalam timbal baliknya memperkuat kekerasan kultural dan struktural.

Kekerasan kultural didefinisikan sebagai aspek-aspek budaya yang dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan melalui kekerasan langsung dan struktural.³⁵ Tidak seperti bentuk kekerasan lainnya, kekerasan kultural adalah landasan dari kekerasan lainnya. Hal ini dapat berwujud pada norma-norma sosial yang kuat, yang mampu membenarkan tindakan kekerasan struktural dan langsung. Melalui budaya, kekerasan dapat diturunkan hingga lintas generasi sehingga untuk benar-benar memutus interaksi antar kekerasan, akar kekerasan haruslah benar diselesaikan secara menyeluruh.

³⁴ *Ibid*, hlm. 11

³⁵ *Ibid*, hlm. 208

Kekerasan struktural dapat juga disebut ketidak-adilan sosial dan ketidak-persamaan yang terbangun di dalam masyarakat.³⁶ Konflik disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan ketidak-seimbangan kesempatan dalam mendapatkan akses yang sama. Aktor-aktor konflik tidak dapat ditentukan secara jelas, karena baik pelaku maupun korban adalah sebuah institusi dan kelompok masyarakat. *Damage* dari kekerasan ini tidak terlihat secara fisik, tetapi melalui ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan ketimpangan yang tinggi, kekerasan ini erat kaitannya dengan kekerasan antar kelas, dengan pihak yang kuat melemahkan masyarakat. Kekerasan struktural merupakan bentuk kekerasan yang cukup stabil karena sistemnya yang sudah terbentuk di masyarakat.

1.6.2 Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam berakar akan diperhatikan dan diselesaikan, dengan indikasi bahwa pelaku tidak lagi dipenuhi oleh kekerasan, menunjukkan sikap yang tidak membahayakan, dan perubahan struktur konflik. Tujuan penyelesaian konflik adalah bukan untuk menghilangkan konflik, melainkan mentransformasi kekerasan ataupun potensi kekerasan menjadi damai (tanpa kekerasan). Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah-langkah yang dilakukan dalam meresolusi konflik haruslah benar-benar tepat.

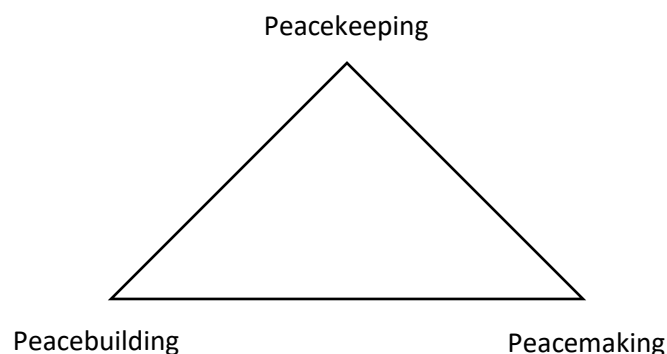
Johan Galtung menggunakan istilah medis dalam menjelaskan proses meresolusi konflik, diibaratkan seperti mengobati sebuah penyakit, dimana dibutuhkan tahapan diagnosis, prognosis, dan terapi.³⁷ Diagnosis merupakan analisis konflik berdasarkan data, serta mengklasifikasikan konflik tersebut

³⁶ Galtung, *Loc. Cit.*

³⁷ *Ibid*, hlm. 10

sehingga mendapatkan “obat” yang tepat untuk konflik tersebut dengan menggunakan alat-alat resolusi konflik. Tahap tersebut merupakan bagian dari proses prognosis, dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu terapi yang merupakan intervensi dalam menyelesaikan konflik tersebut secara tepat sesuai dengan diagnosis dan prognosis yang telah dilakukan.

Segitiga Perdamaian Johan Galtung



Gambar 2.3 Segitiga Perdamaian Johan Galtung

Dalam mencapai perdamaian, terdapat tiga pendekatan perdamaian yang digagas oleh Galtung, yakni *peacekeeping*, *peacebuilding*, dan *peacemaking*.³⁸ *Peacekeeping* adalah konteks ini adalah intervensi kekuatan bersenjata yang tidak berdoktrin pada kekerasan, namun bertujuan untuk menciptakan perdamaian. Model *peacekeeping* yang ideal adalah yang tidak berbentuk perimbangan kekuatan dan perlombaan senjata, dan tidak bertujuan untuk menghancurkan namun untuk menciptakan peluang terhadap resolusi konflik tanpa senjata.³⁹ Permasalahan *peacekeeping* jauh lebih dalam dari legitimasi, namun bagaimana upaya tersebut dapat mengatasi konflik horizontal, vertikal, dan diagonal.

³⁸ Johan Galtung, *Peace, War and Defense*, (Copenhagen: Ejlers, 1976), hlm. 282

³⁹ *Ibid.*

Bentuk intervensi *peacekeeping* perlu dilakukan sesuai dengan diagnosis dan prognosis terhadap konflik. Pada Konflik horizontal (simetris) dimana kekuatan kubu yang berseteru relative berimbang, maka peran *peacekeeper* juga harus simetris, yakni menjaga perdamaian dari kedua kubu dengan interaksi dua arah, sedangkan konflik vertikal (asimetris) dimana kekuatan kedua kubu tidak berimbang, maka intervensi dilakukan untuk mencegah timbulnya korban lebih lanjut akibat tekanan dari pihak yang mendominasi dengan interaksi satu arah.⁴⁰

Untuk meresolusi sebuah konflik seutuhnya, maka konflik yang laten juga harus diselesaikan. Ketika tensi kekerasan langsung telah menurun ataupun hilang, masih ada residu kebencian maupun *prejudice* yang tetap melekat pada masing-masing kubu. Pada tahap ini, *peacemaking* berperan sebagai tahap awal dari transformasi konflik, dimana perdamaian tidak semata-mata sebagai ketiadaan perang namun terjadi pemulihan hubungan dengan menyelesaikan kontradiksi dari pihak-pihak yang bertikai.⁴¹ Ketika sebuah 'tujuan' tidak dapat dicapai, konflik yang berkepanjangan dapat mengkristalkan kepentingan mengakibatkan pembentukan formasi, mobilisasi dan organisasi pada masing-masing pihak masing-masing pihak.⁴² Kontradiksi yang tidak terselesaikan dapat sewaktu-waktu menjadi konflik terbuka karena pihak-pihak yang bertikai masih memiliki sikap yang negatif terhadap sesamanya.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 286-288.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 290

⁴² *Ibid*.

Tabel 2.2 Dua belas pendekatan resolusi konflik Johan Galtung

<i>Sistem-aktor</i>	<i>Sistem-Konflik</i>	<i>Ketidakcocokan hilang</i>	<i>Ketidakcocokan tetap</i>
<i>Tetap</i>	tetap	1. Ketidakcocokan terselesaikan	7. Menambah aksi-intra positif
		2. Kompromi	8. Menambah aksi-inter positif
<i>Berubah</i>	Berubah (diperluas)	3. Pertukaran (<i>trading</i>)	9. Menambah aksi-inter negatif
	Diperluas dengan menambah aktor	4. Multiralisasi	10. Interaksi dengan aktor lain
	Mengubah hubungan	5. Disintegrasi	11. Dominasi
	Kontraksi dengan satu aktor	6. Integrasi	12. Eliminasi

Dalam *peacemaking*, negosiasi sering kali dipakai untuk menemukan titik temu terhadap ‘tujuan’ yang tidak dapat dicapai.⁴³ Strategi negosiasi dapat dilakukan dengan mempertahankan atau mengubah sistem-aktor maupun sistem-konflik. Jika tetap mempertahankan sistem-konflik dan sistem-aktor, maka hal yang dapat dinegosiasikan adalah (1) mencapai kesepakatan kedua dapat mencapai tujuan yang diinginkan, baik seutuhnya maupun sebagian; (2) kedua pihak berhenti mengejar tujuan tersebut untuk menghentikan konflik

⁴³ *Ibid.* hlm 291

serta menambah attitude positif baik secara internal dan external.⁴⁴ Jika mempertahankan sistem-aktor, maka sistem-konflik akan diubah dengan melibatkan konflik baru sehingga terbentuk perubahan konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pertukaran (*trading*) melibatkan aktor lain yang dapat mengubah pola konflik.⁴⁵

Jika mengubah sistem-aktor, maka sistem-konflik otomatis akan berubah. Cara-cara yang dapat ditempuh adalah pembelahan atau fusi aktor-aktor konflik, menunda terjadinya konflik dengan memberikan aktifitas berupa interaksi positif di dalam suatu pihak (*intra-action*) atau aktifitas interaksi positif antar pihak (*inter-action*).⁴⁶ Tidak hanya hubungan interaksi positif, interaksi negatif di aksi-intra dapat dilakukan untuk mengubah pola konflik dengan menghasilkan konflik baru, dengan asumsi bahwa konflik baru dapat menggantikan konflik lama. Dapat juga mengalihkan fokus terhadap pihak diluar konflik untuk mengatasi kebuntuan (membekukan konflik).⁴⁷ Dalam resolusi konflik struktural (dominasi) maka perubahan psikologi terhadap salah satu pihak dimana salah satunya tidak mampu lagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, atau pendekatan lainnya yaitu konflik langsung (eliminasi) dengan meniadakan setidaknya salah satu aktor agar kerusakan tidak berlanjut.⁴⁸

Penyebab kebencian yang memuncak dan tingkah laku yang agresif terletak jauh di dalam struktur konflik. Untuk melawan konflik struktural maka perlu dibangun struktur perdamaian. Solusi yang ditawarkan oleh Johan Galtung dalam membangun infrastruktur perdamaian adalah: (1) Persamaan, hubungan yang setara dengan interaksi horizontal dan pola simetrik; (2)

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 192.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 193

⁴⁸ *Ibid*.

Entropi, melibatkan dari elit hingga level masyarakat untuk menghindari monopoli interaksi kekuatan-kekuatan besar dalam hubungan internasional dengan membuka jalur komunikasi multi level; (3) Simbiosis, hubungan yang saling ketergantungan sehingga jika sebuah pihak menghancurkan pihak lain maka juga akan menghancurkan dirinya sendiri; (4) Ruang lingkup yang luas, terjalin kerjasama pada banyak bidang dapat menghindari kebuntuan dalam konflik; (5) Domain besar, melibatkan banyak pihak dalam kerjasama dapat membuka perdamaian melalui multilateral jika terjadi konflik; (6) Superstruktur, membangun hubungan yang erat dengan mendirikan sebuah lembaga atau organisasi yang mengikat.⁴⁹

Ketiga poin pertama adalah sebuah negosiasi untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak asasi seperti eksploitasi, elitisme dan isolasi. Ketika hal tersebut terselesaikan melalui persamaan, entropi, dan simbiosis, maka tahap selanjutnya adalah untuk menghindari konflik ‘tujuan yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Maka tahapan-tahapan selanjutnya adalah upaya untuk menghindari kebuntuan konflik dengan melibatkan pihak-pihak multi dimensi dan aktor serta superstruktur untuk mengokohkan interaksi positif.

Peacebuilding merupakan tahapan untuk membentuk sistem yang sehat sehingga pihak-pihak tidak membutuhkan perjanjian ataupun hukum untuk menciptakan perdamaian. Hal ini diibaratkan Galtung sebagai pembangunan daya tahan tubuh dengan membangun struktur yang menangkal sebab-sebab perang dan menyediakan alternatif terhadap perang pada situasi dimana perang memungkinkan untuk terjadi.⁵⁰ Dalam hal ini Galtung memberikan saran seperti dalam tabel 2.3:

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 298-302

⁵⁰ *Ibid*.

Tabel 2.3 Model Peacebuilding Galtung

<i>Hubungan sosial</i>	
<i>Vertikal</i>	1. Keadilan
<i>Nol</i>	2. Entropi
<i>Horizontal</i>	3. Simbiosis
	4. Cakupan luas
	5. Domain besar
	6. Suprastruktur

} Infrastruktur

Keadilan yang dimaksud adalah tidak ada pihak yang di eksploitasi karena adanya perbedaan dalam kekuatan ataupun kedudukan. Entropi adalah melibatkan pihak-pihak tidak hanya pemerintah dan elit tetapi juga interaksi secara beragam di dalam pembangunan perdamaian. Hubungan simbiosis berarti masing-masing pihak yang berkonflik memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, cakupan luas berarti adanya berbagai jenis petukaran, bukan hanya ekonomi. Domain besar berarti adanya melibatkan aktor yang luas di dalam relasi, serta suprastruktur yaitu adanya lembaga yang mengatasi hubungan antar pihak-pihak yang berkonflik.

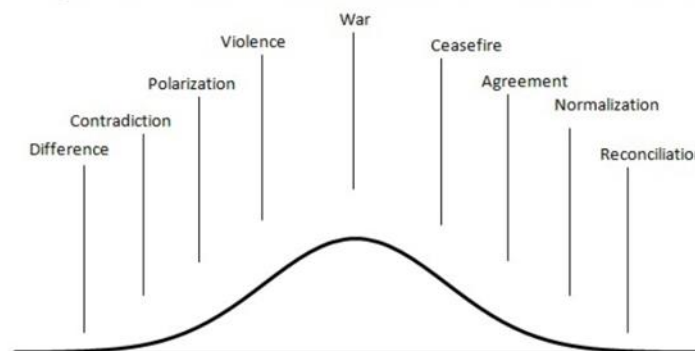
1.6.3 Teori Eskalasi De-Eskalasi Konflik

Model Eskalasi dan De-eskalasi Konflik Ramsbotham

Model eskalasi dan de-eskalasi konflik merupakan buah pemikiran Ramsbotham yang terinspirasi dari model konflik Johan Galtung. Model

eskalasi konflik menggambarkan bagaimana konflik berpindah dari satu tahap ke tahap lain yang membentuk kurva normal eskalasi dan deeskalasi konflik.

Secara umum, model tersebut membagi tahapan konflik menjadi dua fase utama yaitu fase eskalasi dan fase de-eskalasi. Dalam fase eskalasi, terdapat 5 tahap, yaitu: perbedaan, kontradiksi, polarisasi, kekerasan, dan perang. Tahap perbedaan (difference) merupakan bagian dari perkembangan sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan nilai maupun struktur. Setelah melalui tahap perbedaan, konflik menuju tahap kontradiksi. Ramsbotham meminjam istilah contradiction dari Galtung yang didefinisikan sebagai situasi ketika adanya ketidakcocokan tujuan dari pihak- pihak yang berkonflik. Ketidakcocokan ini dapat disebabkan oleh tidak sepadannya nilai-nilai sosial dan struktur sosial dalam suatu masyarakat. Dalam kedua tahap ini, biasanya konflik belum mencuat ke permukaan.⁵¹



Gambar 2.4 Model eskalasi de-eskalasi konflik Romsbotham

Tahap ketiga yaitu tahap dimana konflik mulai nampak ke permukaan. Antarpihak yang berkonflik mulai terlihat saling bertentangan dan kubu-kubu

⁵¹ Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse dan Hugh Miall, *Contemporary conflict resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, 3rd edition (Cambridge: Polity Press, 2011), hlm. 13

mulai terbentuk. Tahap ini disebut dengan polarisasi. Puncak dari pertentangan antarkedua belah pihak adalah tahap kekerasan dan perang. Pada tahap kekerasan, pengerahan pasukan bersenjata tidak selalu terjadi. Namun pada tahap perang, pihak-pihak yang berkonflik mengerahkan pasukan senjatanya secara penuh untuk menghancurkan pihak lawan.⁵²

Setelah perang terjadi, konflik mulai memasuki fase kedua yaitu de-eskalasi. Dalam fase de-eskalasi, terdapat 4 tahap: gencatan senjata, kesepakatan, normalisasi, dan rekonsiliasi. Tahap gencatan senjata (ceasefire) disertai oleh akhir permusuhan, penarikan kekuatan, dan mendiskusikan hubungan bilateral yang sebelumnya telah ada. Tahap ini diikuti oleh tahap agreement (kesepakatan). Tahap ini terjadi ketika kedua belah pihak sudah siap untuk masuk ke tingkat pembicaraan yang lebih tinggi. Mereka juga biasanya menandatangani perjanjian bilateral untuk memperkuat kerja sama antarkedua belah pihak. Selain itu, mereka berjanji untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur damai.⁵³

Ketika dua tahap ini terlewati, maka tahap selanjutnya adalah normalisasi (normalization). Normalisasi terjadi pada kondisi pascaperang yang tampak ketika suatu negara memiliki kapasitas untuk melakukan atau mewujudkan hal-hal berikut: mensipilkan politik, keamanan bermasyarakat, budaya kekerasan yang sudah bertransformasi, pengadilan dan polisi yang tidak lagi dipolitisasi, respek terhadap hak-hak individu dan minoritas, penurunan kejahatan yang terorganisir, pemindahan kekuasaan yang damai lewat pemilu yang demokratis, dan lain sebagainya. Sedangkan fase terakhir, rekonsiliasi (reconciliation) didefinisikan sebagai pengembalian hubungan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* hlm. 14

yang terputus dan belajar untuk hidup tanpa kekerasan dengan menerima bentuk-bentuk perbedaan (differences).⁵⁴

Konflik kontemporer diprediksi oleh Jongnam dan Schmid akan didominasi oleh konflik dalam negeri, sehingga peperangan tradisional tidak akan menunjukkan intensitasnya. Hal ini serupa dengan hipotesis Huntington bahwa konflik pasca perang dingin bukanlah lagi antar negara, melainkan antar peradaban yang meliputi identitas budaya dan agama, dengan *Islamic extremism* yang menjadi ancaman terbesar di dalam perdamaian dunia.⁵⁵

Teori konflik digunakan untuk diagnosis konflik, yang berarti meneliti sumber penyebab konflik untuk mengetahui “obat” atau solusi dari permasalahan yang terjadi agar terjadi *sustainable peace*. Hal ini yang sering menjadi permasalahan aktor-aktor *stakeholder* yang bertujuan ingin mendamaikan konflik namun dengan keterbatasan diagnosis maka upaya resolusi konflik menjadi gagal. Dengan mengetahui konflik secara menyeluruh maka dalam resolusinya dapat dilakukan pendekatan yang tepat sesuai dengan “penyakit” yang diderita sebuah kelompok ataupun negara. Teori ini akan menjawab subfokus penelitian pertama.

Kerangka dinamis pencegahan dan resolusi konflik Ichsan Malik⁵⁶

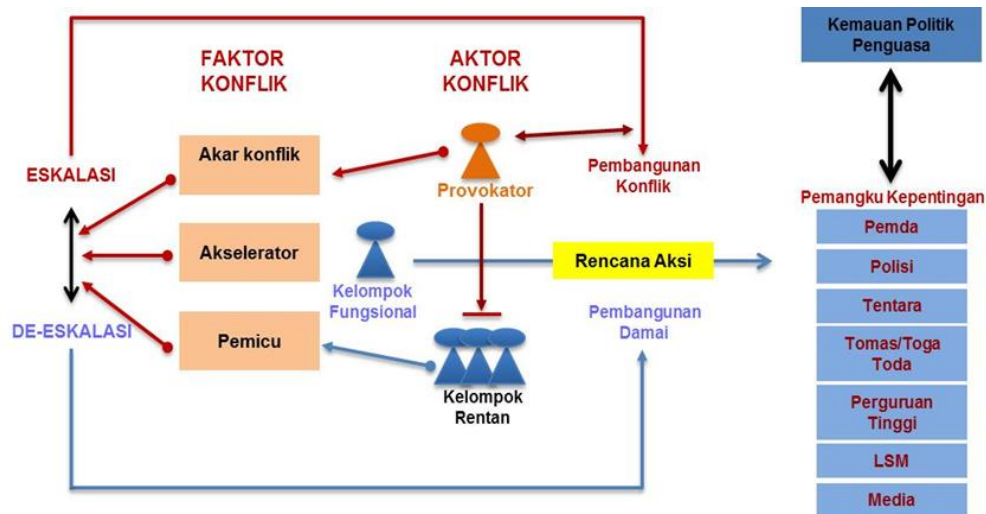
Kerangka dinamis berfungsi untuk menganalisis situasi dan kondisi konflik dan pasca konflik secara dinamis, serta menemukan sumber konflik pada kelima komponen tersebut. Konflik dapat disebabkan oleh: (1) pembiaran eskalasi konflik sehingga konflik semakin berkembang; (2) faktor pemicu konflik yang

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Samuel Huntington, *Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, (New York: Simon & Schuter, 1996)

⁵⁶ Ichsan Malik, *Resolusi konflik: Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017), hlm. 233-235

kuat; (3) kuatnya aktor provokator yang mempengaruhi kelompok rentan untuk dimobilisasi. Kerangka yang dikembangkan oleh Dr. Ichsan Malik dan Institut Titan Perdamaian ini merupakan kerangka deteksi dini dan resolusi konflik yang memiliki 5 komponen utama yaitu: komponen eskalasi-deeskalasi, faktor politik, aktor konflik, pemangku kepentingan, dan kemauan politik penguasa untuk meresolusi konflik.



Gambar 2.5 Kerangka Dinamis Resolusi Konflik

Komponen pertama merupakan tingkat eskalasi dan deeskalasi, yang merupakan sumber konflik jika dibiarkan terjadi. Konflik yang bermula dari ketegangan dapat berkembang menjadi mobilisasi massa, yang kemudian dapat berkembang lagi menjadi krisis pada seluruh pihak yang berkepentingan, selanjutnya jika tidak diselesaikan akan menimbulkan korban akibat kekerasan masal, kekerasan tersebut jika tidak dapat dikendalikan dapat berkembang menjadi konflik antar warga, hingga menjadi perang. Hal tersebut menunjukkan bahwa eskalasi memberikan pengaruh secara langsung terhadap pembangunan konflik. Sebaliknya, jika ada deteksi dini untuk

mencegah konflik, dengan cara mengendalikannya melalui musyawarah, mediasi, diplomasi, dan lainnya, maka jika ditangani dengan baik, kondisi krisis dapat diatasi dan terjadi deeskalasi. Deeskalasi secara langsung berkontribusi terhadap pembangunan perdamaian.

Komponen kedua adalah faktor konflik yang memiliki tiga elemen, yaitu (1) Elemen pemicu konflik merupakan faktor yang muncul secara tiba-tiba di dalam kejadian konflik (pembunuhan, perkelahian, pemilihan kepala daerah) yang dianalogikan sebagai api yang membakar rumput kering. (2) Elemen eskalator konflik yang merupakan reaksi pendorong di dalam kejadian konflik, yang jika terjadi secara luas dapat menyebarkan konflik menjadi semakin besar kesegala arah. Dianalogikan sebagai angin panas yang menyebarkan api ke segala arah. (3) Elemen akar konflik adalah sumber konflik yang paling mendasar berasal dari kondisi struktural masyarakat. Dapat berupa kemiskinan, korupsi, ketidakcakapan pemerintahan dalam mengelola daerahnya, pengelolaan sumber daya yang tidak benar. Hal tersebut dianalogikan sebagai rumput kering yang mudah terbakar.

Komponen ketiga adalah komponen kunci dalam eskalasi/deeskalasi konflik, yakni aktor konflik, yang memiliki tiga kategori: (1) aktor provokator yaitu yang terlibat secara langsung di dalam konflik, dimana sering kali memiliki logika abnormal yang disebarkan dalam bentuk informasi yang didistorsi, kemudian dipercayai seluruhnya oleh aktor kedua, (2) kelompok rentan yang merupakan aktor yang mudah diarahkan persepsinya sehingga mudah dikendalikan oleh aktor provokator. (3) aktor fungsional adalah kelompok yang memiliki kekuatan dan berkewajiban untuk menghentikan konflik (aparatus keamanan/pertahanan, pemerintah daerah). Peran aktor fungsional dalam eskalasi konflik adalah ketika mereka gagal dalam memotong pengaruh aktor

provokator terhadap kelompok rentan, dan juga keterlambatan dalam penanganan konflik.⁵⁷

Komponen keempat adalah pemangku kepentingan, yakni aktor yang berkepentingan untuk menghentikan konflik. (polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, media) yang berperan untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan kelompok fungsional dalam meresolusi konflik. Mereka berperan sebagai pihak yang menginisiasi perdamaian dan menjadi bagian dari solusi. Dan komponen kelima adalah kemauan politik penguasa, yang ditunjukkan dalam 2 hal, yakni dari inisiatif pemimpin dan adanya produk-produk kebijakan / hukum untuk menyelesaikan dalam menyelesaikan konflik. Kelima komponen dalam kerangka dinamis saling mempengaruhi dan memberikan kontribusi di dalam eskalasi/deeskalasi konflik, maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan rangkaian yang positif darikelima komponen tersebut.

Teori segitiga konflik, kekerasan, dan perdamaian digunakan sebagai grand theory untuk secara menyeluruh mendiagnosa konflik Suriah dan memberikan penawar yang tepat bagi konflik tersebut. 'Obat' yang sudah diberikan Rusia kemudian akan dikaji apakah berhasil mengeskalasi atau mende-eskalasi konflik tersebut. Teori ini akan membahas subfokus penelitian kedua. Faktor-faktor keberhasilan akan ditinjau menggunakan kerangka dinamis resolusi konflik dalam melihat keberhasilan ataupun kegagalan Rusia dalam de-eskalasi konflik Suriah, yang merupakan subfokus penelitian ketiga.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 235

1.6.4 Konsep *Collective Self-defense*

Collective self-defense secara hukum diatur di dalam Piagam PBB pasal 51 yang berbunyi:⁵⁸

“Tidak ada suatu ketentuan dalam Piagam ini yang boleh merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil oleh Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat mengurangi kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional.”

Pasal ini memiliki interpretasi yang beragam. Di dalam pasal 51, dinyatakan bahwa, dalam keadaan konflik bersenjata, sebuah negara memiliki hak mutlak untuk melindungi diri, baik secara individu maupun kolektif (*collective self-defense*). Maka, dalam praktiknya, negara dapat bereaksi terhadap konflik bersenjata di negara lain. Deskripsi lainnya yang melengkapi pengertian terhadap *self-defense* sendiri terdapat pada Prinsip-prinsip Hukum Internasional Chatham House tentang penggunaan senjata dalam *self-defense* bahwa pasal tersebut menjelaskan mengenai intervensi di dalam maupun melawan negara lain tanpa persetujuan dari negara tuan rumah tidak dapat dibenarkan.⁵⁹ Melalui keputusan hakim dalam kasus Nikaragua v. Amerika Serikat tahun 1986, konsep *self-defense* yang digunakan AS dalam pembelaannya dalam

⁵⁸ Piagam PBB Bab 7 Ayat 51: Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of collective or individual self-defence if an armed attack occurs against a member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by members in exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

⁵⁹ Principles of International Law on the Use of Force by States In Self-Defence, dalam <https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/108106>, diakses pada 5 Oktober 2018

menggunakan senjata di Nikaragua dinyatakan tidak sah oleh hakim. Nikaragua sebagai negara tuan rumah tidak pernah meminta AS untuk melakukan intervensi terhadap negaranya, dimana Nikaragua menang atas gugatannya dalam *International Court of Justice*, keputusan hakim diantaranya:⁶⁰

2. Menolak pembenaran pembelaan diri kolektif yang dilakukan oleh Amerika Serikat sehubungan dengan kegiatan militer dan paramiliter di dan melawan Nikaragua yang menjadi subyek kasus;
3. Memutuskan bahwa Amerika Serikat, dengan melatih, mempersenjatai, memperlengkapi, membiayai dan memasok pasukan kontra atau dengan cara lain mendorong, mendukung, dan membantu kegiatan militer dan paramiliter di dan melawan Nikaragua, telah bertindak, terhadap Nikaragua, melanggar kewajibannya menurut Hukum Kebiasaan Internasional untuk tidak campur tangan dalam urusan negara lain;

Pada kasus Republik Demokratik Kongo v. Uganda keputusan hakim menyatakan bahwa tindakan Uganda merupakan pelanggaran hukum internasional melalui keterlibatan militernya melawan DRC. Keputusan hakim diantaranya:⁶¹

4. Pengadilan menemukan bahwa Uganda:
 - Dengan memberikan dukungan berupa kekuatan militer, logistik, ekonomi dan dukungan finansial terhadap pasukan ireguler di dalam teritori Kongo telah melanggar prinsip non-penggunaan senjata dan non-intervensi;
5. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan semakin diperberat dengan besarnya tragedi kemunsiaan yang mendasarinya. Akibatnya, temuan pengadilan menyatakan bahwa Uganda telah melanggar kewajibannya di bawah instrument hukum internasional berikut: Pasal 2 paragraf 3 piagam PBB, melarang penggunaan senjata oleh negara-negara dalam hubungan internasional; Piagam Organisasi Persatuan Afrika (OAU), yang mewajibkan semua negara untuk menghormati kedaulatan dan integritas territorial satu dengan yang lain, untuk menyelesaikan

⁶⁰Keputusan Pengadilan Nicaragua v. the United States of America (International Court of Justice June 27, 1986).

⁶¹Keputusan Pengadilan DRC v. Uganda (International Court of Justice (19 Desember 2005)

perselisihan antar negara dengan cara damai, untuk menahan diri dari campur tangan dalam urusan dalam negeri; hukum kebiasaan perang yang dilampirkan pada Konvensi Den Haag Keempat pada tanggal 18 Oktober 1907; Konvensi Jenewa Keempat tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang tanggal 12 Agustus 1949; Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tanggal 19 Desember 1966; Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tanggal 27 Juni 1981; Konvensi Hak Anak tanggal 20 November 1989; dan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Tentang Keterlibatan Anak dalam Sitisasi Konflik Bersenjata, yang kesemuanya mengikat pada Uganda.

Maka dapat disimpulkan bahwa *collective self-defense* dilakukan tanpa menciderai kedaulatan negara lain. Rusia menggunakan dasar tersebut sebagai dasar keterlibatannya di dalam konflik Suriah dan mengkritisi kehadiran AS yang juga menggunakan dasar *collective self-defense* untuk melindungi Suriah dari serangan teroris. Sergei Ivanov, kepala staff Presiden Rusia (pada saat itu) menyatakan bahwa permintaan Bashar al-Assad kepada Rusia untuk mengerahkan bantuan militer melegitimasi tindakan Rusia dalam melakukan dukungan militer.⁶² Putin dalam pernyataannya mengajak AS untuk bekerjasama dalam pemberantasan teror setelah AS mendapatkan legitimasi atas eksistensinya di Suriah. Rusia tidak menyatakan bahwa dirinya mengintervensi namun “mendukung” berakhirnya konflik di Suriah.⁶³ Upaya dukungan dilakukan melalui strategi *counter-terrorism* untuk mencegah perluasan teror dalam lingkungan internasional.

⁶² Shaun Walker, “Russian parliament grants Vladimir Putin right to deploy military in Syria”, dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/russian-parliament-grants-vladimir-putin-right-to-deploy-military-in-syria>, diakses pada 21 Agustus 2018

⁶³ Erin Collins, “ Understanding the Legality of Russia's Actions in Syria”, Michigan Journal of International Law, Vol. 37, dalam http://www.mjionline.org/understanding-the-legality-of-russias-actions-in-syria/#_ftn3, diakses pada 21 Agustus 2018

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul	Tahun	Pengarang	Metode	Persamaan	Perbedaan
1	Putin's Power Play in Syria	2016	Stent, Angela	Kualitatif	Pembahasan tentang signifikansi peran Rusia di dalam konflik Suriah	Jurnal tersebut berfokus pada strategi AS untuk <i>counter</i> pengaruh Rusia di Suriah sedangkan Tesis ini membahas mengenai upaya Rusia dalam de-eskalasi konflik Suriah
2	Was R2P a viable option for Syria?	2016	Najem, Tom P.; Soderlund, Walter C.; Briggs, E. Donald; Cipkar, Sarah	Mixed	Membahas tentang dampak R2P dalam konflik Suriah	Thesis membahas tentang upaya de-eskalasi konflik Suriah dengan metode penelitian kualitatif

3	Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights: Evidence from Libya, Bahrain and Syria	2016	Nuruzzaman, Mohammed	Kualitatif	Pembahasan mengenai konsekuensi dalam intervensi di Suriah	Jurnal ini berangkat dari pandangan skeptis terhadap konsep intervensi, sedangkan penulis tidak mendukung maupun menolak intervensi, namun mencari dampak dari intervensi terhadap konflik Suriah.
4	China, Russia, and the Failure of the Responsibility to Protect in Syria: does the Fear of Regime Change offer a Serviceable Explanation?	2013	Janik, Ralph	Kualitatif	Membahas tentang intervensi Rusia di dalam konflik Suriah	Jurnal ini membahas tentang kegagalan Russia dan Cina dalam menjalankan R2P, sedangkan tesis berfokus upaya de-eskalasi Rusia terhadap konflik Suriah

5	Learning from Libya, Acting in Syria	2012	Buckley, Caitlin A.	Kualitatif	Membahas tentang respon internasional terhadap konflik di Suriah	Jurnal ini membahas mengenai pemecahan masalah melalui gencatan senjata dan pemberian sanksi serta pergantian rezim Assad yang dinilai menjadi sumber konflik, sedangkan penulis membahas tentang peranan Rusia terhadap konflik Suriah serta tidak secara spesifik berpihak pada rezim tertentu.
---	--------------------------------------	------	---------------------	------------	--	---

6	Beijing and Moscow Balk at "Inteference"	2012	Menon, Rajan	Kualitatif	Membahas tentang konsep intervensi dimana di dalam jurnal tersebut menyinggung mengenai posisi Rusia dalam tindakan tersebut.	Di dalam tesis ini, penulis secara spesifik membahas mengenai upaya de-eskalasi dan tidak membandingkan dengan AS maupun koalisi NATO.
---	--	------	--------------	------------	---	--

Putin's Power Play in Syria⁶⁴

Stent dalam *Foreign Affairs* menyatakan bahwa AS harus menyeimbangi peranan Rusia yang telah menjadi pemain kunci di Suriah. Hal ini dilandaskan pada besarnya kekuatan Rusia yang dikirimkan ke Suriah yang menjadikan intervensi tersebut yang terbesar oleh Rusia di Timur Tengah selama satu decade terakhir. Jurnal ini memberikan saran untuk AS dalam mengimbangi pengaruh Rusia, yakni AS harus mengetahui tujuan Rusia di Suriah dan Ukraina, serta strategi menjaga hubungan dengan pemimpin Rusia, karena mengisolasi Rusia tidak membuat negara tersebut mundur dari intervensi.

Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti peranan Rusia di Suriah, khususnya di dalam jurnal tersebut disebutkan faktor-faktor yang mendukung Rusia dalam melakukan intervensi serta tujuan dari Rusia dalam menjalankan intervensi. Namun, jurnal ini melihat dari sudut pandang AS, serta secara spesifik menganggap keberadaan Rusia di dalam konflik negara-negara lain merupakan ancaman, berikut dengan memberikan cara-cara untuk mengatasi hal tersebut. Tesis ini tidak berpihak dari sudut pandang Rusia maupun AS, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi upaya Rusia dalam de-eskalasi konflik di Suriah.

Was R2P a viable option for Syria?⁶⁵

Jurnal dari Najem menjelaskan tentang perang sipil di Suriah yang berawal dari "Arab Spring" dan respon internasional di dalam doktrin *Responsibility to Protect* dalam perspektif media Kanada. Metode yang digunakan adalah mixed method, dimana metode kuantitatif mengukur bagaimana *framing* media dalam mendukung maupun menentang intervensi internasional, serta mengukur efektifitas peran

⁶⁴ Angela Stent, "Putin's Power Play in Syria", *Foreign Affairs*, Vol. 95 Iss. 1, 106-113, 2016.

⁶⁵ Tom Pierre Najem, *et al*, "Was R2P a viable option for Syria? Opinion content in the Globe and Mail and the National Post" 2011-2013", *International Journal: Canadas Journal of Global Policy Analysis*, Vol.71(3), 433-449, 2016.

diplomasi ataupun militer dalam mengatasi konflik tersebut. Secara kualitatif, jurnal ini mengkaji tentang berbagai posisi dan opini mengenai R2P di Suriah.

Tesis ini akan membahas mengenai intervensi di Suriah serta dampaknya terhadap konflik tersebut, namun penulis akan berfokus pada upaya de-eskalasi Rusia dan terhadap konflik di Suriah. Di dalam jurnal digunakan metode kualitatif dan kuantitatif, sedangkan penulis hanya menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji tesis ini. Media digunakan sebagai sumber sekunder, bukan sebagai obyek penelitian di dalam tesis.

Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights: Evidence from Libya, Bahrain and Syria⁶⁶

Dalam papernya, Nuruzzaman menginvestigasi tentang intervensi militer luar negeri terhadap tiga negara, yakni Libya, Bahrain, dan Suriah. Penelitian ini melihat kepada pro dan kontra terhadap intervensi militer dengan studi kasus “Arab Spring” dimana di dalam tulisannya, Nuruzzaman secara tegas menentang intervensi militer yang dinilai menurunkan penegakan hak asasi manusia terhadap negara target intervensi. Hasil penelitian mendukung temuan *anti-intervention camp of scholars* yang menyatakan bahwa intervensi militer adalah upaya yang berbahaya dan berantakan, serta dalam prosesnya terjadi pelanggaran hak asasi di Bahrain, Libya dan Suriah. Jurnal menyinggung bahwa intervensi di Suriah, baik oleh Rusia maupun AS, dijalankan dengan niat kepentingan nasional, bukan hak asasi manusia.

Di dalam tesis ini kajian tentang intervensi dilakukan secara tidak berpihak dan berfokus pada upaya de-eskalasi Rusia terhadap konflik Suriah. Penulis hanya meneliti tentang satu negara, yakni Suriah, dan berfokus pada implikasi strategi intervensi terhadap konflik Suriah. Penulis tidak pada posisi pro maupun kontra

⁶⁶ Mohammed Nuruzzaman “Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights: Evidence from Libya, Bahrain and Syria” Canadian Journal of Political Science, Vol. 48(03), 531-552, 2015.

dalam proses penulisan tesis ini. Tesis tidak berfokus pada pelanggaran hak asasi, tetapi eskalasi / de-eskalasi konflik tersebut.

China, Russia, and the Failure of the Responsibility to Protect in Syria: does the Fear of Regime Change offer a Serviceable Explanation?⁶⁷

Jurnal yang ditulis oleh Janik membahas mengenai motivasi Rusia dan Cina dalam menggunakan hak vetonya untuk menentang tiga resolusi Dewan Keamanan. Argumen yang digunakan di dalam tindakannya adalah untuk menghindari kejadian yang sama di Libya terulang lagi dan Kedua negara tersebut menghindari adanya menyalahgunaan kepentingan ekonomi dalam intervensi. Disebutkan bahwa Rusia menggunakan hak vetonya karena kedekatannya dengan rezim Assad dan berdampak pada *distrust* antara Libya dengan Rusia karena dinilai terikat dengan sekutunya serta takut pada pergantian rezim di Suriah yang dapat berpengaruh terhadap kedekatan kedua negara tersebut.

Disebutkan faktor-faktor pendukung Rusia dan Cina dalam mendukung status quo, yakni sistem pemerintahan domestik dan ancaman internal yang mereka hadapi sendiri. R2P adalah pengecualian, bukan sebuah aturan, sehingga hanya dilakukan jika kualifikasinya terpenuhi. R2P seharusnya menjadi petunjuk bagi Dewan Keamanan dalam pertimbangannya memproduksi resolusi, bukan sebagai konsesus penjamin masuknya asing kedalam negara tersebut. Dalam tesis ini penulis hanya membahas intervensi Rusia dan berfokus pada upaya de-eskalasi Rusia terhadap konflik Suriah.

Learning from Libya, Acting in Syria⁶⁸

Buckley dalam jurnalnya menjelaskan tentang alternatif tindakan yang dapat dilakukan terhadap konflik di Suriah dan konsekuensi pada setiap pendekatan. Penelitian dilakukan dengan melakukan komparasi dengan respon internasional

⁶⁷ Ralph Janik, "China, Russia, and the Failure of the Responsibility to Protect in Syria: Does the Fear of Regime Change offer a Serviceable Explanation?" *Studia UBB. Europea*, Vol. LVII(I), 63-88, 2013.

⁶⁸ Caitlin Aluce Buckley, "Learning from Libya, Acting in Syria" *Journal of Strategic Security*, Vol. 5(2), 81-104, 2012.

terhadap konflik di Libya. Pendekatan yang dinilai paling efektif adalah pemberian sanksi yang akan berpengaruh terhadap kelas pedagang Sunni dan melemahkan kekuasaan Assad, selanjutnya upaya gencatan senjata melalui dialog dimana tujuan akhirnya adalah mengakhiri konflik dan mengganti pemimpin negara. Internasional harus terlibat dalam pemilihan pemimpin Suriah baru, dimana Assad digulingkan karena kejahatan melawan kemanusiaan dan negara-negara barat harus mengerahkan peacekeepers untuk mentransformasi kekuasaan di Suriah.

Meskipun tesis ini membahas mengenai peranan internasional dalam konflik di Suriah, tesis ini tidak dalam sudut pandang pro maupun kontra Assad karena penulis hanya menjadikan Assad sebagai aktor yang mengesklasi / de-eskalasi konflik. Penulis tidak memberikan saran *das sain* terhadap komunitas internasional, melainkan menganalisis peranan Rusia dalam perang di negara tersebut. Karena fokus penelitian adalah kebijakan Rusia, maka peranan negara-negara asing tidak dilibatkan di dalam penelitian tesis ini.

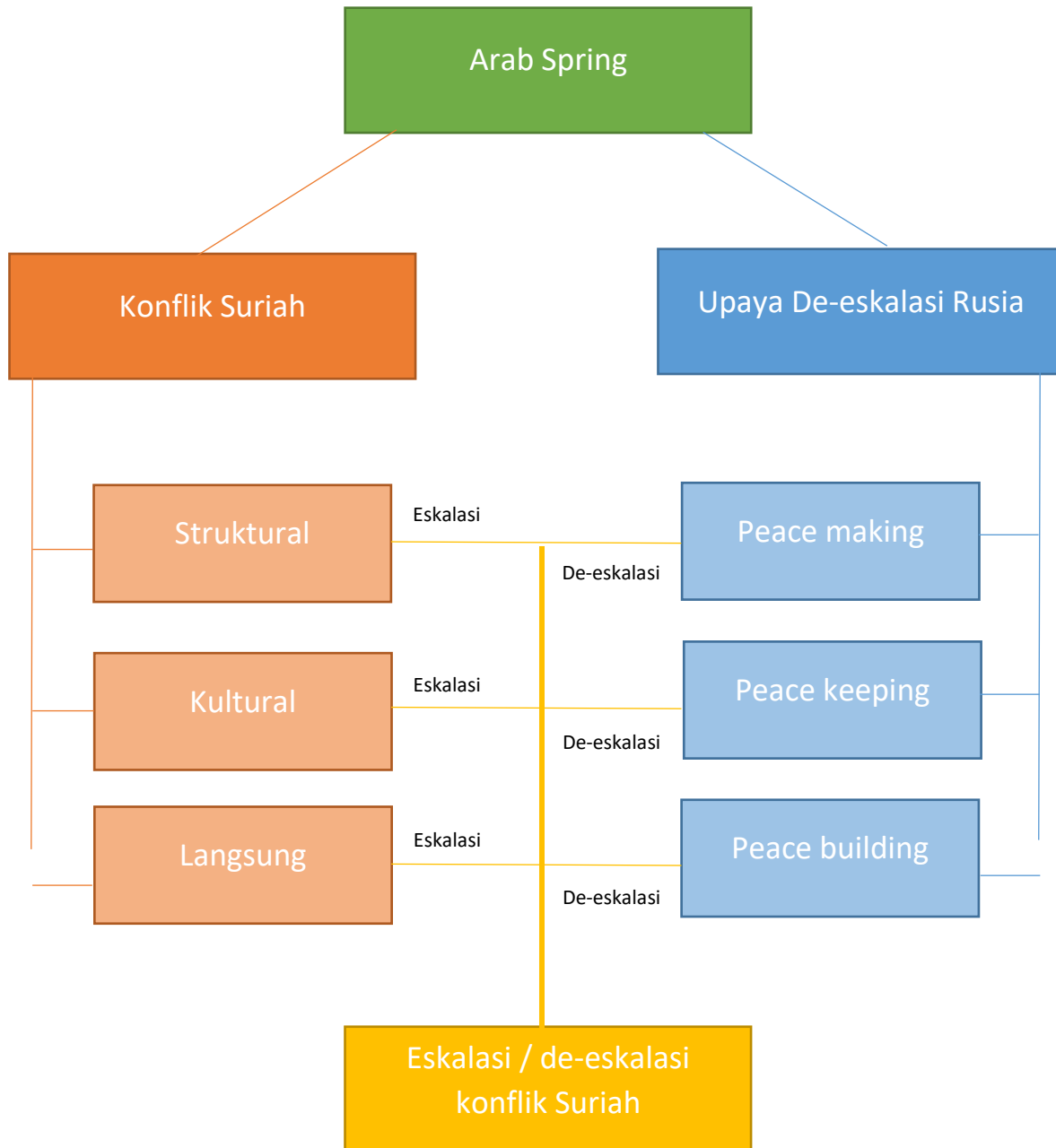
Beijing and Moscow Balk at “Interference”⁶⁹

Menon menulis tentang upaya Rusia dan Cina dalam menggagalkan upaya-upaya intervensi berdasarkan Bab I Piagam PBB yang berisi (i) kedaulatan yang sama bagi seluruh anggota, (vii) melarang intervensi terhadap hal-hal di dalam yurisdiksi domestik, dan Resolusi 36/103 Majelis Umum PBB yang menolak negara-negara baik sendiri maupun bersama-sama untuk mengintervensi dengan alasan apapun dan untuk melengserkan atau mengubah sistem politik negara lain atau menyebabkan ketidakstabilan terhadap negara lain. Kedua negara tersebut menentang unipolaritas yang terjadi di beberapa intervensi seperti Iraq dan Kosovo. Kedua negara tersebut juga berpendapat bahwa permasalahan Suriah merupakan isu domestik dan tidak ada sebuah badanpun, termasuk PBB yang berhak melengserkan kekuasaan Assad.

⁶⁹ Rajan Menon, “Beijing and Moscow Balk at “Interference”, *Current History*, Vol. 111(748), 310, 2012.

Sementara jurnal ini berfokus pada posisi Cina dan Rusia terhadap intervensi, tesis ini akan secara lebih luas memasukan hal tersebut sebagai salah satu faktor pendukung intervensi Rusia di Suriah. Tesis tidak akan secara spesifik membahas tentang kebijakan Cina, tetapi hanya akan menjadi aktor yang mengeskalasi / de-eskalasi konflik terkait kedekatannya dengan Rusia. Tesis tidak akan secara spesifik membahas legalitas R2P, melainkan dampak dari upaya tersebut terhadap konflik Suriah.

1.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1.9 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian dilaksanakan di Jakarta, secara spesifik bertempat di Kedutaan Besar atau Atase Pertahanan Rusia di RI, maupun perwakilan diplomatik RI di Rusia. Selain itu, kementerian/lembaga yang diteliti antara lain adalah Kementerian Luar Negeri, khususnya pada Subdirektorat Eropa III untuk meneliti keterlibatan Rusia serta Subdirektorat Timur Tengah untuk meneliti peran konflik di Suriah. Penelitian juga akan dilakukan di Kementerian Pertahanan khususnya pada Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional, serta badan intelijen yakni Deputi 1 BIN untuk secara lebih dalam menggali data terkait pertanyaan penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lokus penelitian tersebut sangat relevan dengan topik yang diteliti sehingga data yang akan diambil menjadi sangat valid untuk diolah.

1.9.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan ke tempat penelitian yaitu pada bulan September – Desember 2018.

Tabel 3.1: Tabel Waktu Penelitian

No	Kegiatan Utama	2018						2019				
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	Penyiapan draft proposal											
2	Perbaikan draft proposal (Proses bimbingan)											
4	Sidang ujian proposal											
5	Perbaikan final proposal											
6	Pengumpulan dan pengambilan data											
7	Penyusunan tesis											
8	Ujian tesis											
9	Perbaikan tesis											
10	Wisuda											

1.10 Subyek dan Sampel Penelitian

1.10.1 Subyek Penelitian

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi untuk riset yang dilakukannya.⁷⁰ Terdapat tiga level dalam subyek penelitian, yaitu:⁷¹ (1) Mikro yang merupakan subyek penelitian terkecil, responden hanya berupa individu. (2) Meso adalah level subyek penelitian dengan jumlah lebih banyak, yakni kelompok. (3) Makro merupakan level subyek penelitian dengan jumlah yang banyak, seperti masyarakat maupun komunitas luas.

⁷⁰ Anonim, "Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya", dalam <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>, diakses pada 24 Agustus 2018

⁷¹ *Ibid.*

Subyek penelitian dalam tesis ini adalah level mikro. Penulis menjadikan individu sebagai sampel yang dianggap cukup memapani sebagai perwakilan sisi pemerintahan maupun akademis. Adapun subyek penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Kedutaan Besar atau Atase Pertahanan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia untuk Indonesia. Penulis memilih subyek tersebut karena relevansinya dengan topik. Dengan meneliti subyek, maka peneliti akan mendapatkan data kunci yang kemudian akan diolah dalam analisis data. Pihak perwakilan diplomatis Rusia dapat memberikan penjelasan mengenai perannya dalam de-eskalasi konflik Suriah.
2. Atase Pertahanan RI untuk Rusia, dimana dinilai memiliki kompetensi keabsahan data terkait dengan pertanyaan penelitian. Pihak Athan dapat memberikan data mengenai keterlibatan Rusia dan dampaknya pada de-eskalasi konflik di Suriah.
3. Akademisi. Peneliti akan menggali data tentang keterlibatan Rusia dan implikasinya terhadap konflik Rusia dari sisi akademisi sebagai pengamat isu internasional. Penulis akan meneliti ahli-ahli hubungan internasional yang memahami konflik di timur tengah.
4. Media. Peneliti akan menggali data mengenai perspektif media terkait dengan penelitian.

1.10.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang diteliti adalah faktor pendorong Rusia dalam menjalankan strategi dukungannya terhadap Suriah untuk mengetahui tujuan dari misi tersebut, dan bagaimana peran Rusia berdampak pada eskalasi / deeskalasi konflik di Suriah. Peneliti juga akan meneliti sudut pandang Suriah terhadap peranan Rusia di dalam konflik tersebut, serta pandangan para ahli terhadap keterlibatan tersebut yang telah lebih dari 3 tahun dilaksanakan dan berdampak besar dalam pemetaan konflik Suriah.

1.11 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian, dimana dalam proses pengumpulannya melibatkan kontak atau komunikasi langsung antara peneliti dan informan.⁷² Peneliti memperoleh data primer dengan cara wawancara kualitatif, yaitu dengan *face-to-face interview*, melalui telepon ataupun surat elektronik, ataupun terlibat dalam *group interview*. Wawancara juga dilakukan dengan mempedomani pedoman wawancara yang telah disusun yang bersifat terbuka, sehinggalah informan bisa menyampaikan jawaban secara bebas atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tanpa terikat pada pilihan jawaban yang tersedia.⁷³

Sementara data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh tidak melalui tangan pertama, melainkan tangan kedua, ketiga atau seterusnya.⁷⁴ Sebagai data yang membantu untuk memperoleh informasi diperoleh dari studi pustaka, literatur terkait, jurnal, internet berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

1.12 Pemeriksaan Keabsahan data

Triangulasi data digunakan untuk menyelaraskan data-data yang di dapat dari berbagai sumber dengan mengkombinasikan garis-garis metode dengan sudut pandang yang berbeda agar peneliti memiliki gambaran substantif realitas yang lebih baik; larik yang lebih kaya dan lengkap terhadap simbol-simbol dan konsep teoritis; dan verifikasi terhadap elemen-elemen tersebut. Pertemuan antara garis-garis pandangan terhadap obyek penelitian yang kemudian bertemu *disebut triangle error*. Maka dilakukanlah triangulasi terhadap:⁷⁵

⁷²Anonim, "Data Primer dan Data Sekunder", dalam <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>, diakses pada 23 Agustus 2018.

⁷³ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th Edition, (California: SAGE Publications), hlm. 19

⁷⁴ *Loc. Cit.*

⁷⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung : Alfabeta, 2007)

1. Triangulasi sumber

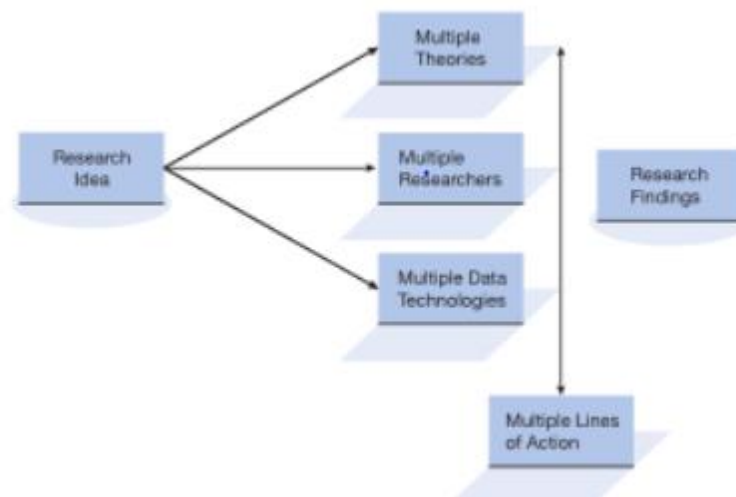
Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

2. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya



Gambar 3.1 Multiple Lines of Action in Triangulation
Sumber: Creswell (2018)

1.13 Teknik Analisa Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada quality dimana mengacu pada apa, bagaimana, dimana, dan mengapa sebuah fenomena dapat terjadi, tentang esensi dan suasananya.⁷⁶ Maka penelitiannya mengacu pada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan analisis sebelum masuk ke lapangan, yang kemudian dikomparasi dengan hasil analisa selama di lapangan dengan model Miles dan Huberman. Analisis berlaku terus-menerus secara interaktif hingga proses selesai. Proses analisa yang dilakukan dalam model ini adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting (data reduction), kemudian disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan penyajian data (data display), dan dari sana akan ditarik kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi dari gambaran sebuah obyek penelitian yang sebelumnya gelap menjadi jelas (conclusion drawing/verification).⁷⁷

Reduksi data secara eksplisit merupakan proses memilah, menetapkan fokus, menyederhanakan, menyusun abstrak, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan maupun transkrip.⁷⁸ Proses ini terjadi secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, dan pada masa sebelum penelitian, peneliti sudah mengantisipasi reduksi data dengan menentukan kerangka pemikiran, pertanyaan penelitian, dan teknik pengumpulan data yang dipilih. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, karena pemilahan dan pemilihan data pemilihan analitik dari peneliti.⁷⁹ Penyajian data merupakan pengorganisasian dan pemadatan dari sekumpulan informasi yang ada untuk kemudian diproses dalam kesimpulan. Dengan melihat penyajian data, peneliti menjadi lebih mudah mengerti mengenai permasalahan penelitian dan melakukan tindakan penelitian yang tepat dengan

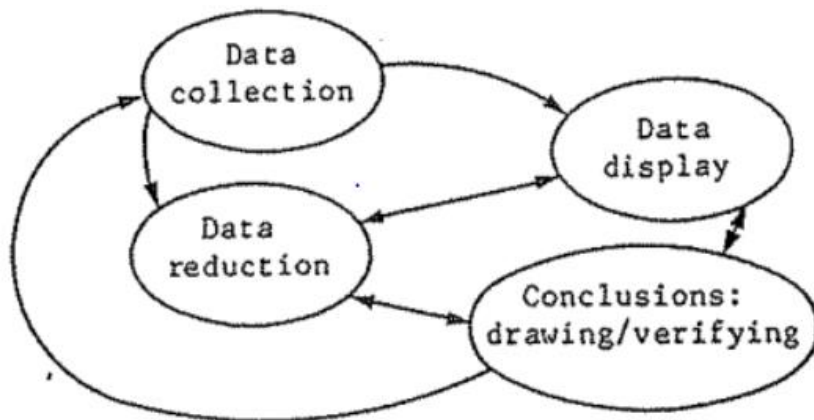
⁷⁶ Bruce L. Berg dan Howard Lune, *Qualitative Research Methods for the Social Methods*. (Boston: Pearson, 2017).

⁷⁷ Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. ALFABETA).

⁷⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), hlm 10.

⁷⁹ Ibid.

menggunakan kajian yang memudahkan seperti matriks, grafik, diagram, dan *network*.⁸⁰ Sama seperti reduksi data, penyajian data merupakan bagian dari analisis. Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana prosesnya tidak akan selesai hingga akhir dari pengumpulan data. Analisis atas data kemudian diverifikasi menjadi kesimpulan.⁸¹



Gambar 3.2 Components of Data Analysis: Interactive Model

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 11

⁸¹ *Ibid*.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

2.1 GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1.1 Latar Belakang Hubungan Rusia-Suriah

Hubungan antara Rusia dengan Suriah sudah terjadi sejak Perang Dingin dengan aliansi yang terbentuk di dalam Pakta Warsawa, dimana Hafez al-Assad menerima bantuan dan pelatihan militer dari Soviet.⁸² Suriah terbukti loyalitasnya kepada kubu kiri dibandingkan Mesir yang merapatkan diri kepada Amerika setelah kekalahan melawan Israel sehingga Suriah menjadi sekutu utama Soviet di Timur Tengah.⁸³ Soviet sejak tahun 1955 hingga akhir 1976 telah menghabiskan 2.5 triliun dolar untuk bantuan militernya kepada Suriah untuk memperkuat lingkungan strategisnya di Timur Tengah.⁸⁴

Namun hubungan antara kedua negara mengalami masa fluktuatif dikarenakan situasi Suriah yang tidak stabil. Hal yang terjadi di dalam internal Partai Ba'ath adalah karena tujuan besarnya dalam menyatukan negara- negara Arab, terdapat perebutan kekuasaan yang kuat sehingga terjadi kudeta berkali-kali dalam presidensial Suriah. Dengan pengalaman Soviet menjadi loyalis terhadap suatu pemimpin yang karismatik seperti Soekarno dari Indonesia dan Nkrumah dari Ghana, pengaruhnya sering kali hilang seiring tergesernya pemimpin-pemimpin tersebut.⁸⁵ Soviet berusaha untuk mendekati sebuah Partai Ba'ath dan Partai Komunis Suriah agar pengaruhnya tetap berlangsung lebih lama, namun ketegangan yang terjadi di dalam internal partai membuat hubungan tersebut

⁸² Dimitri Trenin, "Why Moscow Wants to Halt the Arab Spring", *Foreign Affairs*, 2012, dalam <https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2012-02-05/russias-line-sand-syria>.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ CIA, "Relations Between Syria and the USSR", Memorandum OCI No. 0507/76, 1976, hlm. 3-4.

⁸⁵ CIA, "Soviet Relations with the Baathists in Iraq and Syria", CIA Special Report: Weekly Review, 1969, hlm. 1.

memiliki banyak masalah bagi Soviet, termasuk terpecahnya Partai Ba'ath menjadi tiga fraksi; yakni pro-Soviet, pro-Cina, dan fraksi militan.

Meskipun Soviet telah memberikan bantuan kepada Suriah namun pengaruhnya tidak mampu untuk mengubah kebijakan-kebijakan Partai Ba'ath yang tidak sesuai dengan kepentingannya.⁸⁶ Disertai dengan kompleksitas hubungan antar negara-negara Arab, Soviet semakin sulit untuk mengendalikan Suriah dan regional Timur Tengah. Namun Hafez al-Assad menunjukkan pentingnya hubungannya dengan Soviet dengan menjadikannya negara pertama yang dikunjungi setelah kemenangannya dalam kudeta kepemimpinan Suriah.⁸⁷ Dua tujuan utama Soviet dalam bantuannya terhadap Suriah adalah: (1) menggunakan Suriah sebagai anti-imperialis dan anti-barat serta menyebarkan perilaku tersebut di kawasan Timur Tengah dengan tujuan mengalahkan blok barat di kawasan; (2) Kepentingan Soviet untuk menjaga keseimbangan senjata nuklir dari pengaruh Amerika di Mediterania Timur.⁸⁸ Pada kekuasaan Hafez al-Assad lah Soviet mendapatkan kesempatan untuk membangun pangkalan militer di kota Tartus dan pangkalan angkatan udara di Tias.⁸⁹

Hubungan keduanya yang sempat menurun kembali intensitasnya pada saat Putin menduduki kepemimpinan Rusia dan Bashar al-Assad di Suriah. Hal-hal yang mendorong Rusia untuk kembali mendekati diri dengan Suriah adalah: (1) Suriah kaya dengan sumber minyak dan gas dengan ambisi kerjasama keduanya dapat menjadi polar sumber energy dunia; (2) Lokasi yang yang strategis diantara jalur dagang Eropa dan Asia; (3) Radikalisme yang terjadi di Suriah secara kedekatan geografis dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Rusia; (4) Kekhawatiran Rusia dengan peranan Amerika di Timur Tengah, terutama setelah menetapkan

⁸⁶ *Ibid*, Hlm. 3.

⁸⁷ *Ibid*, Hlm. 5.

⁸⁸ Elvin Aghayev dan Fili Katman, "Historical Background and the Present State of the Russian-Syrian Relations", *European Researcher*, Vol. (35) No. 11-3, 2012, hlm.2.

⁸⁹ *Ibid*, Hlm. 3.

negara-negara “*axis of evil*” meliputi Suriah, Iraq, dan Korea Utara; (5) Kepentingan ekonomi Rusia di Timur Tengah meliputi energi dan ekspor senjata.⁹⁰

Pada Perang Sipil Suriah 2011, Rusia dengan bantuan pasukan udara dan darat bersama-sama dengan pasukan pemerintah turut campur dalam perang tersebut untuk meredam serangan dari pemberontak dan kelompok teror untuk menguasai Suriah. Meskipun Rusia dinilai oleh banyak pakar Hubungan Internasional dan Politik mendukung rezim Assad, namun pihak Rusia menyatakan bahwa misinya adalah untuk menghentikan terorisme. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Republik Indonesia, H.E. Ludmila Vorobieva:

*“ Why we are in Syria is not because we love al-Assad, not because we want to support him, of course he is the legitimate elected leader of the country ... The reason why Russia is in Syria because we want to wipe out the terrorists, we suffered the war from terrorist attacks, like Indonesia ... we support the effort of Syrian Government to fight terrorists ... ”*⁹¹

Maka pihak Rusia dengan legitimasinya menjadikan dukungannya bukanlah untuk rezim yang berkuasa namun untuk membantu upaya pemerintah dalam memberantas terorisme, yang jika dibiarkan dapat mempengaruhi pertahanan dan keamanan Rusia. Hal ini merupakan salah satu dari empat poin alasan kedekatan kembali Putin terhadap Suriah yang disebutkan di dalam jurnal Aghayev dan Katman. Kekhawatiran Putin terhadap bangkitnya ISIS memungkinkan kelompok teror tersebut untuk menguasai Damaskus dapat mempengaruhi 14% populasi muslimnya untuk menjadi jihadis.⁹²

⁹⁰ *Ibid*, Hlm. 3.

⁹¹ Wawancara dengan Duta Besar Rusia untuk RI H.E. Ludmila Vorobieva pada Conference on Indonesian Foreign Policy di Kota Kasablanka, pada 20 Oktober 2018.

⁹² Christopher Phillips, *The Battle For Syria: International Rivalry in the New Middle East*, (New Haven dan London: Yale University Press, 2016), hlm. 220.

2.1.2 Gambaran Umum Negara Suriah

Republik Arab Suriah merupakan sebuah negara di Timur Tengah Asia yang berbatasan langsung dengan Laut Mediteranian dan Lebanon di sebelah Barat, Turki di sebelah Utara, Iraq di sebelah Timur, Jordan di sebelah Selatan, dan Israel di sebelah Barat Daya.⁹³ Dengan total luas wilayah 185.180 km² penggunaan tanah sebagian besar dilakukan untuk kegiatan agrikultural, yakni 75.8% yang dilakukan sebagian besar di wilayah Al-Jazira di Timur Laut dan Hawran di Selatan negara Suriah dengan sumber air Sungai Eufrat.

Populasi Suriah mencapai lebih dari 17 juta jiwa pada tahun 2014 diluar 6 juta penduduk yang mengungsi di negara lain. Komposisi penduduk di negara tersebut di dominasi oleh etnis asli, atau yang disebut masyarakat *Leventine* dan kelompok-kelompok suku lain yang tinggal disana yakni sekitar 600.000 masyarakat Palestina, 400.000 etnis *Assyrian*, juga kelompok Kurdi dengan persentase sekitar 10% dari jumlah penduduk, serta etnis Turko yaitu sekitar 3.5 juta jiwa, sisanya etnis *Circassian*, Armenia, dan sebagian kecil etnis Bosnia, Georgia, Yunani, Pashtun, Rusia, dan Yahudi.⁹⁴ Terdapat tiga agama utama di Suriah, dengan Islam Sunni meliputi 74%, Alawit yang merupakan bagian dari Syiah mencapai 10%, Kristen sekitar 10% dan sebagian kecil agama Yahudi.⁹⁵ Meskipun Alawit merupakan sekte minoritas namun mereka memegang posisi-posisi kunci di pemerintahan, termasuk Presiden Bashar al-Assad. Kota-kota besar di Suriah adalah Damaskus sebagai ibu kota, dan kota metropolitan seperti Aleppo, Homs sebagai pusat industri, Latika sebagai pusat pelabuhan, dan Raqqa sebagai kota subur pusat pertanian. Kota-kota tersebut pada suatu waktu pernah dikuasai oleh kelompok-kelompok pemberontak dan teroris seperti ISIS dan Jabhat Al-Nusra.

⁹³ CIA, "The World Fact Book: SYRIA", dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>, diakses pada 31 Oktober 2018.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Suriah sebagai salah satu negara dengan peradaban tertua memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukan negaranya. Suriah merasakan pergantian dinasti dan kekuasaan mulai dari kerajaan Persia, kekuasaan Aleksander Agung, kekhalifahan Umayyah, dan kesultanan Ottoman hingga pada Perang Dunia I Suriah dikuasai oleh kerajaan Perancis hingga proklamasi kemerdekaan pada tahun 1941.⁹⁶ Pasca kemerdekaan, Suriah memosisikan diri sebagai negara anti zionis bersama-sama dengan negara-negara Arab lainnya berperang melawan Israel yang dimenangkan oleh Israel. Situasi dalam negeri Suriah pasca Perang Dunia tidak stabil karena perebutan kekuasaan, baik oleh militer maupun Partai Sosialis Ba'ath. Karena hal tersebut maka Suriah sulit untuk berkembang akibatnya negara tersebut tidak mampu membendung dampak dari Krisis Suez⁹⁷ dan menandatangani perjanjian dengan Uni Soviet untuk meningkatkan kapasitas militernya. Pada masa tersebut sempat terjadi menggabungkan negara Mesir – Suriah menjadi *United Arab Union* yang bertahan hanya dalam kurun waktu tiga tahun.

Konflik terus berkembang, baik kekalahan terhadap Israel dalam Perang 6 Hari, maupun persaingan internal antara kubu militer dan Ba'ath. Pada tahun 1970 Hafez al-Assad berhasil dalam kudeta dan merebut kekuasaan serta menciptakan struktur organisasi yang memperkuat kekuasaan Ba'ath, mengganti konsitusi baru dan mensekulerisasi negara Suriah. Kekuasaan dilanjutkan oleh anaknya, Bashar al-Assad pada tahun 2000 dimana pada awal pemerintahannya Assad membebaskan masyarakat untuk menyuarakan opininya dalam forum-forum politik. Hal ini dikenal sebagai “Musim Semi Damaskus” dimana ada harapan baru rakyat Suriah terhadap reformasi pemerintahan. Assad juga memerintahkan untuk

⁹⁶ Abdul-Rahman Hamide, *et al*, “History of Syria”, dalam <https://www.britannica.com/topic/history-of-Syria>, Diakses pada 16 November 2018.

⁹⁷ Krisis Suez merupakan perang antara Mesir melawan Israel yang di dukung oleh Perancis dan Inggris. Israel menginvasi wilayah Sinai yang merupakan bagian dari teritorial Mesir. Di dalam wilayah tersebut terdapat kanal Suez yang menjembatani Laut Mediterania dan Laur Merah yang menghubungkan tiga benua sebagai akses perdagangan. Peperangan ini dimenangkan oleh Mesir, berdampak pada Inggris dan Perancis menderita kemunduran dalam pengaruh global pada masa perang dingin.

membebasikan 600 tahanan politik pada tahun 2000, namun pada tahun 2001 Assad mulai menahan aktivis-aktivis pro-reformasi.⁹⁸

Pada tahun 2002 hubungan Suriah dan AS semakin memburuk dengan tuduhan AS terhadap kepemilikan senjata kimia, menjadikan Suriah salah satu dari “Poros Setan”⁹⁹ karena kedekatannya dengan kelompok Hamas, Pergerakan Jihad Islamik di Palestina, dan Hezbollah. Serangkaian keterlibatan Suriah pada konflik di sekitarnya mengakibatkan pemberian sanksi Amerika terhadap Suriah karena keberpihakannya yang bertentangan dengan kepentingan AS. Pada masa pemerintahannya Assad harus berhadapan dengan berbagai protes, yakni protes masyarakat Kurdi¹⁰⁰, dan dari pihak-pihak oposisi. Pada saat yang bersamaan pemerintah juga memperketat akses informasi dengan sensor internet. Hubungan dengan Israel tetap menjadi oposisi di berbagai ketegangan dengan negara lain, serta hubungan dengan AS berakhir pada 2010 dengan ditariknya diplomat dari negara tersebut dengan tuduhan Suriah mendukung kelompok-kelompok teroris dan kepemilikan senjata pemusnah masal.

2.2 Hasil Penelitian

2.2.1 Hasil Penelitian Kekerasan di Suriah

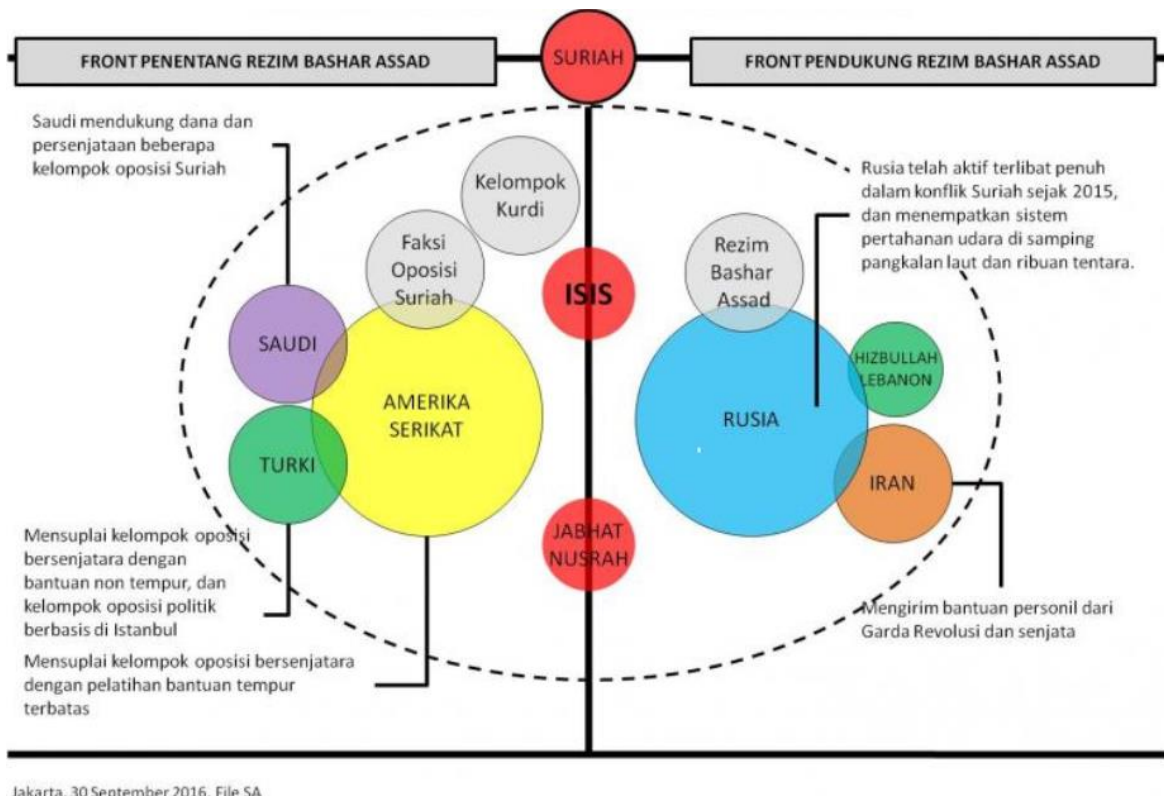
Konflik yang terjadi di Suriah merupakan eskalasi dari konflik laten yang sudah terjadi sejak lama yang memuncak pada peristiwa Musim Semi Arab yang

⁹⁸ Anonim, “Syrian Arab Republic: Syria: arrest of eight political opposition party members and activists” dalam <http://www.omct.org/urgent-campaigns/urgent-interventions/syrian-arab-republic/2001/09/d15436/>, diakses pada 16 November 2018.

⁹⁹ Poros Setan atau *Axis of Evil* merupakan istilah yang digunakan Presiden Amerika Serikat George W. Bush, Jr merujuk kepada negara-negara yang dimusuhi oleh Amerika karena dianggap memiliki intensi yang jahat dan mengancam kepentingan Amerika. Negara-negara yang termasuk di dalam Poros Setan adalah Korea Utara, Iran, Iraq, dan Suriah. Hal tersebut berkaitan dengan afiliasi negara-negara tersebut dengan kelompok teroris maupun kepemilikan senjata kimia. Sikap Bush yang memusuhi negara-negara tersebut merupakan dampak dari peristiwa 9/11 penyerangan terhadap menara kembar WTC.

¹⁰⁰ Masyarakat Kurdistan merupakan kelompok masyarakat asli Mesopotamia yang menempati sebagian wilayah Turki, Uraq, Iran, Suriah dan Armenia. Pada awal abad ke-20 mereka berkeinginan untuk mendirikan negara Kurdistan, dengan latar belakang tersebut, kelompok Kurdistan sering kali menjadi oposisi pemerintahan negara-negara pusat, termasuk di Suriah.

terjadi yang melanda timur tengah sejak akhir tahun 2010. Aksi protes anti pemerintah tersebut berkembang menjadi perang sipil pada tahun 2011 yang berlangsung hingga saat ini. Cepatnya perkembangan kelompok pemberontak dan teroris menyebabkan Rusia dan Amerika turut campur dalam konflik tersebut. Penulis mengelompokan kekerasan di Suriah menjadi tiga kelompok, kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.



Gambar 4.1 Peta Konflik di Suriah

2.2.1.1 Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung adalah kekerasan yang terlihat antar pihak-pihak yang bertikai, dimana di dalam konflik Suriah hal yang tergolong dalam kekerasan langsung adalah kerusuhan, perang sipil dan aksi teror yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan besar pada negara. Selain itu kegiatan fisik militer negara Rusia bersama dengan militer Suriah serta intervensi Amerika Serikat bersama dengan oposisi juga merupakan kekerasan langsung.

A. Kerusuhan sipil (Maret – Juli 2011)

Musim Semi Arab melanda Suriah, masyarakat sipil di kota Damaskus dan Aleppo menuntut reformasi demokratis dan pembebasan tahanan politis. Protes tersebut diresponi dengan penahanan enam orang demonstran.¹⁰¹ Kerusuhan semakin berlanjut dengan pembakaran kantor pusat partai Ba'ath dan gedung lainnya pada 20 Maret 2011 menyebabkan korban jiwa 7 orang polisi dan 15 demonstran. Pada bulan-bulan berikutnya protes semakin membesar dengan menuntut pergantian rezim di 20 kota mengakibatkan 1000 warga sipil serta 150 tentara dan polisi meninggal dunia serta penahanan mahasiswa dan aktifis.¹⁰²

B. Awal Pemberontakan Senjata (Juli 2011 – April 2012)

Terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak bersenjata melawan rezim otoritarian diawali dengan terbentuknya *Free Syrian Army* (FSA) yang bertujuan untuk mengganti Bashar al-Assad dari kursi kepresidenan Suriah beserta dengan jajarannya. Didirikan oleh para pemberontak dari angkatan militer Suriah, organisasi ini semakin terstruktur dan serangan-serangan yang dilakukan semakin efektif. Kelompok-kelompok lainnya juga terbetuk secara cepat, pada Juli 2011 pasukan pemerintah melakukan “Pembantaian Ramadhan” mengakibatkan korban jiwa setidaknya 142 orang dan ratusan luka-luka di kota Hama.¹⁰³ Akibatnya koalisi anti pemerintahan berbasis di Turki *Syrian National Council* terbentuk dengan tujuan untuk mengorganisir oposisi.

Sejak awal bulan Agustus 2011 pemerintah Suriah melancarkan operasi untuk menekan para demonstran di seluruh negeri. Puncaknya di pesisir pelabuhan kota Latakia pada 14 Agustus, pasukan Suriah memerangi para demonstran dengan

¹⁰¹ Anonim, “Mid-East unrest: Syrian protests in Damascus and Aleppo”, dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-12749674>, diakses pada 28 November 2018.

¹⁰² Anonim, “Armed residents put up resistance to Syrian army”, dalam <https://www.khaleejtimes.com/article/20110531/ARTICLE/305319890/1016>, diakses pada 28 November 2018.

¹⁰³ Anonim, “Syrian army kills at least 95 in Hama: activist”, dalam <https://www.dawn.com/news/648303/syrian-army-kills-at-least-95-in-hama-activist>, diakses pada 28 November 2018

menggunakan senjata-senjata berat seperti tank dan kapal angkatan laut.¹⁰⁴ Peristiwa tersebut menyebabkan tewasnya 26 masyarakat sipil, dimana menurut *Syrian Observatory for Human Rights* korban jiwa dan luka-luka disebabkan sebagian besar oleh serangan dengan senapan mesin. Menurut Deputi Politik PBB, sejak Maret hingga Agustus 2011 pemerintahan Assad telah membunuh sekiranya 2000 masyarakat sipil.¹⁰⁵ Pada September dan Oktober 2011, terjadi pertempuran Pertempuran Rastan, yakni pertempuran antara tentara Suriah dan FSA terjadi di Rastan, bagian utara dari kota Homs. Kemenangan diperoleh militer Suriah dengan tahanan politik sebanyak kurang lebih 2000 orang dan korban jiwa sebanyak 7 orang polisi dan tentara, dan 120 pemberontak dan masyarakat sipil.¹⁰⁶ Kekalahan FSA menyebabkan Kolonel Riad Asaad, pimpinan FSA, melarikan diri ke Turki dan diterima dengan tangan terbuka. Pertempuran oposisi dan pemerintah terjadi secara terus menerus pada masa ini.

C. Perang Sipil (May 2012-Desember 2013)

Pada tahap ini konflik berkembang menjadi perang sipil seutuhnya, hal ini ditandai dengan peristiwa Pembantaian Houla. Menurut kelompok pemberontak *Syrian National Council* terdapat korban jiwa sebanyak 110 orang termasuk diantaranya adalah anak-anak di dalam peristiwa tersebut. Di duga dilakukan oleh militer Suriah sebagai upaya memberantas gerakan anti pemerintah, Pasukan Shabiha¹⁰⁷ sebagai loyalis Assad juga dianggap terlibat dalam pembantaian.¹⁰⁸

¹⁰⁴ Khaled Y. Oweis, "Tank, navy attack on Syria's Latakia kills 26: witness", dalam <https://www.reuters.com/article/us-syria/tank-navy-attack-on-syrias-latakia-kills-26-witnesses-idUSTRE77DOLP20110814>, diakses pada 29 November 2018.

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Massem Mroue, "Syrian troops battle hundreds of renegade soldiers", dalam https://www.washingtonpost.com/world/syrian-troops-battle-hundreds-of-renegade-soldiers/2011/09/30/gIQAwbNObL_story.html?noredirect=on&utm_term=.cb72b2bf93a0, diakses pada 29 November 2018.

¹⁰⁷ Shabiha adalah masyarakat pro Assad yang kebanyakan adalah kelompok Alawi dan non-Sunni.

¹⁰⁸ Anonim, "Syrian activists condemn Houla 'massacre'", dalam <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/05/20125265258397885.html>, diakses pada 29 November 2018.

Bertantangan dengan hal tersebut, pihak Suriah menyatakan bahwa kelompok terorislah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan pasukan pemerintah bertindak untuk melindungi masyarakat dari serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa massa berkumpul di lokasi pembantaian dengan membawa persenjataan berat termasuk misil anti tank dan menciptakan kerusakan dengan membakar ladang-ladang pertanian dan rumah-rumah serta merusak rumah sakit nasional di Taldao.¹⁰⁹

Dalam suratnya kepada Sekretariat PBB, Menteri Luar Negeri Suriah menyatakan, *“The terrorists started the offensive at 2.00 pm on Friday, attacking the area from al-Rastan, Talbiseh and al-Qseir, savagely killing several families, including children, women and elders,”* selanjutnya juga dikatakan bahwa tidak ada tank memasuki area kejadian dan pasukan militer Suriah beroperasi dalam keadaan *self defense*. Dalam laporannya juga disertakan bahwa media menyebarkan kampanye yang tidak dapat dipercaya, bahwa wanita dan anak-anak dikumpulkan dalam suatu area dan dibunuh dalam serangan jarak dekat, tidak dibunuh menggunakan meriam militer seperti yang diberitakan, dengan bukti tidak ada debu yang menyelimuti jenazah sebagaimana seharusnya jika dieksekusi sedemikian rupa. Pemerintah menduga bahwa kelompok afiliasi al-Qaeda bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan serangan-serangan lainnya.

Presiden Assad menyatakan bahwa (hingga Maret 2012) jumlah korban jiwa mencapai 7000 jiwa yang disebabkan oleh pemberontakan. Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan bahwa pemerintah melakukan pemberantasan terhadap teroris, bukan melakukan penyiksaan terhadap masyarakatnya sendiri. Namun begitu, presiden menolak permintaan *International Committee of the Red Cross*

¹⁰⁹ Anonim, “Syria: Armed Terrorist Groups committed Taldao, al-Shoumarieh Massacres”, dalam <http://www.dp-news.com/en/detail.aspx?articleid=121906>, diakses pada 29 November 2018.

(ICRC) untuk menjalankan gencata senjata setiap hari selama dua jam mengirimkan bantuan kemanusiaan.¹¹⁰

Pada tanggal 12 Juni 2012, PBB menyatakan bahwa negara Suriah berada dalam keadaan perang sipil. Hal tersebut beriringan dengan berkembangnya perang di negara tersebut dan kegagalan upaya gencatan senjata. Pada Desember 2012 menurut pemerintah Amerika, Suriah menembaki pemberontak dengan misil balistik. Pada saat yang hampir bersamaan, kelompok pemberontak Jabhat al-Nusra berhasil menguasai pangkalan udara, amunisi, dan perlengkapan militer di Taftanaz provinsi Idlib. Meskipun dinyatakan sebagai kelompok teroris, Amerika mendukung aktifitas Nusra baik dalam persenjataan maupun pelatihan.¹¹¹

Angkatan bersenjata dibawah Partai Persatuan Demokratis¹¹² (PYD), *Kurdish Protection Unit* (YPG), beradu tempur dengan kelompok pemberontak FSA yang menyerang wilayah etnis minoritas tersebut. Pernyataan FSA bahwa PYD merupakan angkatan bersenjata yang memihak pada status quo pemerintahan Suriah dan mengabaikan upaya pendekatan tanpa kekerasan FSA. Sedangkan pernyataan dari *Kurdish Youth Movement* (TCK) bahwa keberhasilan FSA dalam mengambil alih pangkalan militer Taftanaz menambah kekuatan mereka dan berkeinginan untuk memperluas wilayah mereka hingga ke permukiman Kurdistan.

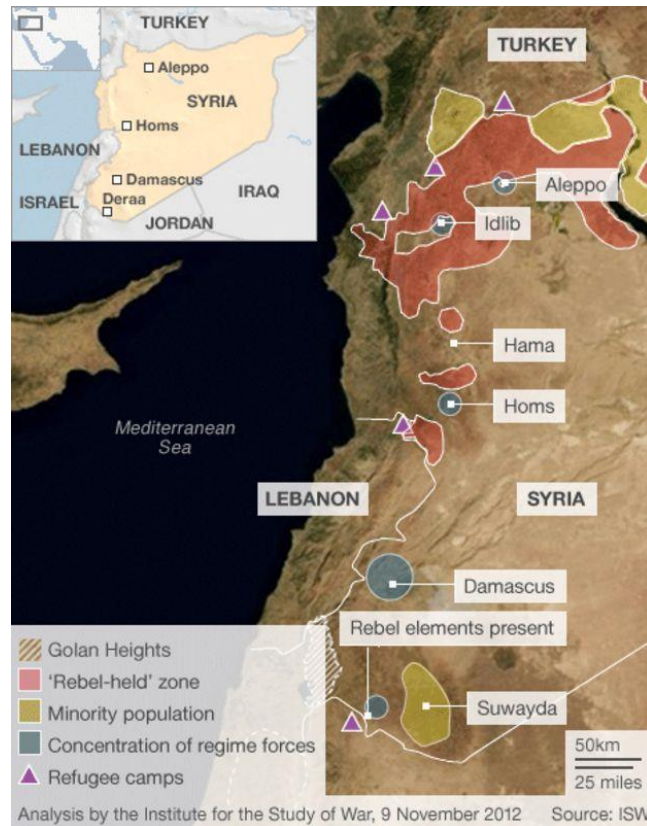
Pada Maret 2013, pemberontak berhasil merebut kota Raqqa, pasukan YPG yang semula diafiliasikan dengan pemerintah berhasil mengambil alih area kaya minyak di provinsi Hasakah. Pada awal April Negara Islam Iraq berhasil melebarkan pengaruhnya ke dalam negara Suriah dan mengubah namanya menjadi Negara

¹¹⁰ Alex Spillius dan David Blair, "Syria: Bashar al-Assad vows to crush 'foreign-backed terrorism' as army targets new cities", dalam <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9127057/Syria-Bashar-al-Assad-vows-to-crush-foreign-backed-terrorism-as-army-targets-new-cities.html>, diakses pada 29 November 2018.

¹¹¹ Anonim, "Syria rebels capture key Idlib airbase", dalam <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/01/2013111102729824698.html>, diakses pada 29 November 2018.

¹¹² *Democratic Union Party* adalah partai Kurdistan terbesar di Suriah yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Suriah. Namun pada tahun 2015 YPG disokong oleh Amerika untuk memberantas terorisme.

Islam Irak dan Suriah (ISIS) ¹¹³. Organisasi ini merupakan merger dari al-Qaeda di Irak dan kelompok al-Nusra di Suriah dimana keduanya memiliki satu tujuan, yakni mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah.¹¹⁴ ISIS kemudian menjadi target sasaran kelompok-kelompok pemberontak lainnya karena aksi terornya yang tidak hanya menyerang loyalis Assad, tetapi juga para pemberontak.



Gambar 4.2 Pemetaan pemberontakan di Suriah

Pasukan pro pemerintah bersama-sama dengan Heboallah¹¹⁵ kemudian menyerang kembali kota-kota yang sudah direbut pemberontak dan mengambil alih

¹¹³ Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) juga dikenal sebagai Islamic States of Iraq and the Levant (ISIL), Islamic State of Iraq and al-Sham, dan Daesh.

¹¹⁴ Anonim, "Al-Qaeda in Iraq confirms Syria's Nusra Front is part of its network", dalam <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/09/Al-Qaeda-in-Iraq-confirms-Syria-s-Nusra-Front-is-part-of-its-network.html>, diakses pada 30 November 2018.

¹¹⁵ Heboallah adalah partai politik dan angkatan bersenjata Islam Syiah yang berbasis di Lebanon.

kota Qusayr di dekat perbatasan dengan Lebanon pada April 2013.¹¹⁶ Menargetkan pangkalan militer Suriah, para kelompok pemberontak dan ISIS berkonfrontasi dengan FSA serta pemerintah untuk menaklukan pangkalan udara di Menagh. Pengepungan di pangkalan tersebut terjadi selama 10 bulan, dimana pada akhirnya pasukan pemerintah kalah melawan pemberontak dengan korban jiwa pada pertempuran akhir sebanyak 32 tentara dan 19 pemberontak.¹¹⁷ Pada Agustus 2013 terdapat serangan kimia melanda daerah Ghouta di daerah Damascus diikuti oleh serangan militer Suriah di area tersebut. Dari kejadian tersebut diduga pemerintah menggunakan senjata kimia untuk merebut kembali daerah tersebut hingga mendapat kecaman PBB.

Namun organisasi kemanusiaan *White Helmets* yang mengevakuasi korban akibat serangan kimia diduga memainkan peran untuk membuat video palsu mengenai penyerangan senjata kimia. Organisasi tersebut bukanlah organisasi netral, yang dapat dibayar untuk framing berita sebagaimana dibentuk oleh James Le Mesurier, mantan intelijen Inggris. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Jim Jatras, mantan diplomat dan politisi Amerika bahwa pemerintah Suriah tidak menggunakan senjata kimia pada serangan-serangannya.¹¹⁸ Meskipun begitu, diluar propaganda AS, pemerintah Suriah tetap diduga memiliki dan menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya.¹¹⁹

¹¹⁶ Anonim, "Syria army closes in on Qusayr near Lebanon", dalam <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2013/04/21/Syria-army-closes-in-on-Quasar-near-Lebanon-.html>, diakses pada 30 November 2018.

¹¹⁷ Ared Hretani, "Syrian rebels capture military airport near Turkey", dalam <https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-airport/syrian-rebels-capture-military-airport-near-turkey-idUSBRE97411J20130805>, diakses pada 30 November 2018.

¹¹⁸ RT America, "Russia: White Helmets Using Orphans to Fake Chemical Attack Video", Russia Today America [Siaran Televisi dalam Video Daring], dalam <https://www.youtube.com/watch?v=CV9eHuJz-WQ>, diakses pada 30 November 2018.

¹¹⁹ Wawancara dengan Atase Pertahanan Rusia untuk RI Kolonel Nikolay Nikolayuk di Kuningan City pada 22 Agustus 2018.



Gambar 4.3 anggota 'White Helmetts' swafoto dengan sertifikatnya

Pada akhir 2013, pasukan Suriah bersama dengan Hezbollah dan brigade al-Abas melancarkan serangan ke kota Damaskus dan Aleppo untuk mengambil alih kawasan yang sudah dikuasai pemberontak. Pada masa ini, kepala intelijen militer Suriah Mayor Jendral Jameh Jameh tewas ditangan pemberontak dalam operasinya di provinsi Deir Ezzor.¹²⁰ Serangkaian pertempuran antara pasukan pemerintah Suriah dan pemberontak untuk mengambil alih kota-kota terus terjadi hingga akhir 2013.

D. Pertempuran antar Kelompok Pemberontak

Perkembangan kekuatan kelompok-kelompok pemberontak menyebabkan terjadinya pertempuran diantara tubuh oposisi. Dengan penguasaan wilayah dan sumber daya, daya penghancur masing-masing fraksi menjadi semakin kuat, juga dengan kerusakan yang diderita negara Suriah. Persaingan akan dominasi di negara Suriah menjadikan pertempuran semakin intens, dimana sudah terefleksi

¹²⁰ Anonim, "Syrian military spy chief killed in battle", dalam <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/10/top-syrian-army-general-killed-battle-20131017182611866437.html>, diakses pada 30 November 2018.

sejak terbentuknya kelompok-kelompok ekstrimis pada tahun 2012 dengan ketegangan dan pertempuran yang sering kali terjadi.

1) Pertempuran antar kelompok ekstrimis Islam

Ketegangan antar kelompok pemberontak sudah terjadi sejak tahun 2012, seperti pada Juli 2012 terjadi pertempuran antara FSA dengan al-Qaeda dan pada tahun 2013 antara FSA dan al-Nusra yang terjadi selama beberapa kali, diantaranya pada Tell Abyad, Abu Azzam di Suriah dan Sanliurfa di Turki. Pertempuran antara ISIS dan kelompok oposisi bersenjata lainnya juga telah terjadi pada tahun 2013, diantaranya antara ISIS dan FSA pada kota al-Dana dan Jarabus, serta penyerangan dan penangkapan ISIS kepada *Nothern Storm Brigade* (anak Kelompok FSA) di kota Azaz. Namun intensitas tertinggi dalam pertempuran antar kelompok pemberontak terjadi pada tahun 2014.

Pada bagian selatan Suriah, khususnya di provinsi Daraa terjadi pengecaman oleh al-Nusra untuk melarang adanya kelompok yang bergabung dengan koalisi pemberontak baru "Front Selatan" dan menculik pimpinan FSA al-Nameh sebagai peringatan. Pada saat yang bersamaan, kepala organisasi Koalisi Nasional Suriah mengunjungi Amerika menyepakati "misi luar negeri" Amerika untuk memberantas al-Qaeda. Organisasi tersebut tidak mengakui al-Nusra sebagai koalisinya.¹²¹

Pada Oktober 2015, Front Selatan menyatakan bahwa kelompoknya berhasil menguasai "Bukit PBB" di provinsi Quneitra yang sebelumnya di klaim oleh al-Nusra sebagai kemenangannya. Kemudian dalam *tweet*-nya Front Selatan menegaskan penolakan terhadap koalisi dengan al-Nusra dengan alasan tidak memiliki visi yang sama terhadap kebebasan Suriah.

¹²¹ Abdulrahman al-Masri, "Tensions over Al-Qaeda efforts for influence in south Syria, dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20140512-tensions-over-al-qaeda-efforts-for-influence-in-south-syria/>, diakses pada 5 Desember 2015.



Gambar 4.4 Pernyataan penolakan Front Selatan terhadap FSA dalam *Twitter*

FSA kemudian membentuk koalisi baru dengan kelompok Jaysh al Fateh untuk menandingi Front Selatan untuk menguasai bagian selatan Suriah. Namun dengan kekuatan yang lebih besar, Front Selatan berhasil menguasai pangkalan militer Brigade 52 dari tangan tentara Suriah. Al-Nusra berkonflik di daerah lainnya, salah satunya adalah Idlib dengan FSA dan kelompok-kelompok lainnya.

Pertarungan antar kelompok juga terjadi di daerah Aleppo, dimana koalisi Jaysh al-Thuwar (dominasi FSA) bertempur dengan al-Nusra dan koalisi *Marea Operations Room* (dominasi FSA dan YPG lainnya). Pertempuran yang tidak diakui oleh YPG dan al-Nusra tersebut terjadi ditengah-tengah aksi militer udara Rusia di kawasan.¹²² Hal serupa terjadi di kawasan Aleppo antara koalisi *Syrian Democratic Forces* (dominasi YPG), koalisi *Army of Revolutionaries* (dominasi YPG), dan *Mare' Operations Room* (dominasi FSA). Pada bulan April – Mei 2016 terjadi pertempuran di Ghouta Timur antara al-Nusra, Jaysh al-Fustat dan *al-Rahman Legion* (afiliasi FSA) melawan penguasa wilayah Jayash al-Islam. Dalam kurun waktu tersebut lebih

¹²² Anonim, "FSA group battles Nusra amid Russia stikes", dalam <https://now.mmedia.me/lb/en/NewsReports/566293-fsa-group-battles-nusra-amid-russia-strikes>, diakses pada 5 Desember 2018.

dari 500 pemberontak dan puluhan warga sipil menjadi korban jiwa.¹²³ Pertarungan yang hampir sama terjadi setahun kemudian pada 2017, pertarungan antar pemberontak dihentikan pasukan Suriah untuk menguasai wilayah tersebut dengan bantuan serangan udara oleh Rusia.¹²⁴ Pertarungan tidak hanya terjadi antar kelompok, tetapi juga intra struktural seperti yang terjadi di perbatasan Turki antara FSA Turki dan Suriah.

2) Pertempuran antara koalisi oposisi melawan ISIS

Terjadi pertempuran besar selama bulan Januari – Maret 2014 antara ISIS dan kelompok-kelompok pemberontak lainnya. Selama bulan Januari, pertempuran dalam perebutan wilayah kekuasaan terjadi sangat intens dengan pergantian penguasa atas distrik dan pedesaan di Idlib, Aleppo, dan Raqqa. Kelompok-kelompok pemberontak mampu melakukan perlawanan dengan ISIS dengan membentuk koalisi pemberontak. Namun penguasaan tersebut tidak bertahan lama karena intensitas perang yang tinggi dan terjadi secara terus-menerus.

ISIS pada mulanya diterima baik oleh kelompok-kelompok pemberontak di daerah-daerah kekuasaannya. Namun dengan melakukan penyerangan terhadap oposisi tersebut, ISIS menjadi target sasaran yang harus dimusnahkan. Salah satu faktor terbesar yang menyebabkan perlawanan terhadap ISIS menjadi menguat adalah eksekusi Dr. Hussein Suleiman (Abu Rayyan) seorang pimpinan kelompok Ahrar al-Sham yang juga dihormati di kalangan oposisi. Dalam pernyataan persnya, kelompok pemberontak Koalisi Nasional Suriah cenderung mencurigai tindakan tersebut sebagai agenda ISIS dalam mendukung pemerintahan Assad.

Selanjutnya selama Januari 2014 pertarungan antara ISIS melawan koalisi pemberontak terjadi secara setiap harinya di berbagai daerah. Penyerangan

¹²³ Chris Tomson, "Rebels storm Misraba village as insurgent fighting engulf East Ghouta", dalam <https://www.almasdarnews.com/article/rebels-storm-misraba-village-insurgent-infighting-engulfs-damascus/>, diakses pada 8 Desember 2018.

terhadap markas ISIS maupun pemberontak dilakukan oleh kedua belah pihak, diikuti dengan perebutan pangkalan udara, penculikan dan eksekusi anggota, serta penguasaan daerah yang mengakibatkan ribuan korban jiwa selama satu bulan tersebut. ISIS mencapai kejayaannya dengan menguasai provinsi Raqqa dan beberapa daerah di Aleppo secara utuh setelah pertarungan berat melawan koalisi. Pada bulan Februari 2014 Al-Qaeda memutuskan afiliasinya terhadap ISIS dikarenakan tindakannya melawan sesama oposisi. Penyerangan dan benturan antara ISIS dan koalisi pemberontak tetap berlanjut, serta adanya ultimatum di kota Aleppo untuk ISIS agar bergabung dengan koalisi atau angkat kaki dan kembali ke Iraq. Pada pertengahan Februari terjadi pertarungan perebutan daerah kekuasaan antara ISIS dan koalisi serta Kurdis di Aleppo utara. ISIS sempat berhasil menguasai ladang minyak di Raqqa, namun hanya bertahan selama 3 hari.

Pada pertengahan bulan Maret ISIS mundur seutuhnya dari provinsi Idlib dan Latakia, serta menguasai ladang minyak dan gas di Deir Izzor selama tiga hari setelah bertempur melawan al-Nusra. Pada bulan-bulan selanjutnya pada tahun 2014, serangan ISIS semakin mengeskalasi dengan kekuatannya yang semakin besar hingga mampu menguasai hampir keseluruhan provinsi Deir Ez-Zor pada bulan Juni 2014. ISIS juga terus bertarung melawan kelompok pemberontak, salah satunya Jasyah al-Islam di Ghouta, Damaskus dan menyerbu beberapa kota serta desa yang dikuasai koalisi pemberontak di Aleppo. AS dan Turki membantu para pemberontak untuk melawan ISIS pada perbatasan Suriah dengan Turki, dimana keterlibatan Turki meliputi serangan udara dan darat oleh tentara nasionalnya serta bantuan terhadap kelompok-kelompok pemberontak sedangkan AS cenderung tidak melibatkan diri secara fisik.

Berikut adalah rangkuman pertempuran ISIS dengan pemberontak selama bulan Januari hingga Maret dari berbagai sumber

Tabel 4.1 Rangkuman Pertempuran ISIS pada Januari – Maret 2014

Tanggal	2 Jan	3 Jan	4 Jan	5 Jan
Tempat	Atarib (Aleppo)	Aleppo, Idlib	Harem (Idlib)	Manbij (Aleppo), Tabqa (Raqqa), Tal Rifaat (Aleppo)
Kejadian	Penyerangan ISIS terhadap kelompok pemberontak setempat	Penyerangan terkoordinasi pemberontak terhadap ISIS Pertempuran ISIS dan FSA	Eksekusi tahanan oleh ISIS setelah markasnya dikepung oleh kelompok pemberontak Penyerangan terhadap kelompok pemberontak oleh ISIS	Penyerangan pada pangkalan ISIS di Manbij setelah pertarungan besar. Pertarungan di Tabqa dan Tal Rifaat antara ISIS dan IF.
Korban	Penculikan dan pembunuhan Dr. Hussein, pimpinan <i>Islamic Front</i> .	Tidak terdata	30 korban jiwa tahanan ISIS, 24 korban jiwa kelompok pemberontak	Total 59 korban jiwa
Keterangan	Pembunuhan tersebut menyebabkan eskalasi perlawanan terhadap ISIS			Menurut oposisi, 80% kekuasaan ISIS di Idlib dan 65% di Aleppo dikuasai oleh kelompok pemberontak.

Tanggal	6 Jan	7 Jan	8 Jan	9 Jan
Tempat	Raqqa bagian Utara, Kafr Zita (Hama)	Jabal Zawiya (Idlib), Rastan (Homs), Qadi al-Askar (Aleppo)	Qadi al-Askar, Al-Bab, Hreitan, Jarablus (Aleppo), Raqqa, Mayadin (Deir ez-Zor)	Mashlab (Raqqa), Idlib
Kejadian	Penyerangan koalisi pemberontak terhadap basis kekuatan ISIS di Raqqa dan pembebasan 50 tahanan ISIS. Pertarungan ISIS dan koalisi di Kafr Zita Penyerangan pada markas ISIS di Jablus	Eksekusi jihadis ISIS oleh koalisi pemberontak ISIS menyerang markas pemberontak. Eksekusi tahanan oleh ISIS di Qadi al-Askar	Penyerangan markas ISIS di kota Aleppo oleh koalisi pemberontak, 300 tahanan ISIS dibebaskan. ISIS menguasai 2 jalur utama di kota Raqqa, kota terabaikan terabaikan tanpa listrik dan air. Serangan balik ISIS di Al-Bab, Hreitanm, Jarabulus dan Mayadin	Penyerangan distrik Maslab dan markas al-Nusra setempat. Menyerang demonstran di Kafartkharim
Korban	90 korban jiwa: 70 anggota ISIS dan 20 pemberontak di Raqqa	34 korban jiwa anggota ISIS, 15 korban jiwa pemberontak, 50 korban jiwa tahanan ISIS	9 korban jiwa di Al-Bab	Ratusan korban jiwa dan luka-luka
Keterangan	ISIS menggunakan senjata bom mobil, ISIS mundur dari Kafr Zita	ISIS kehilangan kontrol atas Raqqa	ISIS mundur dari Aleppo	Menurut oposisi, 80% kekuasaan ISIS di Idlib dan 65% di Aleppo dikuasai oleh kelompok pemberontak.

Tanggal	10 Jan	11 Jan	12 Jan	13 .Jan
Tempat	Raqqa bagian timur, al-Bab (Aleppo)	Saraqeb (Idlib), Tal Abyad (Raqqa), Anadan (Aleppo)	Saraqeb (Idlib), Raqqa.	Raqqa, Al-Bab, Beza'a (Aleppo)
Kejadian	ISIS memukul mundur koalisi pemberontak setempat di Raqqa Pertempuran ISIS dan koalisi di Al-Bab	Pertempuran antara ISIS dan koalisi rebel di Idlib. ISIS menyerang kota dekar Tal Abyad. Pertempuran antara ISIS dan koalisi rebel di Anadan	Koalisi pemberontak memenangkan pertarungan di Saraqeb. ISIS memenangkan pertarungan di Tal Abyad	Pembantaian sandera oleh ISIS di Raqqa.
Korban	20 korban jiwa pemberontak di Al-Bab	5 korban jiwa pemberontak di Saraqeb, 20 di Anadan.	Puluhan korban jiwa anggota ISIS di Saraqeb, penyanderaan Abu Al-Baara (pimpinan ISIS setempat), 70 korban jiwa pemberontak di Tal Abyad,	46 korban jiwa.
Keterangan		ISIS menguasai sebagian besar kota Saraqeb dan Tal Abyad, pemberontak menguasai kembali wilayah Anadan.	ISIS menguasai 95% Raqqa.	ISIS menguasai Raqqa, Al-Bab, Beza'a, pemberontak menguasai Jarabulus.

Tanggal	14 Jan	15 – 17 Jan	20 -23 Jan	27 .Jan
Tempat	Raqqa, Masqan (Aleppo)	Aleppo, Saraqeb (Idlib),	Bab al-Hawa, Manbij (Aleppo), Darkush (Idlib)	Tal Rifaat, Hreitan (Aleppo)
Kejadian	ISIS menguasai Raqqa seutuhnya, pemberontak menguasai Masqan.	Bom mobil oleh ISIS di Jarablus ISIS kalah dalam pertempuran Saraqeb.	Penyerangan oleh ISIS di pangkalan udara Al-Jarah, bom bunuh diri di Manbij dan Bab al-Hawa	Pembunuhan pimpinann ISIS Haji Bakr di Tal Rifaat, dan 2 pimpinan lainnya di Hreitan
Korban		26 korban jiwa di Jarablus	16 korban jiwa di Bab al-Hawa, 20 korban jiwa di Manbij	Korban jiwa Haji Bakr, dan 4 anggota ISIS
Keterangan		Rebel berhasil menguasai desa-desa di Aleppo,	ISIS menguasai pangkalan udara al-Jarah, Manbij, dan Darkush	

Tanggal	1 Feb	3 Feb	8-12 Feb	13 Feb
Tempat	Aleppo	Raqqa	Deir ez-Zor	Aleppo bagian Utara
Kejadian	ISIS menyerang markas besar kelompok al-Tawhid di Aleppo	Pasukan revolusioner Raqqa menyerang titik kekuasaan ISIS dan rumah sakit setempat.	Pasukan koalisi al-Nusra menyerang ISIS	Terjadi pertempuran <i>Battle of Dignity</i> antara ISIS dengan koalisi. YPG menguasai Azaz, desa di Aleppo.
Korban	Komandan al-Tahwid dan 15 anggotanya, 9 anggota ISIS	5 anggota ISIS	Pimpinan ISIS setempat, Abu Dajana dibunuh, 13 anggota ISIS luka-luka	Tidak ada data
Keterangan	Al-Qaeda memutuskan afliasinya dengan ISIS	,	ISIS mundur dari wilayah setempat	

Tanggal	23 Feb	28 Feb	11 Mar	27-29 Mar
Tempat	Aleppo	Aleppo	Aleppo, Raqqa	Dier Ezzor (Raqqa)
Kejadian	ISIS membunuh pimpinan al-Qaeda Suriah dan pimpinan Ahrar Asham di Aleppo Emir ISIS Tunisia dan anggotanya terbunuh di Aleppo	ISIS mundur dari desa Azaz, melarikan diri ke Raqqa dan wilayah-wilayah di sekitar Aleppo, melakukan bom bunuh diri dan penembakan di beberapa wilayah tersebut.	Pembantaian oleh ISIS di desa Shuyukh, Aleppo. Pembunuhan Emir ISIS Abu Mouhammad Al-Massri oleh kelompok Revolusioner Al-Raqqa	ISIS menerang al-Nusra dan sekutu, berhasil menguasai ladang minyak dan gas al-Jafra. ISIS menguasai Markada, Raqqa.
Korban	Komandan Abu Khaled al-Suri dan anggotanya Pimpinan ISIS Tunisia dan anggotanya	Tidak ada data.	22 korban jiwa di Aleppo, Emir ISIS di Raqqa.	35 korban jiwa di Markada
Keterangan		,	ISIS menguasai Karakoak, Aleppo	Penguasaan ISIS di fasilitas minyak dan gas hanya bertahan 3 hari

E. Serangan Pemerintah

Pada bulan Maret dan April 2014 pemerintah melakukan serangan balik dan berhasil merebut kembali kota-kota diperbatasan dengan Lebanon. Pemerintah berhasil merebut kota tersebut dengan bantuan pasukan Hezbollah. Wilayah tersebut penting untuk menghentikan pasokan senjata para pemberontak. Pemerintah mengungkapkan bahwa penyerangan tersebut adalah upaya untuk memberantas terorisme. Pemerintah juga merebut beberapa wilayah kunci di Damaskus, yang merupakan jalur internasional yang menghubungkan Damaskus dengan provinsi-provinsi lainnya, serta tempat persembunyian utama para pemberontak.

Selain pemberontak, pemerintah juga bertarung melawan pasukan Israel. Hal tersebut terjadi beberapa kali, termasuk pada bulan Maret 2014 Israel melancarkan bom kepada tentara Suriah dan menguasai daerah Golan.¹²⁵ Pada pertengahan 2014 pemerintah menyerang basis-basis ISIS di kota Raqqa, Hasakah, dan Latakia bersama dengan pasukan Iraq. Di provinsi Homs, ISIS berhasil menguasai ladang gas Shaar dengan korban 115 orang pasukan pemerintah dan warga sipil serta 21 anggota pemberontak yang kemudian diserang dan dikuasai kembali oleh pemerintah.¹²⁶ Kekuatan FSA dalam melawan pasukan pemerintah didukung oleh Israel dan Amerika, hal ini terlihat pada pasokan senjata-senjata buatan kedua negara tersebut dan pengakuan komandan FSA. Sepanjang bulan Agustus 2014 terjadi pertempuran antara ISIS dan pasukan pemerintah dalam menguasai pangkalan udara, wilayah dan kota, serta penyerbuan pangkalan oleh kedua belah pihak, seperti penguasaan ISIS terhadap pangkalan brigade 93 di Raqqa disertai dengan pengeboman bunuh diri, penyerbuan pangkalan udara Tabqa oleh ISIS di

¹²⁵ Anonim, "Israel bombs Syria's Golan after blast", dalam <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/03/israel-deploys-artillery-after-golan-blast-2014318173434341989.html>, diakses pada 3 Desember 2018.

¹²⁶ Basseem Mroue, "Reports: At least 115 Syrian troops, workers killed in Islamic militants' seizure of gas field", dalam <https://www.guelphmercury.com/news-story/4640736-reports-at-least-115-syrian-troops-workers-killed-in-islamic-militants-seizure-of-gas-field/>, diakses pada 3 Desember 2018.

kota yang sama yang kemudian direbut kembali oleh tentara Suriah sepekan kemudian, serta perebutan kembali kota-kota di Raqqa. Pemerintah juga merebut kota dari kelompok pemberontak lainnya, seperti kota Mleiha yang sebelumnya dikuasai oleh *Islamic Front*.

F. Intervensi Internasional

Intervensi internasional secara umum terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu pendukung pemerintah dan kubu oposisi. Pada pihak oposisi kubu yang dominan adalah AS, Turki dan Israel, sedangkan pada kubu pendukung terdapat Iran dan Rusia. AS sudah terlibat di dalam perang Suriah sejak penyerangan dengan senjata kimia yang dituduhkan kepada pemerintah dengan memberikan pasokan senjata, pelatihan, namun intervensi secara langsung dilakukan pada misinya melawan ISIS bersama dengan koalisi Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Jordan menargetkan pusat-pusat komando dan logistik ISIS.

Sejak tahun 2015 AS membentuk koalisi internasional yang terdiri dari Canada, Australia, New Zealand, NATO, negara-negara Arab, dan Turki untuk melawan ISIS.¹²⁷ Serangan-serangan yang dilancarkan untuk melumpuhkan ISIS juga dilaksanakan pada tentara Suriah dan kelompok pro pemerintah di berbagai kota. Ketegangan dan benturan antara koalisi dengan Rusia juga kerap terjadi dalam operasi militer keduanya, seperti saling tuduh terhadap penyerangan yang memakan korban jiwa militer Suriah dan sipil, maupun yang merusak fasilitas umum, serta penyerangan yang menyebabkan korban jiwa militer AS maupun Rusia.

Turki dengan kepentingan keamanannya nasionalnya dimana secara langsung berbatasan dengan Suriah berupaya agar pasukan Kurdistan di bagian utara Suriah tidak membahayakan negaranya. Turki berpihak pada oposisi pemerintah, namun menolak penguatan YPG yang dilakukan oleh koalisi Amerika, sehingga ketegangan politik sering kali terjadi diantara kedua negara tersebut. Sebagai negara dengan perbatasan terbesar dengan Suriah, konfrontasi tidak terhindarkan di perbatasan

¹²⁷ Carmen-Cristina Cirliig, *The international coalition to counter ISIS/Da'esh (the 'Islamic State')*, EPRS, 17 Maret 2015, hlm. 9-12

tersebut. Terjadi bertarungan antara ISIS dengan tentara nasional Turki serta pelaksanaan operasi koalisi gabungan dengan AS untuk memberantas kelompok tersebut. Pertarungan juga terjadi antara pasukan Turki melawan YPG di kawasan.

Negara-negara perbatasan lainnya juga terlibat dalam perang ini, seperti konfrontasi di daerah *Golan Heights* antara tentara Israel dengan Hezbollah dan pasukan Suriah. Israel menolak tuduhan dengan sengaja melakukan penyerangan-penyerangan terhadap pasukan Ba'ath dan Hezbollah. Lebanon juga terlibat dalam perang melalui pasukan Hezbollah yang mendukung pemerintah. Melalui bantuan oleh pasukan Hezbollah, Suriah berhasil merebut daerah-daerah dekat perbatasan Lebanon dengan kepentingan mengamankan rute utama jalur pengiriman senjata Iran ke Lebanon sehingga Hizbullah mengirimkan ribuan pasukannya dan Iran mengirimkan milyaran dolar untuk mendukung pemerintah Suriah. Dalam pihak oposisi, Saudi mengambil posisi untuk sepihak dengan AS sebagai salah satu sekutu terdekat dan mengirimkan bantuan militer kepada pemberontak, termasuk kelompok-kelompok radikal.¹²⁸ Kekerasan juga terjadi di Iraq dengan konfrontasi antara kelompok pemberontak dan tentara Iraq. Kedua negara berusaha untuk mengalahkan dominasi ISIS, yang sering kali bertanggung jawab atas serangan-serangan di perbatasan. Upaya infiltrasi terjadi di perbatasan dengan Jordan berupaya untuk menyelundupkan narkoba.

Perancis sebagai bagian dari NATO juga terlibat di dalam konflik Suriah sebagai oposisi Assad, namun pada praktiknya Perancis juga bekerjasama dengan Rusia di dalam berbagai penyerangan. Keterlibatan Perancis yang ambigu disebabkan oleh hubungan eks-koloni dengan Suriah, kepentingan keamanan Perancis terhadap serangan terorisme yang terjadi di negaranya, serta kepentingan untuk menciptakan citra sebagai pemimpin kemanusiaan dan sebagai alternatif dari kekuatan global yang di dominasi oleh AS.

Dalam perspektif Kementerian Luar Negeri RI, bahwa kepentingan negara-negara lain cenderung mempersulit konflik yang sudah sangat rumit di dalam

¹²⁸ Wawancara dengan perwakilan Subdirektorat Rusia Kementerian Luar Negeri RI Bp. Darmawan di Kementerian Luar Negeri RI, pada 25 September 2018.

internal Suriah. Hal-hal pendukung eskalasi seperti identitas sekte yang beragam dengan kepentingannya masing-masing, lingkungan strategis persaingan antara Sunni dan Syiah di dunia Arab, serta pemerintahan otoriter dan tidak ada kebebasan beropini semakin diperumit dengan persaingan antara kekuatan global AS dan Rusia, serta kekuatan regional Saudi dan Iran. Menurut perspektif pribadi narasumber, aktor-aktor internasional pendukung opsi merupakan salah satu eskalator terbesar di dalam konflik ini.¹²⁹

Dalam Perspektif Badan Intelijen Negara RI, koalisi Barat beserta dengan sekutu Arab dan Turki memiliki kepentingan untuk mengeksploitasi cadangan minyak dan gas alam yang ada di Suriah. Hal tersebut karena pada umumnya di wilayah negara-negara lain ketebalan tanah yang mengandung minyak dan gas alam hanya sekitar 10-20 meter, sementara di Suriah ketebalannya mencapai hingga 350 meter. Hal tersebut menandakan kandungan minyak dan gas yang mencapai miliaran barel, menjadikan negara-negara manapun berkeinginan untuk menguasainya.¹³⁰

2.2.1.2 Kekerasan Struktural

Pergantian kekuasaan dari Havez kepada anaknya Bashar memberikan harapan kepada masyarakat Suriah akan kepemimpinan yang modern dan terbuka. Pada awal pemerintahannya, Bashar memberikan toleransi terhadap kebebasan berpendapat dengan membebaskan tawanan politik ayahnya, memperkenalkan internet pada masyarakat, serta memberi kebebasan pada media untuk memberikan kritik yang membangun. Peristiwa tersebut dikenal dengan Musim Semi Damaskus.

Namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena aktivis dan pergerakannya ditangkap dan dihentikan aktifitasnya, diikuti dengan sensor media yang ketat dan penutupan lembaga-lembaga media yang tidak diperkenankan oleh pemerintah dan blok website serta penargetan jurnalis dan penulis blog yang

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Wawancara dengan perwakilan Badan Intelijen Negara, pada 21 Januari 2019.

mengkritisi pemerintahan. Kedudukan wanita yang pada awalnya dijanjikan akan menjadi setara kemudian tidak menemui titik terang dengan hukum syariat yang tidak memberikan kesetaraan pada wanita dan tidak dikembangkannya organisasi pemberdayaan wanita.¹³¹

Pada masa jabatannya, Assad juga mampu untuk merevolusi ekonomi melalui kebijakan-kebijakan barunya, yakni dengan meliberalkan perekonomian dan menurunkan subsidi, namun tingginya korupsi dan nepotisme menyebabkan hanya segelintir orang yang dapat menikmati kemajuan ekonomi. Angka pengangguran yang tinggi, kesenjangan ekonomi, serta kebebasan menjadi pendorong adanya revolusi. Peningkatan taraf hidup masyarakat Suriah akibat peningkatan ekonomi juga berdampak pada meledaknya jumlah penduduk, sehingga pada tahun 2010 55% masyarakat berumur dibawah 24 tahun. Assad melakukan pertumbuhan dalam pendidikan untuk mengimbangi jumlah penduduk muda, namun permasalahan sesungguhnya adalah ketidaktersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Menyebabkan angka pengangguran mencapai 10% pada tahun 2003-2011.¹³²

Keputusan Assad untuk mendukung Iraq dalam perang tahun 2003 menimbulkan permusuhan dengan AS dan menjadikan Suriah salah satu dari “poros setan” oleh presiden Bush. Invasi atas Lebanon semakin menegangkan situasi, hal tersebut menyebabkan putusnya hubungan dagang dengan AS serta mengajak komunitas internasional untuk memboikot hubungan diplomatik dengan Suriah. Suriah semakin mendekat pada Iran, Hezbollah, Hamas, dan Rusia. Hal ini menjadikan Assad semakin sulit untuk mengembangkan ekonominya. Konsekuensi dari perang Iraq adalah kebangkitan paham sekterian Sunni jihadist di seluruh dunia, terlebih di negara tetangga Suriah. Kehadiran Al-Qaeda Iraq (AQI) berperan besar dalam perang sipil Suriah sebagai organisasi yang mengatasi pasukan jihadis

¹³¹ Robin Yassin-Kassab dan Laila Al-Shami, *Burning Country: Syrians in Revolution and War*, (London: Pluto Press), hlm 17-20.

¹³² Christopher Phillips, *The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East*, (New Heaven and London: Yale University Press), hlm. 45-46.

Suriyah: Jabhat al-Nusra dan ISIS. Terinspirasi dari semangat jihadis, pasukan Kurdis juga memperkuat nasionalisme dan angkatan bersenjata.¹³³

Tekanan baik dari dalam negeri maupun internasional terhadap reformasi rezim klan Assad yang telah berkuasa selama 40 tahun dengan segala kekerasan struktural yang ditimbulkan menjadikan baik masyarakat oposisi maupun pemimpin Israel, AS, NATO dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah seperti Saudi dan Qatar semakin berkeinginan untuk menjatuhkan rezim Assad. Hal ini yang tadinya hanya menjadi kekerasan struktural setelah terjadi *Arab Spring* menjadi kekerasan kultural, dimana kontradiksi terjadi di level laten, mengakibatkan kekerasan kultural.¹³⁴

Pidato Assad pada tahun 2012 dimana masyarakat masih menantikan perubahan dalam kepemimpinannya serta permintaan maaf atas tindakan kekerasan yang dilakukan kepada rakyatnya diakhiri dengan kebencian yang lebih karena Assad menolak untuk berkompromi dan menerima kenyataan bahwa revolusi benar berasal dari rakyat. Popularitas Assad masih terlihat terhadap besarnya dukungan terhadap dirinya, namun gelombang protes juga semakin meningkat di berbagai daerah.¹³⁵ Perang menjadikan ekonomi Suriyah semakin terpuruk, pada bulan Maret 2015 sebanyak tiga juta masyarakat Suriyah kehilangan pekerjaannya, pengangguran meningkat menjadi 57.7% pada akhir tahun 2014, dan 80% masyarakat hidup dalam kemiskinan. Angka harapan hidup Suriyah turun menjadi 55 tahun, 22 tahun lebih rendah dari sebelum masa perang sipil.¹³⁶ Dengan semakin tidak terkendalinya perang, jutaan masyarakat mengungsi ke berbagai negara. Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak, dengan terbatasnya jumlah makanan tidak jarang pengungsi hanya mendapatkan makanan sekali dalam sekali, serta tempat penampungan yang tidak layak menyebabkan pengungsi mudah terjangkit dan menularkan penyakit.

¹³³ *Ibid*, hlm. 21-22

¹³⁴ Wawancara dengan perwakilan Badan Intelijen Negara, pada 21 Januari 2019.

¹³⁵ *Ibid*.

¹³⁶ Anonim, "Unemployment and poverty rate in Syria continue to rise", dalam <https://www.borgenmagazine.com/poverty-rate-in-syria/>, diakses pada 23 Desember 2018.

Tidak tersedianya akses untuk mendapatkan perlindungan yang layak serta akses untuk pelayanan kesehatan dirasakan masyarakat di dalam dan luar Suriah. Banyaknya kota yang dikuasai oleh pemberontak menjadikan permukiman sipil menjadi rentan dengan pertarungan. Pengungsi sendiri banyak yang tidak mendapatkan hak atas akses kesehatan, penolakan dari rumah sakit di negara setempat menjadi hal yang umum. Perang yang terjadi selama tujuh tahun berdampak langsung pada pendidikan masyarakat Suriah. Selama konflik dimulai pada tahun 2011, 309 fasilitas pendidikan menjadi sasaran penyerangan dan satu diantara tiga sekolah tidak lagi dapat beroperasi. Sekitar 40% anak-anak tidak lagi dapat melanjutkan pendidikan, menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi *child soldier* maupun perbudakan.¹³⁷ Bagi pengungsi, akses anak-anak terhadap edukasi sering kali ditolak oleh tuan rumah negara.

2.2.1.3 Kekerasan Kultural

Kemerdekaan Suriah tidak diiringi dengan kematangan sistem kenegaraannya, dengan warisan sistem parlemen yang lemah dan kekuatan militer yang kuat dari Prancis. Lemahnya budaya persaingan politik mengakibatkan pergantian kekuasaan melalui *coup de etat* selama delapan kali dari 1949 hingga 1970.¹³⁸ Kelemahan juga terdapat dalam sistem sosial budaya Suriah dimana dengan komposisi masyarakat yang beragam, Kerajaan Ottoman mewariskan persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, sehingga sekte-sekte minoritas seperti Alawi dan Druze menempati tempat-tempat yang terpencil.

Ketika Hafez al-Assad berhasil dalam kudeta terakhir di Suriah, ia membangun dinastinya dengan menguatkan kapasitas Ba'ath dengan memberikan posisi-posisi kunci, serta untuk menghindari persekusi Sunni pada zaman Ottoman, ia menjamin posisi-posisi penting untuk Sunni. Ia juga melindungi kepala-kepala

¹³⁷ Unicef, "Nearly 5 million Syrian children accessing education despite over seven years of war on children", dalam <https://www.unicef.org/press-releases/nearly-5-million-syrian-children-accessing-education-despite-over-seven-years-war>, diakses pada 23 Desember 2018.

¹³⁸ *Ibid* Phillips, hlm. 11.

suku kunci di Suriah dan meminta perlindungan agar tidak terjadi kudeta lagi.¹³⁹ Selama masa pemerintahannya ia juga melakukan kekerasan untuk meredam pemberontak, dan memata-matai penduduknya untuk menghindari perencanaan menjatuhkan kekuasaannya.

Pada tahun 2000, Bashar berkuasa menggantikan Hafez. Meskipun menggunakan imej yang lebih modern dengan ayahnya, namun kekerasan kultural yang terjadi tidak berubah secara signifikan. Meskipun tidak setangan besi ayahnya, ia tetap menangkap aktifis-aktifis politik yang menyuarakan hak asasi dan dengan ketat menjaga sensor media. Pemerintahan Bashar juga melakukan diskriminasi terhadap Kurdistan, dengan melarang adanya identitas Kurdis, termasuk bahasa, perayaan-perayaan tradisional, dan hak kewarganegaraan.¹⁴⁰ Masyarakat Kurdis yang telah lama didiskriminasi kemudian semakin terpojokan dengan pelarangan memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, serta tidak ada akses bepergian ke luar negeri, serta tidak diizinkan untuk bekerja pada profesi tertentu serta kepemilikan tanah, rumah dan bisnis.

Aksi demonstrasi yang damai awalnya hanya menuntut pembebasan tahanan, penegakan hukum dan politik yang adil. Namun dengan respon opresi dan penangkapan sejumlah aktifis, hal tersebut semakin memprovokasi masa untuk menurunkan Assad sebagai pemimpin bangsa. Dengan semakin meningkatnya aktifitas rakyat maka pasukan pemerintah menggunakan senjata api untuk meredam. Hal tersebut menyebabkan protes semakin menyebar di berbagai provinsi.¹⁴¹ Tidak adanya persatuan dan persamaan dalam nasionalisme Suriah menjadikan identitas sekte tetap melekat kuat pada masyarakatnya. Pada perang sipil, masyarakat Suriah terpecah ke dalam kelompok-kelompok teroris, pemberontak, dan pro pemerintah, dimana pengelompokannya terjadi berdasarkan

¹³⁹ *Ibid* Phillips. hlm. 12.

¹⁴⁰ Anonim, "Syria: Events of 2009", dalam <https://www.hrw.org/world-report/2010/country-chapters/syria>, diakses pada 18 Desember 2018.

¹⁴¹ Robin Yassin-Kassab dan Laila Al-Shami, *Burning Country: Syrians in Revolution and War*, (London: Pluto Press), hlm 37-38.

sekte-sekte. Kelompok bersenjata Shiah secara garis besar berada pada pihak Assad sedangkan Sunni dan Kurdis pada oposisi.

Dalam keadaan perang, peran bias media dalam meliput sebuah kejadian menjadikan konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang utuh. Propaganda AS dalam berusaha untuk menyudutkan pemerintahan Assad dilancarkan melalui media-medianya, sehingga membentuk perspektif bahwa Assad merupakan aktor terbesar di dalam konflik tersebut. Jurnalisme Rusia yang cenderung hanya meliput aksi heroiknya tidak memberikan fakta yang jelas tentang posisi oposisi yang tidak sepenuhnya menjadi aktor utama di dalam konflik Suriah. Ketidakberimbangan dalam menyajikan informasi kemudian membentuk opini global dimana keduanya saling bertentangan antara aktor konflik dan juru damai, poros media AS menganggap AS adalah juru damai dan oposisi adalah protagonist yang melanggar hak asasi manusia dan menggunakan senjata kimia. Namun dua lembaga yang aktif melaporkan pelanggaran-pelanggaran rezim adalah Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) dan Organisasi Helm Putih yang disinyalir merupakan organisasi yang didanai barat untuk melakukan propaganda. Poros media Rusia meliput tindakan-tindakan pemerintah dalam menangani kelompok teror serta dukungan dana AS dan Turki kepada kelompok teror.¹⁴²

Tujuan kelompok oposisi dalam melakukan pemberontakan adalah untuk menjatuhkan Assad dan memiliki pemimpin Sunni setelah hampir 40 tahun kekuasaan didominasi oleh Alawi. Meningkatnya derajat hidup kaum Alawi menjadi ancaman bagi kaum Sunni akan pendirian negara Alawi di Suriah. Pada penyerangan kaum pemberontak juga menyerang masyarakat sipil Alawi, termasuk wanita dan anak-anak.¹⁴³ Diskriminasi tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga 22 juta masyarakat pengungsi di luar kawasan. Setelah bertahan dari gempuran pemerintah dan ISIS mereka memilih untuk memilih resiko berlayar yang dapat tenggelam sewaktu-waktu, dan tidak diperlakukan seperti manusia di negara

¹⁴² Wawancara daring dengan perwakilan Badan Intelijen Negara, pada 21 Januari 2019.

¹⁴³ <http://sputniknews.com/middleeast/20160512/1039506760/terrorists-hama-al-zara.html>

lain. Mayoritas negara tidak dengan tangan terbuka menerima pengungsi, dengan menetapkan kebijakan dan prosedur yang ketat, para pengungsi sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak.¹⁴⁴

2.2.2 Hasil Penelitian Intervensi Rusia

2.2.2.1 Peacekeeping

Intervensi bersenjata yang mende-eskalasi

Pasukan Rusia memulai operasi militer di Suriah pada 30 September 2015 dengan mengirimkan pasukan udara dari pangkalan militernya di Khmeimim dengan misi memberantas kelompok teroris ISIS dan al-Nusra di provinsi Homs, Hama dan Quneitra. Unit-unit militer yang dikirimkan dari pangkalan udara tersebut adalah: 59 pesawat tempur yang terdiri dari 12 unit SU-24, 10 unit SU-25SM, 4 unit SU-30SM, 4 unit SU-34, 2 unit SU-25UB, 1 unit AN-30, 1 unit IL-20 dan 16 unit helikopter (12 unit Mi-24p, dan 4 unit MI-8MTSh), serta membawa pasukan tempur, logistik, dan pasukan penjaga.

Rusia melakukan serangan udara pada markas-markas ISIS di provinsi Raqqa, termasuk pangkalan udara Tabqa yang dikuasai ISIS sejak tahun 2014. Pada hari yang sama Rusia juga melakukan penyerangan di Deir ez-Zor pada markas-markas ISIS setempat.¹⁴⁵ Pada tanggal 2 Oktober, Rusia melakukan serangan udara pada ISIS di kota al-Qaryatayn dan berhasil menghancurkan pusat kendali ISIS di kota tersebut. Pasukan juga menangkap pasukan ISIS dalam perjalanannya di jalan bebas hambatan Palmyra. Pasukan Suriah dan pro pemerintah turut menyerang ISIS dan mampu memenangkan pertarungan di al-Qaryatayn setelah bertarung selama 2 jam dengan korban jiwa 18 militan.

¹⁴⁴ Tod Schneider, et al, "Cultural and Structural Violence in the Lives of Syrian Refugees", *Journal of Health and Human Experience*, Vol III (2), 2017, hlm 78-80.

¹⁴⁵ Sylvia Westall, "Russia jets strike Islamic State in northern Syria: al-Mayadeen TV", dalam <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-raqqa-idUSKCN0RV4UV20151001>, diakses pada 10 Desember 2018.

Pada hari yang sama pasukan udara Rusia memulai pengeboman terhadap al-Nusra di kota al-Rastan dan Talbiseh di provinsi Homs, yang dilanjutkan dengan pengeboman pada organisasi yang sama di kota-kota lainnya di provinsi Hama. Pengeboman di Raqqa dilakukan pada malam hari dengan 11 serangan udara di seluruh Raqqa. Markas utama ISIS di bandar udara militer dan rumah sakit nasional Tabaqa juga diserang dengan barak persenjataan dihancurkan dengan dua serangan udara. Masih di daerah sekitar, Rusia menyerang ISIS di ladang pertanian Al-Ajrawi, dimana lokasi tersebut digunakan sebagai gudang persenjataan ISIS. Rusia juga menyerang ISIS di provinsi al-Hasakah, tepatnya di kota al-Shadadi dan al-Houl.¹⁴⁶

Menteri Pertahanan Rusia menyatakan bahwa pasukannya telah melakukan pengeboman pada Sembilan titik kekuatan ISIS di ibu kota *de facto* Raqqa. Pada hari yang sama angkatan udara Rusia melakukan empat serangan udara terhadap al-Nusra di wilayah-wilayah pada provinsi Idlib, yakni Jisr al-Shughour, Jabal al-Zawiya dan Jabal Al-Akrad di Latakia bagian utara. Rusia juga menyokong penyerangan melalui jalur laut dengan melancarkan misil dari kapal Caspian Flotilla di laut Caspian menghancurkan 11 target di Suriah pada 7 Oktober, dan kembali menghancurkan 7 target pada 20 November. Rusia juga mengerahkan kapal selam Rostov-on-Don di Laut Mediterania serta kapal roket kecil untuk dalam penyerangan di laut Mediterania. Misi Rusia dalam melumpuhkan kekuatan terorisme dilakukan bersama-sama dengan pasukan darat Suriah di wilayah laut Kaspian.

Sepekan kemudian, dilakukan operasi gabungan di bagian selatan Aleppo antara 2000 pasukan *Islamic Revolutionary Guard Troops* (IRGC) dari Iran, pasukan Heboallah, militant Syiah Iraq, dan pasukan Rusia untuk melawan ISIS dan pasukan non-pemerintah. Serangan tersebut mampu membuat Suriah menguasai wilayah Aleppo bagian timur yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS. Namun akibat dari

¹⁴⁶ Leith Aboufadel, "ISIS Rocked in Al-Raqqa: Russian Air Force Strikes Tabaqa Airport", dalam <https://www.almasdarnews.com/article/isis-rocked-in-al-raqqa-russian-air-force-strikes-tabaqa-airport/>, diakses pada 12 Desember 2018.

serangan tersebut adalah hancurnya fasilitas kesehatan yang menjadi target pengeboman Rusia, diduga merupakan markas dari militan. Kelompok oposisi menyatakan bahwa rumah sakit tersebut merupakan salah satu dari yang terbaik di negara tersebut, sejumlah empat penduduk sipil meninggal dalam kejadian tersebut.¹⁴⁷

Pasukan Iran mengalami banyak korban jiwa, termasuk Jenderal Hossein Hamedani, pimpinan senior militer Iran.¹⁴⁸ Pada tanggal 8 Oktober Rusia meningkatkan intensitas penyerangannya hingga pada 60 penyerangan mendadak per hari, dengan hasil berhasil menyerang 24 titik ISIS dalam 24 jam dan membunuh 300 militan. Klaim Rusia adalah telah menghancurkan 456 titik target musuh dalam kurun waktu 30 September hingga 16 Oktober. Penyerangan terus ditingkatkan hingga dalam kurun waktu empat bulan dilakukan lebih dari 9000 penyerangan mendadak untuk menghancurkan target, serta dalam keseluruhan operasinya telah dilaksanakan 34.000 penyerangan mendadak pada kota-kota utama markas teroris seperti Palmyra, Aleppo, dan Deir ez-Zor dengan rata-rata 100 penyerangan per hari.

Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Putin di Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia, bersama-sama dengan Menteri Pertahanan beserta dengan jajarannya, presiden memerintahkan kepada perwira laut Krivorog Oleg Leonidovich (sebagaimana diterjemahkan):

“...in the near future, a French naval group led by an aircraft carrier will approach the area of your actions. It is necessary to establish direct contact with French and work with them allies”

¹⁴⁷ Anonim, “Syria’s war: US suspends ceasefire talks with Russia”, dalam <https://www.aljazeera.com/news/2016/10/syria-war-aleppo-hospital-hit-time-161003154906472.html>, diakses pada 30 Desember 2018.

¹⁴⁸ Christopher Phillips, *The Battle for Syria: International Rivalry in the New Middle East*, (New Heaven and London: Yale University Press), hlm. 218.

Pada 17 November, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa Rusia mengerahkan bomber strategis jarak jauh untuk menyerang target-target ISIS di Raqqa, Deir ez-Zor, Idlib, dan Aleppo. Operasi laut tersebut merupakan misi gabungan antara Rusia dan Perancis yang dilakukan pada keesokan harinya dengan menembakan misil ke daerah-daerah tersebut dengan korban jiwa lebih dari 600 militan.¹⁴⁹ Pada awal bulan Desember, dalam laporan Menteri Pertahanan kepada Presiden Putin, Rusia menaikkan intensitas serangannya sejak tanggal 5 Desember sesuai dengan instruksi presiden, dan menyatakan klaim bahwa selama tiga hari pencapaian-pencapaian yang diraihinya meliputi 300 serangan mendadak dilakukan terhadap 600 target di berbagai tempat di provinsi Raqqa.¹⁵⁰ Pada akhir bulan Desember Kepala Operasional tentara Rusia Letjen Sergey Rudskoy menyatakan bahwa sepanjang operasinya Rusia telah melakukan 5,240 serangan mendadak pada Suriah, termasuk 145 serangan jarak jauh.

Pada 30 Desember, terdapat pertempuran berat antara koalisi pasukan Suriah dan Rusia berhadapan dengan pemberontak di dekat perbatasan dengan Jordan. Menurut salah satu pimpinan pemberontak, penyerbuan dilakukan secara gencar selama 24 jam dengan lebih dari 40 penyerangan. Pasukan pemerintah berhasil mengambil alih kembali pangkalan militer Brigade 82 dari tangan pemberontak di kota Sheikh Maskin, provinsi Deraa. Pada bulan awal Februari, serangan Rusia berhasil menyokong tentara Suriah dalam penyerangan di Aleppo utara dimana kawasan tersebut adalah jalur pengiriman logistik maupun pemberontak dari Turki. Pada tanggal 27 Februari terjadi gencatan senjata selama 4 hari setelah terjadi perundingan antara Rusia dan AS, namun perjanjian ini tidak meliputi kolompok-kelompok teroris seperti ISIS dan al-Nusra.

¹⁴⁹ Anonim, "Long-range bombers to fly anti-ISIS missions from Russia, Putin orders Navy to work with France", dalam <https://www.rt.com/news/322436-russia-strikes-syria-putin/>, diakses pada 10 Desember 2018.

¹⁵⁰ "Moscow Kremlin, "Meeting with Defense Minister Sergei Shoigu", dalam <http://kremlin.ru/events/president/news/50892>, diakses pada 18 Desember 2018.

Pada bulan Maret, dalam rapat bersama dengan Menteri Pertahanan, Presiden Putin menyatakan (sebagaimana diterjemahkan):

“I consider the objectives that have been set for the Defense Ministry to be generally accomplished. That is why I order to start withdrawal of the main part of our military group from the territory of the Syrian Arab Republic starting from tomorrow,... In a short period of time Russia has created a small but very effective military group [in Syria]... the effective work of our military allowed the peace process to begin,... Syrian government troops and patriotic forces have changed the situation in the fight with international terrorism and have ceased the initiative”¹⁵¹

Pernyataan tersebut mengumumkan bahwa sebagian besar misinya untuk memberantas teror telah tercapai dan memulai untuk menarik pasukannya kembali ke Rusia. Lebih lanjut ia menyatakan akan mengirimkan staff diplomatik untuk menyelesaikan konflik melalui *peace talks*. Namun militer Rusia akan tetap berada di pelabuhan Tarsus dan pangkalan udara Rusia di Khmeimim untuk mengawasi kesepakatan gencatan senjata. Dalam percakapan telepon antar kedua presiden, Assad mengapresiasi bantuan Rusia dalam menangani terorisme dan bantuan kemanusiaan. Pada pertengahan bulan Maret, Rusia bersama dengan pasukan Suriah, Iran, dan Hezbollah mengambil alih kembali beberapa distrik di kota Palmyra yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS, termasuk situs warisan dunia UNESCO di kota tersebut. Menurut Direktur *Syrian Observatory* Rami Abdulrahman, Suriah telah menguasai satu per tiga kawasan Palmyra khususnya di bagian barat dan utara. Selanjutnya Rusia melakukan misi pembersihan ranjau di daerah tersebut.

Pada tanggal 8 Juli, helikopter Mi-25 milik Rusia dihancurkan dari darat oleh militan ISIS menggunakan anti-tank buatan Amerika di Palmyra menyebabkan 2 korban jiwa pilot Rusia. Rusia membalas serangan markas ISIS dengan menyerang

¹⁵¹ Anonym, “Putin orders start of Russian military withdrawal from Syria, says “objectives achieved””, dalam <https://www.rt.com/news/335554-putin-orders-syria-withdrawal/>, diakses pada 30 Desember 2018.

bagian timur Palmyra dan kota Al-Sukhnah serta wilayah pedesaan Arak. Penyerangan tersebut menghancurkan gudang senjata dan amunisi ISIS, tiga tank, empat kendaraan kombatan infantri, dan delapan kendaraan yang diperlengkapi senjata mesin.¹⁵²

Tabel 4.2 Pencapaian misi pembersihan ranjau pada kota-kota di Suriah

CLEARED MINES	FROM	PALMYRA	ALEPPO	DEIR EZ-ZOR	TOTAL
ROADS		219.5 Km	945.2 Km	246 Km	1,410.7 Km
BUILDINGS		10,476	4,794	1,868	17,138
EXPLOSIVES		24.053	36,218	44,783	105,054
IEDS		1,1062	20,967	9,695	30,724
RAILWAYS		-	12.6 Km	-	12.6 Km
TOTAL TERRITORIES		2,339.1 ha	2,956.1 ha	1,238 ha	6,533 ha

Pada tanggal 17 November, juru bicara Menteri Pertahanan Rusia menyatakan bahwa tiga komandan besar al-Nusra, yakni Muhammad Halela, Abu Jaber Harmuja, dan Abdul Baha Al-Asfari bersama dengan setidaknya 30 anggota teroris lainnya telah terbunuh melalui serangan udara Rusia di provinsi Idlib. Hal ini berpengaruh pada kekuatan al-Nusra secara keseluruhan terutama di provinsi Hama, Homs dan Aleppo. Pada awal Januari 2017, Rusia bersama-sama dengan Turki melakukan operasi gabungan untuk memberantas ISIS di kota al-Bab. Turki merapat ke kubu Rusia setelah mengkritisi tindakan koalisi AS dalam memberantas ISIS, dan bersama Rusia melakukan penangkapan pada 103 titik ISIS di kota

¹⁵² Anonym, "Long-range bombers flying from Russia destroy 'major' ISIS camp in central Syria", dalam <https://www.rt.com/news/350784-russian-bombers-syria-isis/>, diakses pada 30 Desember 2018.

tersebut. Pada pertarungan al-Bab, Turki memimpin operasi dengan mengerahkan tentaranya serta militant FSA, didukung oleh Rusia dalam menghancurkan ISIS.

Setelah menurunkan intensitas, pada bula Maret Rusia memulai penyerangan kembali di provinsi Idlib, Hama dan bagian timur kota Damaskus. Pada bulan Juli 2017, Rusia-Iran-Turki merencanakan pembuatan empat *safe-zones* di wilayah Idlib, Aleppo, Latakia, dan Hama dengan Rusia mengirimkan polisi militernya untuk operasi tersebut. Pada bulan Agustus, koalisi Rusia berhasil mengambil alih kota al-Sukhnah dari kendali ISIS, dan pada bulan September kota Deir ez-Zor berhasil diambil alih oleh pemerintah melalui koalisi dengan Rusia. Dalam operasi tersebut koalisi menghancurkan jalur-jalur bawah tanah, tempat-tempat penembangan artileri, dan tempat perlindungan pasukan ISIS serta gudang persenjataan.

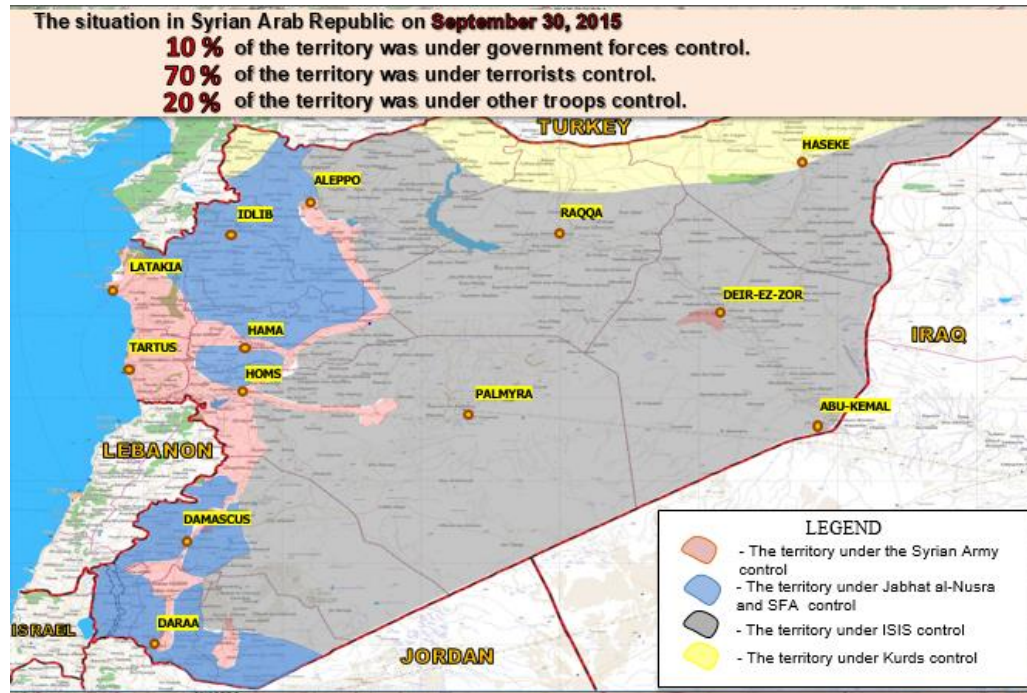
Pada tanggal 11 Desember dalam kunjungannya di pangkalan udara Khmeimim, Putin menyatakan bahwa:

“... Two basing points will be created here and on a permanent basis: in Tartus and Hmeymim. And if the terrorists again raise their heads, we will inflict such blows to them, which they have not yet seen For more than two years, the Armed Forces of Russia, together with the Syrian army, defeated the most efficient group of international terrorists. In this regard, I made a decision: a significant part of the Russian military contingent located in the Syrian Arab Republic is returning home to Russia,”¹⁵³

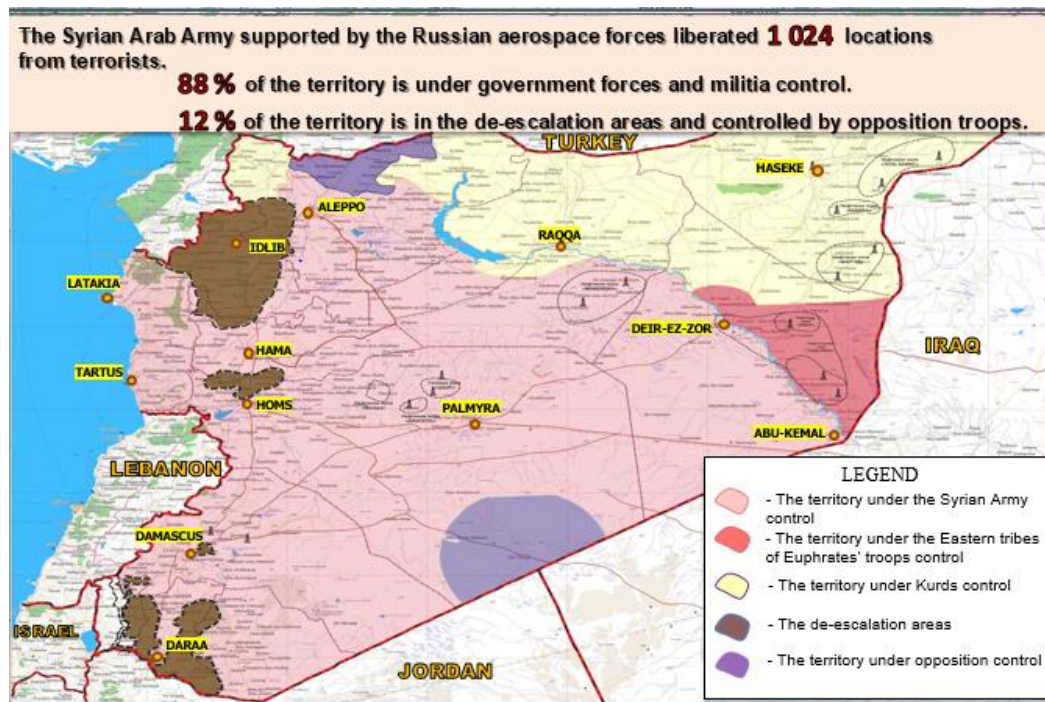
Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa markas militer Rusia di Tartus dan Khmeimim akan secara permanen berdiri di Suriah untuk melakukan perlawanan terhadap teror jika sewaktu-waktu teroris bangkit kembali. Putin juga menyatakan akan menarik pasukannya di Suriah setelah menyatakan kemenangan

¹⁵³ Pernyataan Presiden Vladimir Putin dalam <http://kremlin.ru/events/president/news/56351>, diakses pada 30 Desember 2018.

atas terorisme di Suriah dengan penguasaan ISIS yang di klaim Rusia tidak sampai 5% di Suriah.



Gambar 4.5 Situasi Suriah sebelum misi Rusia



Gambar 4.6 Situasi Suriah setelah misi Rusia

Intervensi bersenjata yang mengeskalasi

Menurut perspektif Atase Pertahanan Rusia untuk RI, misi Rusia di Suriah adalah untuk memberantas terorisme sesuai dengan permintaan Assad terhadap Rusia, hal tersebut disambut baik oleh Rusia untuk mencegah penyebaran terorisme dari Suriah menuju Rusia, namun pada praktiknya Rusia banyak menargetkan kelompok-kelompok oposisi pemerintah. Dari bulan September 2017 hingga 13 Oktober, media oposisi menyatakan bahwa dari 36 serangan Rusia, hanya 2 ditargetkan pada ISIS, sisanya dilancarkan pada pemberontak dan oposisi. Pada tanggal 1 Oktober, Russia melakukan pengeboman udara pada markas oposisi Jaish al-Fatah, kelompok oposisi yang tengah berkembang dengan berhasil menguasai kota Idlib dan Jisr al-Shughour.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Wawancara dengan Atase Pertahanan Rusia untuk RI Kolonel Nikolay Nikolayuk di Kuningan City, pada 22 Agustus 2018.

Ketegangan juga terjadi antara Rusia dan Turki ketika pesawat SU-24 Rusia ditembak oleh perawat F-16 Turki pada 24 November di dekat perbatasan Suriah-Turki. Pihak Turki menyatakan bahwa Rusia telah melanggar ruang udara Turki dan mengabaikan 10 peringatan yang telah dikirimkan. Pilot Rusia dibunuh oleh pemberontak dan anggota operasi penyelamat juga terbunuh. Presiden Putin menyatakan bahwa serangan tersebut melambangkan penghianatan oleh kaki tangan teroris, lebih lanjut ia menyatakan bahwa pesawat Rusia ditembak di teritori Suriah dalam misi memberantarkan ISIS di Latakia bagian utara.¹⁵⁵

Pada tanggal 7 Oktober Rusia memulai kampanye untuk memerangi pasukan pemberontak di provinsi Hama bagian utara, Latakia, Idlib, Homs, dan Deraa. Rusia juga menargetkan tempat-tempat pelatihan pemberontak dan gudang amunisi di Latakia dan Idlib. Pada pertengahan Oktober, koalisi Rusia Suriah Iran Hezbollah menyerang pemberontak di Aleppo Selanjutnya pada tanggal 29 November, serangan udara Rusia di Idlib yang dilakukan di kawasan padat penduduk menyebabkan 44 korban jiwa sipil. Peristiwa tersebut terjadi di kota Ariha, kota yang dikendalikan oleh aliansi pemberontak termasuk al-Nusra. Menurut Direktur *Syrian Observatory for Human Rights*, organisasi yang berbasis di Inggris, setidaknya serangan Rusia di kawasan tersebut telah menyebabkan 60 korban jiwa dan luka-luka.¹⁵⁶ Pada 9 Januari 2016, menurut *Syrian Observatory* Rusia membunuh setidaknya 57 orang melalui serangan udaranya di kota Maarat al-Numan, provinsi Idlib. Diduga korban tersebut adalah 23 anggota al-Nusra, disertai dengan 3 wanita dan 1 anak. Kontrol pemerintah terhadap Suriah semakin meluas dengan bantuan Rusia, diantaranya dengan mengambil alih kembali kota Rabia, kota besar terakhir

¹⁵⁵ Don Melvin, Michael Martinez, dan eynep Bilginsoy, "Putin calls jet's downing 'stab in the back'; Turkey says warning ignored", dalam <https://edition.cnn.com/2015/11/24/middleeast/warplane-crashes-near-syria-turkey-border/index.html>, diakses pada 10 Desember 2018.

¹⁵⁶ Anonim, "Russia blamed for deadly air strike in Syria's Idlib", dalam <https://www.aljazeera.com/news/2015/11/20-killed-russian-air-strike-syrian-market-151129082103978.html>, diakses pada 18 Desember 2018.

yang dikuasai oleh pemberontak di bagian barat provinsi Latakia pada tanggal 24 Januari.¹⁵⁷

Rusia melakukan penyerangan terhadap kota Aleppo, dimana hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata yang telah berlangsung beberapa hari, menyebabkan penundaan *peace talks* antara Russia dan AS. Kejadian tersebut menyebabkan ketegangan hubungan antara Rusia dan AS. Menanggapi kejadian ini juru bicara AS John Kirby menyatakan:

“The United States is suspending its participation in bilateral channels with Russia that were established to sustain the cessation of hostilities, ... This is not a decision that was taken lightly”

Namun juru bicara Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan bahwa:

“After failing to fulfil the agreements that they themselves worked out, they are trying to shift responsibility on to someone else, ... in the past few days [Russia had] taken efforts aimed at fulfilling the ceasefire deal, after it unravelled in acrimony ... It all essentially came down to a simple question - who are Jabhat al-Nusra, who is behind them, and why can't Washington fulfil its promise to divide the terrorists from the so-called moderate opposition”

2.2.2.2 Peacemaking

Sebelum melakukan intervensi senjata, Rusia telah berupaya menjadi mediator untuk meredam konflik di Suriah melalui jalur diplomasi. Salah satunya adalah proposal dialog informal yang diajukan Rusia kepada Suriah dan oposisi pada tahun 2012 yang telah diterima oleh Suriah namun ditolak oleh pihak oposisi mengaku tidak menerima undangan dan tidak ingin berdialog dengan presiden Suriah.

¹⁵⁷ Anonim, “Syria conflict: Major rebel town ‘seised’ in boost for Assad”, dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35395328>, diakses pada 20 Desember 2018.

Pada bulan awal Februari Rusia dan Cina menggunakan hak vetonya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB atas permintaan kepada Presiden Assad untuk turun dari jabatannya. Hal tersebut memicu ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat dalam menentukan masa depan Suriah. Posisi Rusia adalah bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Assad, namun melawan kelompok-kelompok bersenjata yang memanipulasi demonstrasi yang semula damai.¹⁵⁸

Dialog lainnya adalah pada 12 Februari dalam dialog bersama lima anggota permanen PBB yang dinisiasi oleh Martti Ahtisaari atas nama Liga Arab dan PBB. Pada kesempatan ini, Duta Besar Rusia Vitaly Churkin mengajukan tiga poin perencanaan, yakni tidak mempersenjatai pihak oposisi, menginisiasi dialog antara Assad dan oposisi, dan dengan melengserkan presiden Assad dengan cara yang baik. Namun rencana ini ditolak oleh AS, Inggris dan Perancis yang beranggapan bahwa kejatuhan Assad memang sudah pasti akan terjadi.¹⁵⁹

Pada bulan Maret Kofi Annan menginisiasi perencanaan damai berdasarkan inisiatif Liga Arab dan PBB. Ia mengajukan enam poin perdamaian, yang berisi:

(1) commit to work with the Envoy in an inclusive Syrian-led political process to address the legitimate aspirations and concerns of the Syrian people, and, to this end, commit to appoint an empowered interlocutor when invited to do so by the Envoy;

(2) commit to stop the fighting and achieve urgently an effective United Nations supervised cessation of armed violence in all its forms by all parties to protect civilians and stabilise the country.

To this end, the Syrian government should immediately cease troop movements towards, and end the use of heavy weapons in, population

¹⁵⁸ Laporan Rapat DK PBB, 4 feb 2012, <https://www.un.org/press/en/2012/sc10536.doc.htm>

¹⁵⁹ Julian Borger dan Bastien Inaurralde, "West 'ignored Russian offer in 2012 to have Syria's Assad step aside'", dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/west-ignored-russian-offer-in-2012-to-have-syrias-assad-step-aside>, diakses pada 5 Januari 2019.

centres, and begin pullback of military concentrations in and around population centres.

As these actions are being taken on the ground, the Syrian government should work with the Envoy to bring about a sustained cessation of armed violence in all its forms by all parties with an effective United Nations supervision mechanism.

Similar commitments would be sought by the Envoy from the opposition and all relevant elements to stop the fighting and work with him to bring about a sustained cessation of armed violence in all its forms by all parties with an effective United Nations supervision mechanism;

(3) ensure timely provision of humanitarian assistance to all areas affected by the fighting, and to this end, as immediate steps, to accept and implement a daily two hour humanitarian pause and to coordinate exact time and modalities of the daily pause through an efficient mechanism, including at local level;

(4) intensify the pace and scale of release of arbitrarily detained persons, including especially vulnerable categories of persons, and persons involved in peaceful political activities, provide without delay through appropriate channels a list of all places in which such persons are being detained, immediately begin organizing access to such locations and through appropriate channels respond promptly to all written requests for information, access or release regarding such persons;

(5) ensure freedom of movement throughout the country for journalists and a non-discriminatory visa policy for them;

(6) respect freedom of association and the right to demonstrate peacefully as legally guaranteed.

Melalui dialog tersebut terjadi kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Assad menerima keenam poin tersebut dan berjanji untuk melakukan pemindahan senjata-senjata berat dari kawasan padat populasi dan akan melakukan gencatan senjata selama 7 hari. Namun kesepakatan gencatan senjata dicerai oleh pihak pemerintah dan oposisi.

Kofi Annan peace talks kemudian berganti menjadi Konferensi Jenewa I yang diselenggarakan pada Juni 2012 membahas tentang transisi pemerintahan Suriah dengan kekuatan eksekutif penuh yang juga melibatkan pihak pemerintah dan oposisi. Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dengan tegas menyatakan bahwa Assad tidak bisa berada pada kursi pemerintahan, sedangkan Rusia tidak setuju terhadap hal tersebut.¹⁶⁰ Pada bulan November 2013, Rusia kembali menginisiasi dialog antara Suriah dan oposisi, namun upaya tersebut kembali gagal. Rusia menyatakan bahwa Presiden Assad memberikan sinyal positif terhadap dialog tersebut yang direncanakan akan dilakukan di Moscow. Permintaan dari oposisi untuk fokus dalam pembahasan masalah kemanusiaan juga telah disetujui. Namun dialog tersebut gagal karena negosiator Rusia dan AS tidak dapat menemui titik temu akan masa depan Suriah bersama atau tidak bersama Assad.¹⁶¹

Dewan Keamanan PBB berhasil meloloskan Resolusi 2254 yang berisi tentang gencatan senjata dan penyelesaian permasalahan politik di Suriah. Rusia kemudian berpartisipasi dalam *Viena talks* pada akhir bulan Oktober 2015 bersama dengan 20 menteri luar negeri dari berbagai negara yang tergabung dalam *International Syria Support Group (ISSG)*. Kesepakatan mengenai Assad tidak tercapai, namun negara-negara setuju untuk secepatnya diadakan gencatan senjata.

¹⁶⁰ Anonim, "UN envoy calls for transitional government in Syria", dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-18650775>, diakses pada 5 Januari 2019.

¹⁶¹ Oren Dorell, "Canceled Syria talks may get new start in Moscow", dalam <https://www.usatoday.com/story/news/world/2013/11/07/syria-peace-talks-chemical-weapons/3464091/>, diakses pada 5 Januari 2019.

Pada Perundingan Jenewa III pemerintah Suriah menolak untuk duduk bersama pemberontak di dalam satu ruangan yang sama. Pemberontak meminta kepada negara-negara penduduknya termasuk Turki dan Arab Saudi untuk mengirimkan senjata yang lebih kuat. Pada 12 Februari 2016 ISSG membentuk ISSG *task force* dibawah pengawasan PBB, dipimpin oleh Russia dan AS untuk menyelenggarakan gencatan senjata. Gencatan senjata dimulai pada 27 Februari pukul 00.00 waktu Damaskus. Pada tanggal 10 September 2016 Rusia dan AS kembali mencapai kesepakatan gencatan senjata pada 12 September dan setuju untuk tetap menyerang ISIS dan al-Nusra. Pada saat AS menyerang pasukan Suriah pada 17 September, maka pemerintah menyatakan gencatan senjata selesai.

Menurut perspektif Kementerian Luar Negeri RI, tindakan Rusia bersama-sama dengan Iran dan Turki dalam menjamin penyelesaian konflik dalam forum politik berdampak cukup besar bagi perkembangan dituasi konflik di Suriah. Pertemuan Astana yang diselenggarakan oleh ketiga negara tersebut di kota Astana, Kazakhstan menjadi salah satu forum mediasi yang memiliki hasil yang signifikan terhadap pertentangan pemerintah dan oposisi Suriah juga peran Rusia juga berdampak dalam eskalasi ketegangan Suriah dan Israel berkaitan dengan perannya sebagai mediator.¹⁶² Pada Pertemuan Astana I terjadi pertemuan antara pemerintah Suriah dan dua belas faksi pemberontak yang diselenggarakan dalam pertemuan informal. Pada forum tersebut, terjadi kerjasama antara Iran, Rusia, dan Turki dalam mengawasi jalannya Resolusi 2254. Setelah pertemuan tersebut Rusia menawarkan rancangan konstitusi untuk masa depan Suriah, dengan mengusulkan bentuk negara Republik sehingga pemerintahan terjadi secara desentralisasi dengan elemen-elemen federal yang kemudian ditolak oleh oposisi.

Pada Pertemuan Astana Februari 2017 membahas tentang mekanisme untuk memonitor gencatan senjata. Hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi dasar dari pembentukan operasi gabungan yang akan dibentuk oleh Rusia. Selain itu

¹⁶² Wawancara daring dengan Kementerian Luar Negeri RI Direktorat Timur Tengah Izza Maulida Muris, pada 12 November 2018.

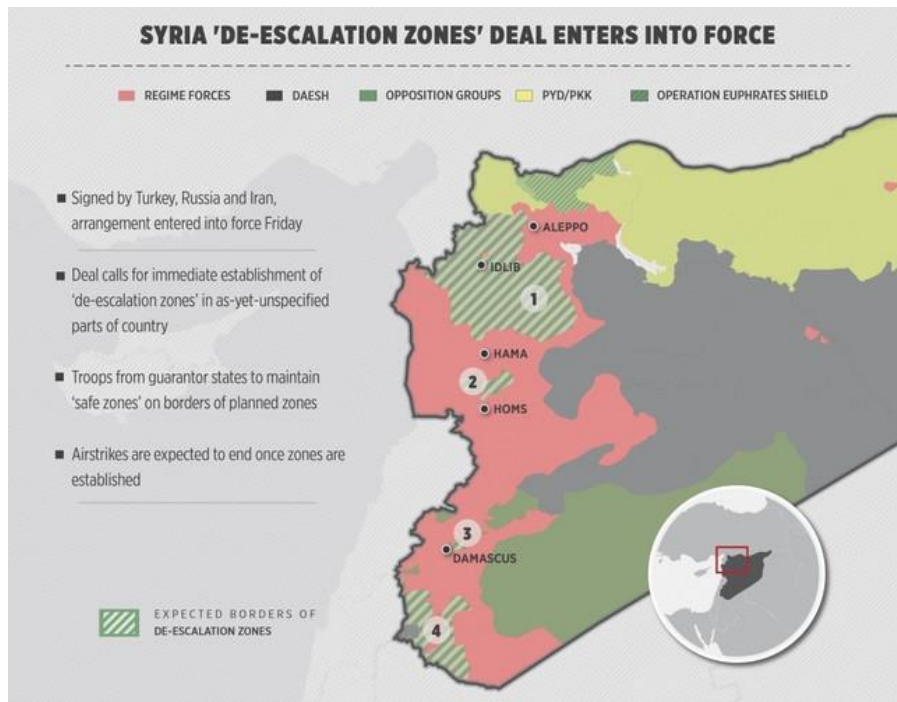
pembahasan mengenai pengembalian jasad kombatan, tahanan, serta wanita dan anak-anak juga dilakukan. Pada kesempatan tersebut, diplomat Suriah Bashar al-Jaafari mengkritisi tindakan Turki yang ‘membakar dan memadamkan api’ di Suriah. Pertemuan Astana pada Juli 2017 mendapat dukungan dari PBB dengan dihadirinya perwakilan dari perserikatan tersebut Staffan de Mistura sebagai apresiasi dari kemajuan dalam mengurangi kekerasan di Suriah. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa dibandingkan dengan diskusi Jenewa yang diperhadapkan dengan kompleksitas konflik di Suriah, diskusi Astana berfokus pada de-eskalasi.¹⁶³ Pada 9 Juli gencatan senjata dimonitor oleh AS, Rusia, dan Yordania yang kemudian dilanggar oleh kelompok oposisi pada 14 Juli di Suriah Selatan. Meskipun begitu, pada hari selanjutnya gencatan senjata kembali dilakukan.



Gambar 4.7 Cuitan Presiden AS Donald Trump menanggapi gencatan senjata di Suriah

Pada *Astana talks* September 2017 terjadi kesepakatan antara Iran, Turki, dan Rusia dalam implementasi empat zona de-eskalasi. Ketiga pihak setuju untuk mengalokasikan pasukannya untuk berpatroli di zona de-eskalasi yang ada di provinsi Idlib, Latakia, Hama, dan Homs. Zona tersebut akan dibentuk dalam kurun waktu 6 bulan.

¹⁶³ Press conference UNSC <https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2017-07-05/note-correspondents-transcript-press-conference-un-special>



Gambar 4.8 Zona de-eskalasi di Suriah

Pada *Astana talks* Oktober 2017 dialog berfokus pembahasan zona de-eskalasi yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga pada isu-isu kemanusiaan, yakni tawanan, tahanan perang, dan orang hilang. Pada pernyataan gabungan, Iran-Rusia-Turki menyatakan bahwa tidak ada solusi militer yang dapat ditawarkan selain dari Resolusi 2254. Menteri Luar Negeri Kazakh Kairat Abdrakhmaniv mengapresiasi keberhasilan zona de-eskalasi dalam mengurangi kekerasan dan mempertahankan gencatan senjata. Pada kesempatan tersebut perwakilan Putin menyatakan keinginannya untuk mengatur kongres nasional dan rekonsiliasi Suriah di kota Sochi, Rusia.

Astana talks Desember 2017 membahas tentang menyelesaikan perang yang telah berlangsung 7 tahun, serta krisis kemanusiaan seperti pembebasan tawanan, pengembalian jasad militan dan korban, serta pencaharian orang hilang. Oposisi Suriah mengharapkan pemerintah untuk berhenti berusaha merebut kota Homs. Mereka juga menuntut pembebasan tahanan dan tawanan, pembersihan

ranjau, serta inspeksi pelanggaran gencatan senjata di zona de-eskalasi serta persiapan kongres dialog nasional Suriah yang akan diadakan di Sochi.

Menurut perspektif Kementerian Luar Negeri RI, keberhasilan Rusia dalam mende-eskalasi konflik adalah kemauan negara tersebut untuk menciptakan suasana untuk mencari *win-win solution* dibandingkan dengan negara-negara barat yang cenderung pada penyelesaian *zero sum*, dengan strategi AS dan koalisi untuk memberantas terorisme melalui jalur-jalur yang cenderung anarkis.¹⁶⁴ Meskipun Rusia memiliki kepentingan untuk menjalin hubungan dengan Turki, namun kerjasama diplomasi diantara keduanya dapat memberikan hasil yang signifikan bagi proses perdamaian, khususnya dalam jalur-jalur diplomasi.

2.2.2.3 Peacebuilding

Pada tanggal 23 Februari 2016 Rusia dan Turki dengan persetujuan koalisi AS mendirikan Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suriah. Badan tersebut memiliki tujuan untuk mempercepat proses negosiasi perdamaian antara pemerintah dan kelompok-kelompok oposisi. Fungsi dari organisasi tersebut adalah pusat pemantauan dan informasi yang berkoordinasi dengan misi-misi kemanusiaan dan mengorganisasi pelaksanaan perhentian permusuhan dan gencatan senjata.

Organisasi tersebut berbasis di pangkalan udara Hmeymim dan terdiri dari 50 orang di dalam 5 kelompok: (1) kelompok analisis dan perencanaan; (2) kelompok negosiasi; (3) kelompok perjanjian dan kerjasama dengan organisasi internasional; (4) kelompok pendukung informasi; (5) kelompok bantuan kemanusiaan untuk populasi Suriah. Upaya tersebut menjadikan dua lokasi padat penduduk di Suriah bagian selatan, Inkhil dan Naba al-Fawwar menandatangani perjanjian penghentian permusuhan diikuti dengan gencatan senjata. Dalam pelaporan hariannya, perjanjian tersebut ditandatangani oleh 65 kelompok.

¹⁶⁴ *Ibid.*

Anggota-anggota badan lainnya berusaha untuk mencapai kesepakatan perdamaian dan rekonsiliasi di berbagai provinsi.

Badan tersebut melakukan misi bantuan kemanusiaan diantaranya 10 misi dalam 24 jam dengan memberikan 5 ton bantuan kepada 1400 masyarakat Suriah di Damaskus pada bulan Mei 2016 dan pemberian 1.5 ton bantuan kemanusiaan kepada 300 keluarga pengungsi di Aleppo pada bulan Oktober 2016. Menurut Menteri Pertahanan Rusia, hingga Oktober 2016 badan rekonsiliasi telah mengirimkan 683 ton bantuan kemanusiaan dan obat-obatan di provinsi Latakua, Daraa, Deir ez-Zor, Aleppo, dan Damaskus.¹⁶⁵

Kepala Badan Rekonsiliasi Letnan Jenderal Vladimir Savchenko menyatakan bahwa kondisi di Suriah sudah siap untuk transformasi konflik, dalam wawancaranya ia menyatakan:

“People are fed up with war. Even militants are: they want to lay down their arms and start living a peaceful life again. All conditions for solving this problem and returning a peaceful life in Syria have been met There is a legal base – it allows people to claim their peaceful life back. But efforts should be intensified. Only then, I think, peace will return to Syria ... “

Pada tanggal bulan Desember 2016, sebanyak 360 militan pemberontak telah menggantung senjata dan meninggalkan area insurgensi dalam 24 jam. Presiden Suriah menyatakan akan memberikan amnesti kepada anggota pemberontak yang kembali kepada Republik Suriah tersebut. Selanjutnya pada bulan Januari 2017 sebanyak 10 kelompok pemberontak di provinsi Hama telah menandatangani perjanjian perhentian permusuhan, maka jumlah total kelompok pemberontak yang telah menandatangani hingga pada bulan tersebut adalah 104 kelompok.

¹⁶⁵ Anonim, “Russia delivers 1.5 metric tons of humanitarian aid to Aleppo, Syria”, dalam <https://sputniknews.com/middleeast/201610011045894845-russia-humanitarian-aid-syria/>, diakses pada 6 Januari 2019.

Pada bulan yang sama badan Rekonsiliasi memberikan bantuan kemanusiaan kepada 120.000 masyarakat sipil di Damaskus berupa makanan, pasokan air, dan obat-obatan. Bulan selanjutnya, badan Rekonsiliasi kembali mengirimkan 5 ton bantuan kemanusiaan di Aleppo, dikirimkan ke sekolah, taman kanak-kanak, dan masjid. Anak-anak di provinsi Latakia menerima peralatan sekolah, serta pemberian 3.5 ton bantuan kemanusiaan kepada daerah Kumkhana setelah penandatanganan perjanjian damai. Sebanyak 12 ton total makanan dikirimkan di kota Aleppo dan desa Shinshar di provinsi Homs.

Bekerja sama dengan UNICEF, normalisasi sekolah akan dilakukan dan sebanyak 6,500 anak-anak Suriah telah kembali ke sekolah di Aleppo bagian timur. Pada bulan-bulan berikutnya badan Rekonsiliasi terus mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada daerah-daerah di Suriah dan memfasilitasi pendistribusian bantuan kemanusiaan PBB di negara tersebut. Badan rekonsiliasi melaporkan pembuatan video penyerangan dengan senjata kimia yang direkayasa oleh Al-Jazeera di Idlib. Namun hal tersebut dibantah oleh media berbasis di Qatar tersebut. Badan rekonsiliasi juga memfasilitasi pengungsi untuk kembali ke rumah, menurut data PBB sebanyak 500.000 pengungsi telah kembali.

2.3 Pembahasan Hasil

2.3.1 Pembahasan Kekerasan di Suriah

2.3.1.1 Tipologi Konflik

Tipologi konflik Suriah berubah-ubah sesuai dengan perkembangan eskalasi konflik dan keterlibatan aktor-aktor yang mengubah bentuk konflik. Galtung membagi aktor menjadi dua, yaitu aktor negara dan non negara yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kapasitasnya menjadi kuat dan lemah seperti yang terlihat dalam tabel 2.1.

Pada tahapan awal melonjaknya unjuk rasa dan demonstrasi terhadap Assad, yang kemudian diresponi dengan kekerasan melalui penahanan aktifis politis, hingga munculnya korban jiwa. Perkembangan konflik memungkinkan pembentukan angkatan-angkatan bersenjata yang menjadi tahap awal

pemberontakan seperti terbentuknya FSA dan mulai terorganisirnya militant Kurdi. Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kategori negara kuat melawan non-negara lemah sehingga tipologi dalam konflik pada tahapan tersebut adalah **penindasan** maupun **terorisisme negara**.

Namun terbentuknya kelompok-kelompok teroris ke dalam oposisi negara serta semakin berkembangnya kelompok-kelompok pemberontak pada tahun 2012-2013 memperkuat posisi aktor non-negara yang semula lemah menjadi lebih kuat dari negara. Hal ini terlihat dari keberhasilan kelompok pemberontak dan teroris dalam mengambil alih kota hingga provinsi di Suriah, seperti penguasaan pangkalan militer Taftanaz oleh al-Nusra, penguasaan kota Raqqa oleh YPG, serta perluasan wilayah ISIS di berbagai provinsi di Suriah. Hal tersebut mengubah pola konflik, yang semula penindasan oleh negara menjadi perlawanan antara aktor non-negara kuat melawan negara lemah sehingga pada tahapan ini tipologi konfliknya adalah **perang sipil** hingga **penertrasi** atau **memiliham** karena aktor non-negara mampu menembus sistem pemerintahan, kepemilikan dan militer hingga faktor-faktor ekonomi dan sosial budaya.

Selain dari perang antar pihak negara dan oposisi, terjadi perang antar faksi-faksi ataupun kelompok teroris yang bersaing untuk menguasai negara. Pada masa ini terjadi pertempuran antar kelompok ekstrimis Islam hingga koalisi pemberontak melawan kekuasaan ISIS yang memuncak di tahun 2014. Namun peperangan antara aktor non-negara tidak dijelaskan oleh Galtung, yang pada saat jurnalnya ditulis (1986) konflik seperti ini masih belum banyak terjadi. Namun pada fase ini tipologi konflik berada pada wilayah berwarna putih pada tabel 1.

Intervensi internasional yang terlibat dalam perang ini terbagi menjadi dua kubu, pro pemerintah dan oposisi. Keterlibatan internasional menjadi salah satu faktor terbesar perubahan tipologi konflik seiring dengan perannya dalam memperkuat kapasitas, baik kelompok pemerintah maupun oposisi. AS dan koalisi memperkuat pihak oposisi dan Rusia dan koalisi memperkuat pihak pemerintah. Intervensi Rusia menyebabkan penguatan kekuatan pemerintah terjadi secara

signifikan sehingga pada tahapan ini **penetrasi** hingga **represi** terjadi kembali kepada kelompok-kelompok oposisi, khususnya kelompok teroris ISIS dan al-Nusra.

2.3.1.2 Segitiga Konflik Johan Galtung

Kekerasan menurut Galtung dibagi menjadi tiga, yakni kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Kekerasan langsung termanifestasi dalam kegiatan perang, pembunuhan dan tindakan kekerasan fisik lainnya. Kekerasan langsung dalam konflik Suriah merupakan kekerasan yang mendominasi kekerasan-kekerasan lainnya dengan tingginya intensitas perang, baik antar kelompok pemerintah dan oposisi, maupun sesama faksi oposisi.

Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung yang terjadi di Suriah tereskalasi dari waktu ke waktu. Hal ini dimulai dari kerusuhan sipil yang terjadi pada tahun 2011, dimana masyarakat melakukan demonstrasi dengan damai. Namun hal tersebut diresponi oleh pemerintah dengan penahanan mahasiswa dan aktifis. Represi terus dilakukan hingga terjadi kerusuhan massa yang mengakibatkan korban jiwa pada kegiatan-kegiatan demonstrasi dan menyebabkan protes semakin tersebar di berbagai provinsi. Kekerasan langsung yang terjadi di Suriah sangat beragam dengan intensitas yang ekstrim. Hal ini dapat terlihat dari bentrokan masa yang terjadi pada awal konflik dengan korban jiwa belasan orang. Yang kemudian sangat cepat berkembang karena ketidakmampuan pemerintah untuk menangani hal tersebut. Kegagalan pemangku kepentingan menjadikan situasi semakin rawan di Suriah.

Situasi yang tidak stabil menyebabkan masyarakat dengan mudah membentuk militan bersenjata. Demonstrasi berubah menjadi konflik bersenjata, diantaranya antara tentara Suriah melawan FSA, al-Nusra, YPG, serta kelompok-kelompok lainnya yang bermusuhan maupun yang berkoalisi. Korban jiwa pada setiap pertempuran menjadi semakin besar, termasuk korban sipil. Kelompok-kelompok terus berkembang maupun terpecah secara dinamis dikarenakan persamaan maupun perbedaan ideologi dan kepentingan diantaranya. Selanjutnya

kekerasan langsung berkembang menjadi perang sipil dengan semakin aktifnya angkatan bersenjata lainnya melakukan penyerangan untuk mengambil alih wilayah-wilayah di Suriah. Dengan semakin besarnya kekuatan oposisi maka pertempuran antar pemberontak terjadi dan tidak jarang menyebabkan korban sipil. Kekuatan ISIS semakin tidak terbendung sehingga menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan oposisi dengan kekuatan negara.

Kekerasan langsung yang terjadi pada fase tersebut juga sangat kompleks. Bukan sekedar oposisi melawan pemerintah, namun antar kelompok-kelompok oposisi juga terjadi pertentangan. Pertarungan antara kelompok-kelompok ekstrimis Islam seperti FSA dan al-Qaeda, maupun FSA dengan al-Nusra terjadi di berbagai kota. Kompleksitas semakin tinggi dengan adanya perpecahan dan koalisi yang terjadi di dalam kubu oposisi. Seperti adanya koalisi “Front Selatan” di provinsi Daraa dan Koalisi Nasional Suriah.

Koalisi-koalisi tersebut kemudian melakukan pertempuran. Dengan penggabungan kekuatan kelompok-kelompok bersenjata maka bentrokan yang terjadi mengakibatkan kerusakan fisik yang semakin besar dengan intensitas yang tinggi. Penguatan kelompok akibat keberhasilan menguasai daerah maupun sumber daya memudahkan kelompok tersebut membentuk koalisi baru untuk memperluas kekuasaan. Contohnya FSA setelah berhasil merebut “bukit PBB” atas al-Nusra membuat koalisi baru untuk menandingi Koalisi Selatan.

Koalisi dengan anggota yang organisasi yang sama juga terlibat dalam pertarungan, seperti yang terjadi di Aleppo antara koalisi Jaysh al-Thuwar yang didominasi oleh FSA melawan al-Nusra dan koalisi *Marea Operations Room* yang juga didominasi oleh FSA bersama dengan YPG. Selain koalisi kelompok-kelompok ekstrimis ini juga membentuk anak kelompok maupun afiliasi. Seperti kelompok *al-Rahman Legion* yang berafiliasi dengan FSA, *Nothern Storm Brigade* yang merupakan anak kelompok FSA di kota Azaz, dan al-Nusra yang berafiliasi dengan al-Qaeda. Pemutusan afiliasi pun terjadi beberapa kali di dalam tubuh oposisi,

seperti al-Qaeda yang memutuskan afiliasi dengan pemutusan afiliasi dengan ISIS pada tahun 2014 disusul pemutusan afiliasi dengan al-Nusra pada tahun 2015

Kekerasan langsung juga terjadi di dalam tubuh organisasi pemberontak. Pertarungan tidak hanya terjadi antar kelompok, tetapi juga intra kelompok seperti pertaringan antara FSA berbasis di Turki dan FSA berbasis di Suriah yang terjadi di perbatasan Turki. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi internasional juga turut berkontribusi dalam kekerasan langsung di Suriah. Kepentingan nasional negara-negara tersebut menjadikan situasi di Suriah menjadi semakin tidak stabil, terutama dengan penguatan kelompok oposisi yang dilakukan oleh koalisi AS serta pertarungan-pertarungan yang terjadi di wilayah perbatasan.

AS dalam intervensinya mengundang Koalisi Nasional Suriah untuk menyepakati misi luar negeri dalam memberantas al-Qaeda. Hal ini dilakukan dengan melakukan pendanaan, pemasokan senjata, dan pelatihan kepada kelompok-kelompok tersebut. Dengan alat-alat tempur FSA merupakan senjata buatan AS dan Israel, diduga kedua negara tersebut memasok senjata kepada organisasi tersebut dan organisasi-organisasi oposisi lainnya. Gerakan AS untuk membentuk koalisi internasional untuk melawan ISIS menyebabkan adanya ketegangan keduanya di Suriah, dimana memperluas cakupan kekerasan langsung di negara Suriah.

Intervensi secara langsung dilakukan oleh Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Jordan yang bekerjasama dengan koalisi Internasional AS untuk melumpuhkan ISIS. Lebanon terlibat dengan keterlibatan pasukan Hezbollah dalam upaya mendukung pemerintah. Turki berada pada posisi tengah-tengah secara aktif mendukung FSA dengan memberikan tempat perlindungan di negaranya serta menginginkan pergantian kepala negara, namun selanjutnya Turki merapat kepada koalisi Rusia khususnya pada tahapan peacemaking dan peacebuilding. Keterlibatan asing dengan kepentingannya masing-masing memperparah kekerasan di Suriah dengan tingginya intensitas penyerangan seiring dengan peningkatan kapasitas.

Galtung menyatakan bahwa kekerasan langsung adalah kekerasan yang paling tidak stabil. Hal ini dapat terlihat dari kecepatan eskalasi dan de-eskalasi dalam konflik di Suriah. Pembahasan sebelum intervensi Rusia, kekerasan sangat cepat berkembang dari kekerasan fisik individu, kelompok masyarakat, kelompok bersenjata, hingga terorisme yang memakan ratusan ribu korban jiwa. Segitiga ini merupakan mata rantai yang jika tidak terputus akan semakin besar konfliknya, karena kekerasan langsung bergantung pada kekerasan kultural dan struktural pada saat yang bersamaan kekerasan langsung juga memperkuat kekerasan kultural dan struktural.

Kekerasan Struktural

Kekerasan langsung mudah terdeteksi dengan kehadiran tindakan kekerasan fisik yang terjadi. Namun konflik laten yang juga merupakan pertentangan antar pihak-pihak yang berkonflik lebih sulit untuk dideteksi karena kehadirannya tidak terlihat langsung sebagai kekerasan yang menciderai. Didefinisikan sebagai kekerasan yang disebut ketidakadilan dan ketidakpersamaan yang terjadi di masyarakat, kekerasan struktural sebagai kekerasan yang mengakar telah hadir jauh sebelum terjadinya perang sipil Suriah tahun 2011.

Pengekangan opini dan informasi telah terjadi semenjak pemerintahan Hafez al-Assad. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kekuasaannya, yang kemudian dilakukan kembali oleh anaknya Bashar dalam estafet kekuasaan pemerintahannya. Meskipun Bashar melakukan modernisasi serta kompromi kelonggaran informasi, namun aktifis tetap menjadi tahanan politik dan media dikontrol secara ketat oleh pemerintah. Kesetaraan antara pria dan wanita yang awalnya dijanjikan juga tidak mendapatkan pencerahan.

Meskipun ekonomi mampu direvolusi oleh Bashar, nepotisme memperparah okigarki. Hal ini ditunjang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat Suriah dengan tingkat pengangguran yang mencapai 10% pada tahun 2003-2011. Pertentangan laten menjadi semakin kuat di tubuh masyarakat Suriah.

Selain faktor internal, politik internasional yang dimainkan oleh Assad menjadikan negaranya menjadi musuh negara terbesar, AS. Hal tersebut menjadikan Assad semakin sulit mengembangkan ekonominya dengan sanksi internasional yang diderita akibat keputusan politis pemerintahan tersebut.

Pada masa perang, ekonomi Suriah turun sehingga tiga juta masyarakat kehilangan pekerjaannya dan 80% hidup dalam kemiskinan dan 40% anak-anak kehilangan pendidikan. Pengungsi yang berada diluar wilayah Suriah pun tidak mendapatkan penghidupan yang layak dengan tidak tersedianya kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Hal-hal tersebut adalah konflik yang disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan ketidakseimbangan kesempatan dalam mendapatkan akses yang sama. Kerusakan yang diakibatkan tidak berakibat secara fisik namun melalui ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan-kebutuhan dasar. Hal ini terbukti terjadi cukup stabil di sepanjang pemerintahan keluarga Assad.

Kekerasan Kultural

Kekerasan laten lainnya adalah kekerasan kultural, yakni kekerasan yang melibatkan aspek-aspek budaya untuk melegitimasi kekerasan langsung. Dalam konflik Suriah kekerasan kultural terjadi bersamaan dengan pembentukan budaya negara tersebut. Suriah tidak memiliki sistem kenegaraan yang matang dikarenakan warisan dari Prancis tidak memberikan sistem parlemen yang kuat dan hanya mementingkan kekuatan militer. Hal tersebut menyebabkan awal kemerdekaan Suriah dipenuhi dengan kudeta dari tahun 1949 hingga 1970.

Warisan kerajaan Ottoman juga mengakibatkan persekusi dan diskriminasi pada kelompok agama minoritas. Pada masa tersebut sekte-sekte minoritas menempati wilayah-wilayah terpencil. Meskipun pada pemerintahan Assad tidak dilakukan diskriminasi terhadap agama minoritas, namun hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kekuasaannya sehingga tidak ada pembudayaan toleran yang kuat diantara masyarakat. Kewaspadaan terjaga agar

kelompok sekte yang lainnya tidak menguasai status quo, serta pemisahan antara Sunni dan Syiah sangat kuat di dalam dunia Arab. Keinginan oposisi untuk memiliki pemimpin Sunni setelah 40 tahun dipimpin oleh etnis minoritas menandakan tidak ada rasa persatuan yang kuat antar masyarakat Suriah.

Diskriminasi dilakukan terhadap masyarakat Kurdi dengan melarang adanya identitas Kurdi serta akses untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak sama dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menjadikan Kurdistan sangat mudah memalingkan wajah dari pemerintah pada perang sipil, menjadi sebagai salah satu kelompok bersenjata oposisi yang terkuat di Suriah.

Faktor eksternal menjadi pendorong yang kuat bagi masyarakat dengan adanya tren *Arab Spring* yang terjadi di Tunisi, Libya dan Mesir. Melihat masyarakatnya melakukan protes terhadap pemimpin-pemimpin yang otoriter, masyarakat Suriah kemudian terinspirasi untuk melakukan hal yang sama berkaca pada pemimpin otoriter yang telah keluarganya telah memerintah selama 40 tahun.

2.3.2 Pembahasan Intervensi Rusia

2.3.2.1 Legitimasi Keterlibatan Rusia dalam Konsep *Collective Self-Defense*

Dasar keterlibatan Rusia di Suriah merupakan tindakan *Collective Self-Defense* yang dilakukan tanpa menciderai kedaulatan negara lain. Dalam hal ini Bashar al-Assad meminta dukungan militer kepada Rusia dalam rangka pemberantasan teroris di negaranya. Presiden Putin menyatakan legitimasinya atas eksistensi Rusia di Suriah dan lebih lanjut menegaskan bahwa kehadirannya bukan intervensi melainkan mendukung berakhirnya konflik di Suriah.

Rusia telah memenuhi persyaratan legitimasi, yakni dengan mendapatkan persetujuan dari negara tuan rumah dan pemimpin negara secara hukum merupakan pimpinan yang sah atas negara tersebut. Meskipun mendapatkan penolakan yang masiv di negaranya, Presiden Assad masih merupakan pemimpin yang legal dan diperbolehkan untuk meminta dukungan negara lain atas

penggulungan konflik di Suriah. Hal ini berbanding terbalik dengan kehadiran negara-negara lain di Suriah yang tidak memiliki legitimasi hukum internasional. AS yang sebelumnya telah kalah dalam kasus Nikaragua v. Amerika Serikat melalui upaya intervensi dengan melatih, mempersenjatai, melengkapi, membiayai, memasok pasukan oposisi telah dinyatakan melanggar Hukum Kebiasaan Internasional. Tindakan yang sama dilakukan di Suriah melalui keterlibatannya terhadap penguatan pasukan oposisi dengan dasar pembelaan diri kolektif.

Terlebih AS membentuk koalisi internasional untuk melakukan misinya dalam memberantas terorisme dengan melibatkan negara-negara NATO, Arab, serta negara lainnya untuk melumpuhkan ISIS. Kehadiran maupun keterlibatan negara-negara tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip non-intervensi. Pembeneran tindakannya dengan alasan untuk memperjuangkan kemanusiaan menggunakan *responsibility to protect* tidak memiliki dasar hukum apapun. Begitu juga dengan keinginan negara-negara untuk melengserkan Assad dari kursi kepemimpinan tidak dapat dilakukan tanpa kepemilikan hukum dan politik yang sah.

2.3.2.2 Resolusi Konflik dalam Segitiga Perdamaian Johan Galtung

Sebagaimana telah dijelaskan, konflik bukanlah hanya sekedar kekerasan yang terlihat namun merupakan sesuatu yang mengakar. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak berhenti pada ketiadaan kekerasan, melainkan mentransformasi kekerasan ataupun potensi kekerasan menjadi damai. Penyelesaian konflik secara menyeluruh ditawarkan melalui teori segitiga perdamaian yang menjadi terapi bagi segitiga kekerasan. *Peacekeeping* yang merupakan intervensi kekuatan bersenjata berdoktrin perdamaian adalah alat untuk menghentikan kekerasan langsung, kemudian *peacemaking* menjadi obat bagi kekerasan kultural dengan menghilangkan residu kebencian maupun *prejudice* sebagai pintu masuk untuk transformasi konflik, dan yang terakhir *peacebuilding* yaitu tahapan membangun antibodi yang kuat untuk menangkal potensi konflik.

Sebagai pihak yang terlegitimasi dalam konflik di Suriah, maka kehadiran Rusia sebagai 'juru damai' di Suriah memiliki kelebihan dalam membangun perdamaian dibandingkan dengan upaya-upaya perdamaian internasional yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip hukum. Maka kerangka perdamaian yang akan dianalisis adalah upaya Rusia dalam meresolusi konflik yang terjadi di Suriah dalam tiga pendekatan perdamaian diatas.

Peacekeeping

Seiring dengan besar dan luasnya intensitas serta cakupan kekerasan langsung yang terjadi di Suriah, maka sebagian besar tindakan perdamaian Rusia juga merupakan tindakan intervensi bersenjata. Dalam devinisinya, *peacekeeping* merupakan intervensi kekuatan bersenjata yang tidak berdoktrin pada kekerasan. Karena model *peacekeeping* Rusia tidak sama dengan PBB, yakni penggunaan senjata secara pasif dan tidak bertujuan untuk menghancurkan, maka peneliti melihat efektifitas *peacekeeping* Rusia melalui penurunan eskalasi dan bagaimana operasi tersebut mampu mengatasi konflik, baik vertikal dan horizontal.

Dalam intervensi senjatanya pengaruh Rusia terhadap perang di Suriah dalam kurun waktu sekitar 2 tahun terbagi dalam dua kategori: intervensi yang mende-eskalasi dan intervensi yang mengeskalasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai tindakan Rusia dapat dikategorikan sebagai peredam kekerasan langsung yang mampu menurunkan tensi konflik yang terjadi namun juga berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan langsung dengan indikator kerusakan yang terjadi diluar tujuan operasi damai Rusia yakni untuk memberantas terorisme. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan-tindakan diluar pemberantasan terorisme di Suriah tidak mendapatkan legitimasi hukum.

Intervensi Rusia dimulai pada 30 September 2015 dengan misi mengalahkan kelompok teroris yang ada di Suriah. Kelompok-kelompok yang digolongkan sebagai kelompok teroris adalah ISIS dan Jabhat al-Nusra. Hubungan baik antara Rusia

dengan Suriah sudah terjalin sejak perang dingin, maka Rusia sudah memiliki pangkalan militer yaitu Khmeimim di Suriah. Namun karena kondisi ekonomi Rusia yang tidak memumpuni maka pangkalan tersebut telah lama tidak aktif. Menanggapi permintaan Assad maka Rusia melakukan modernisasi terhadap pangkalan militernya, khususnya Khmeimim yang menjadi markas utama bagi militer Rusia di Suriah. Rusia melakukan intervensi secara langsung, dengan mengirimkan pasukan udaranya sebagai pasukan pendukung bagi tentara nasional Suriah, hal ini berbeda dengan intervensi AS yang lebih banyak mendukung melalui pelatihan, penyokongan, dan pembiayaan. Maka kehadiran Rusia secara fisik menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap perang yang terjadi di Suriah.

Dalam operasinya, Rusia bekerja sama dengan tentara nasional menyokong penyerangan udara, yang selanjutnya dilanjutkan oleh tentara nasional dalam operasi darat. Hal ini terlihat dari jumlah pesawat tempur yang dikirimkan dari pangkalan tersebut berjumlah 59 unit yang digunakan untuk pengeboman udara seperti di kota Idlib untuk menguasai kota tersebut, juga pengeboman terhadap markas ISIS dan al-Nusra di berbagai tempat serta penggepungan dengan menyokong serangan udara terhadap markas-markas teroris. Intensitas penyerangan yang dilakukan sangat tinggi sehingga dalam waktu 24 jam Rusia mampu melakukan pengeboman pada 9-11 titik ISIS dan al-Nusra di berbagai tempat.

Selain menggunakan pesawat tempur, Rusia juga menyokong tentara nasional Suriah melalui serangan laut dengan melancarkan misil dari laut Caspian dan Mediterania untuk menghancurkan target-target teroris, Intensitas penyerangan yang sangat tinggi hingga 60 penyerangan perhari mampu mengalahkan 24 titik ISIS dalam 24 jam. Presiden Putin pada kunjungannya ke Khmeimim menyatakan bahwa Rusia telah berhasil dalam misi pemberantasan teror di Suriah dan akan memulai penarikan pasukan. Pernyataan ini berdasar pada klaim bahwa intervensi Rusia telah berkontribusi pada penguasaan pemerintah atas 88% wilayah Suriah yang sebelumnya dikuasai oleh kelompok teroris. Selain serangan udara dan laut, misi

peacekeeping Rusia juga mencakup pembersihan ranjau pada kota-kota seperti Palmyra, Aleppo, dan Deir ez-Zor. Rusia bersama dengan koalisi Iran dan Turki berhasil membuat *safe zones* di wilayah Idlib, Aleppo, Latakia, dan Hama dengan pengawasan polisi militer Rusia.

Namun seiring dengan melemahnya kekuatan teroris dan kembali berkuasanya pemerintah atas wilayah-wilayah di berbagai provinsi, Rusia juga melakukan operasi untuk memerangi oposisi yang terjadi di Hama, Latakia, Idlib, Hims dan Deraa. Tempat pelatihan dan gudang amunisi oposisi juga dijadikan sasaran, hingga wilayah kekuasaan oposisi direbut oleh militer Rusia, seperti yang terjadi di Idlib dengan pengeboman di markas oposisi Jaish al-Fatah. Berbagai penyerangan juga dilakukan di wilayah padat penduduk dan menyebabkan tewasnya korban sipil, termasuk wanita dan anak-anak di kota Ariha. Penyerangan terhadap ISIS untuk mengambil alih wilayah kekuasaan juga berdampak pada kerusakan fasilitas umum. Namun hal tersebut juga merupakan perdebatan karena banyaknya fasilitas umum seperti rumah sakit yang dijadikan markas teroris, dan menurut hukum internasional hal tersebut disahkan menjadi target militer. Selain itu kehadiran Rusia dan AS di Suriah menciptakan ketegangan internasional di wilayah Suriah, dimana hal tersebut menghambat proses perdamaian yang seharusnya terjadi.

Peacemaking

Galtung menyatakan bahwa penyelesaian konflik haruslah pada sumbernya, dengan cara tersebut maka perang akan terhenti dengan sendirinya. Namun pada kenyataannya ketika perang tersebut terhenti masih ada residu kebencian atau konflik internal yang terjadi, yang sewaktu-waktu dapat menjadi penyebab terjadinya perang kembali. Penyelesaian konflik bukanlah menghindari terjadinya perang, tetapi mentransformasi ketidaksamaan dan kontradiksi yang menghambat terjadinya proses damai. Untuk itu maka pendekatan *peacemaking* berfokus pada tujuan masing aktor yang menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Ketidakmampuan masing-masing untuk mengejar kepentingannya yang sering kali sudah terkristalisasi sehingga sangat sulit untuk dikompromikan. Hal ini tercermin

dari kepentingan dinasti Assad dalam mempertahankan kekuatannya hingga meniadakan kebebasan dan keadilan di masyarakatnya. Keinginan masyarakat untuk keluar dari hegemoni otoriter juga menjadi semakin kuat seiring bertambah banyak faktor-faktor yang mendukungnya.

Meskipun kekerasan langsung telah berkurang dengan upaya *peacekeeping*, namun residu kebencian antara oposisi dan pemerintahan tetap kuat dengan kebuntuan upaya perdamaian yang diusulkan oleh PBB melalui Kofi Annan dan Konferensi Jenewa dengan keengganan kedua pihak untuk duduk bersama-sama dan gagalnya upaya gencatan senjata yang diusulkan di dalam *peacetalks*. Namun hal lainnya yang menghambat jalannya negosiasi adalah kepentingan negara-negara lain dalam konflik Suriah dimana perdebatan terjadi dalam mempertahankan maupun melengserkan Assad dari kursi kepresidenan. Dalam negosiasi konflik bentuk yang ideal adalah dengan menghilangkan pertentangan, namun pada kenyataannya tidak semua aktor konflik mau untuk mengkompromikan tujuannya. Hal yang dilakukan adalah dengan menghilangkan tujuannya atau pada tahapan yang paling ekstrim adalah menghilangkan aktornya. Hal yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik adalah mengubah aktor konflik dan sistem konflik yang digunakan sesuai dengan jenis-jenis konflik dan aktor yang berbeda.

Dalam sistem konflik pada tabel 2.2, semakin tinggi angkanya maka semakin dramatis kemungkinan yang terjadi. Pada konflik Suriah, resolusi konflik yang digunakan beragam sesuai dengan perkembangan konflik. Ketika kekerasan langsung memuncak dengan dominasi kelompok-kelompok teroris, ekstrimis serta tentara nasional Suriah maka cara yang digunakan adalah **eliminasi** melalui *peacekeeping*. Meskipun pertentangan masih ada namun dengan mengeliminasi kelompok-kelompok teroris menjadikan pemerintah Assad dan kelompok oposisi mampu mengejar tujuan yang diinginkan untuk mengakhiri konflik. Dengan hilangnya ISIS maka penyelesaian konflik dapat berlanjut ketahap berikutnya, yakni antara pihak pemerintah dan oposisi. Meskipun dianggap sebagai alternatif terakhir, namun mengeliminasi baik secara fisik, sosial, maupun geografis dapat dijadikan

alternatif yang lebih baik dibandingkan dominasi jika penindasan sudah terjadi secara sangat destruktif, dapat dilihat pada dominasi ISIS dan al-Nusra yang menimbulkan ratusan ribu korban jiwa, ekonomi, hingga teritori.

Konflik yang telah berskala luas seperti di Suriah tidak mudah untuk diubah sistemnya, maka hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan **trading** dan **multilateralisme**, dengan aktor negosiator yang kuat, memiliki kapasitas untuk mengubah permainan sedikit untuk mengurangi pertentangan antar aktor. Hal ini dilakukan dalam upaya *peacemaking* yang diinisiasi oleh Rusia bersama dengan Turki dan Iran dengan menyelenggarakan pertemuan informal yang berhasil mempertemukan pihak pemerintah dan faksi pemberontak untuk pertama kalinya melalui *Astana talks*. Melalui pertemuan Astana mulai terjadi dialog yang beragam antar pihak pemerintah dan oposisi yang berimplikasi langsung pada penurunan kekerasan di Suriah dengan keberhasilan gencatan senjata. Pada dialog ini juga dibentuk zona de-eskalasi dan mekanisme dalam monitornya serta isu-isu kemansusiaan diikuti dengan solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Perlibatan Kazakhstan sebagai tempat diselenggarakan dialog sebagai pihak yang netral juga mendukung jalannya dialog. Hal ini tidak terjadi ketika dialog dilakukan di Sochi, Rusia yang diikuti dengan penolakan pihak oposisi untuk melakukan perundingan.

Keberhasilan negosiasi Astana membuka pintu untuk tahap **disintegrasi**, yang akan terlaksana pada proses *peacebuilding* Rusia dengan penandatanganan perjanjian tidak bermusuhan antara kelompok-kelompok oposisi dengan pemerintah. Hal tersebut memperkuat posisi pemerintah di Suriah dan memulai proses normalisasi di Suriah.

Peacebuilding

Peacebuilding merupakan tahapan untuk membentuk sistem yang sehat sehingga pihak-pihak tidak membutuhkan perjanjian ataupun hukum untuk menciptakan perdamaian. Melalui model peacebuilding oleh Johan Galtung terdapat

6 tahapan dalam pembangunan damai positif. Rusia membangun Pusat Rekonsiliasi, dimana badan tersebut memantau dan mengorganisir proses integrasi kelompok-kelompok pemberontak terhadap pemerintah melalui perjanjian damai. Meskipun masih dibutuhkan perjanjian untuk menghentikan kekerasan langsung di Suriah, namun badan tersebut mengimplementasikan proses peacemaking yang berada pada tataran elit kepada masyarakat secara langsung. Lembaga tersebut meskipun bukan lembaga suprastuktur mutlak yang berkedudukan di atas pihak-pihak yang bertikai, namun keterlibatan negara-negara kuat seperti Rusia, Iran, Turki disertai perjanjian dengan AS menjadikan badan tersebut mampu untuk menanggulangi konflik.

Keterlibatan aktor-aktor internasional memang sebagian besar mengeskalasi kekerasan fisik, namun dalam hal penyelesaian aktor-aktor internasional justru dibutuhkan untuk memoderasi kepentingan pihak pemerintah dan oposisi. Dalam hal ini Rusia dan koalisi sebagai pihak penjamin perdamaian cukup berdampak pada keseluruhan proses resolusi konflik di Suriah. Pertemuan Astana yang mampu mempertemukan kelompok pemerintah dan oposisi menjadikan aktor-aktor yang terlibat menjadi beragam. Keterlibatan aktor yang luas dalam relasi menjadi salah satu pendekatan Galtung dalam perdamaian. Pada saat yang sama perlibatan kelompok pemberontak juga menjadikan interaksi semakin beragam dalam negosiasi pembangunan perdamaian, yang merupakan bagian dari Entropi. Koalisi Rusia aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan, diharapkan melalui hal tersebut akan terbangun suasana yang mendukung dalam pembentukan simbiosis dan keadilan, yang menjadi tujuan utama dalam peacebuilding.

Melalui upaya Rusia melalui tiga pendekatan resolusi konflik, secara keseluruhan Rusia mampu dalam menurunkan eskalasi kekerasan langsung secara signifikan. Rusia juga berperan vital dalam tahap politis yakni melalui negosiasi, khususnya pada Pertemuan Astana yang berhasil mencapai kesepakatan-kesepakatan yang berperan besar dalam proses perdamaian pihak pemerintah dan oposisi. Rusia mampu dalam mengubah aktor konflik dan perlahan-lahan juga

mampu mengubah sistem konflik, serta mampu melibatkan pihak-pihak oposisi bersama-sama dengan kepala negara untuk berunding negosiasi konflik. Proses peacebuilding belum banyak dapat dilakukan, hal yang mampu dilakukan dalam tahapan ini adalah bantuan kemanusiaan. Rusia melalui bantuannya secara umum membantu masyarakat mendapatkan hak-hak dasarnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

2.3.3 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Eskalasi – De-Eskalasi

2.3.3.1 Tingkat Eskalasi – De-eskalasi

Model eskalasi dan de-eskalasi konflik oleh Ramsbotham memiliki lima tahapan yang berbentuk kurva yang menggambarkan pergeseran konflik dari tahapan satu ke tahapan lainnya. Jangka waktu 2011-2017 terjadi pergeseran konflik yang cukup signifikan dalam eskalasi de-eskalasi konflik. Terdapat faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi meningkat dan menyurutnya intensitas konflik. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain kapasitas pemerintah dalam menganggulangi konflik serta budaya persekusi pemerintah terhadap kebebasan berbicara, sedangkan faktor eksternal yang mengakibatkan perubahan tahapan konflik adalah fenomena *Arab Spring* yang melanda berbagai negara di Timur Tengah serta intervensi asing di dalam konflik Suriah.

Polarisasi: Pada musim semi 2011 tuntutan massa terhadap pemerintahan otoriter dimulai di berbagai negara. Efek domino terjadi dimana satu-persatu pemimpin otoriter dari berbagai negara terjadi. Hal yang serupa juga terjadi di Suriah, protes besar-besaran oleh masyarakat sipil terjadi di kota Damaskus dan Aleppo. Kejadian ini menunjukkan adanya polarisasi antara masyarakat pendukung reformasi dan pemerintah, dimana menjadi awal munculnya konflik di permukaan. Pada tahap ini terdapat kepentingan yang bertentangan diantara kubu, Assad yang ingin meneruskan pemerintahannya ditempuh dengan cara-cara otoriter dan masyarakat oposisi yang menginginkan kebebasan berpendapat dan kebebasan tahanan perang. Upaya-upaya kompromi yang dilakukan pemerintah kemudian tidak mampu

melebur kutub-kutub yang sudah secara kuat terbentuk, didasari dengan kekerasan struktural yang kuat.

Kekerasan: Tidak lama berselang pada bulan Maret 2011, ketidakmampuan pemerintah dalam meredam konflik menyebabkan aksi protes massa semakin meningkat hingga memasuki tahap kekerasan. Hal ini ditandai dengan perlawanan negara terhadap demonstran, yakni penangkapan aktifis-aktifis politik yang semakin menyulut amarah masyarakat. Massa kemudian melakukan perusakan fasilitas umum sebagai protes otoriter, pembakaran kantor pusat Ba'ath menunjukkan penolakan terhadap pemerintah yang dilakukan melalui kekerasan. Seiring dengan membesarnya protes maka korban jiwa tidak terelakan, baik dari aktivis maupun polisi. Dalam penanganan kerusuhan ini pemerintah pun mulai mengerahkan militernya. Protes yang awalnya dimulai di dua kota meluas menjadi 20 kota yang mengakibatkan ribuan korban jiwa pada pertengahan tahun 2011.

Perang: Protes kemudian tidak hanya diekspresikan melalui tindakan anarkis massa, namun mulai terorganisir dengan pembentukan organisasi-organisasi bersenjata oposisi dan pro pemerintah. Terbentuknya kelompok-kelompok ekstrimis kemudian menjadi ladang subur bagi terorisme. Kehadiran al-Nusra dan ISIS sebagai kekuatan teroris meningkatkan intensitas konflik bukan hanya pada tahap kekerasan melainkan perang. Dalam kurun waktu kurang dari enam bulan eskalasi konflik berkembang hingga pada tahapan tertingginya. Dalam tahap perangnya pun terjadi eskalasi, dari yang semula perang sipil sebatas pemerintah melawan oposisi, menjadi perang melawan dominasi terorisme dan kelompok-kelompok bersenjata. Serangan teror tidak hanya mengancam segelintir orang namun juga mampu menguasai desa, kota, hingga provinsi. Kelompok-kelompok bersenjata lainnya juga terlibat dalam perebutan wilayah dan peperangan.

Beragamnya kelompok bersenjata baik dari segi kuantitas maupun ideologi menyebabkan terjadinya persaingan diantara pihak oposisi sendiri. Perpecahan dan koalisi yang ada di tubuh oposisi mempengaruhi eskalasi konflik secara signifikan, karena intensitas peperangan menjadi semakin tinggi dan dengan bertambahnya

aktor konflik resolusi konflik menjadi semakin sulit untuk dilakukan. Peran internasional dalam menyokong kelompok oposisi juga turut memperkeruh perang. Peningkatan kapasitas militan menjadikan daya penghancur menjadi semakin tinggi, yang digunakan untuk memerangi pemerintah, sesama kelompok oposisi, dan teroris. Turki yang aktif mendukung FSA berpengaruh dalam tindakan-tindakan organisasi tersebut yang banyak terlibat dalam perebutan wilayah dan perang antar faksi. Hal yang sama juga dilakukan koalisi AS dalam mendukung koalisi oposisi.

Gencatan senjata: Intervensi Rusia meskipun dalam beberapa kasus mengeskalasi konflik namun secara umum mampu mende-eskalasi perang melalui intervensi bersenjata. Intervensi yang dilakukan sejak September 2015 mampu mengembalikan kekuatan pemerintah dengan mengeliminasi teroris. Stabilitas mulai terwujud dengan pengambilalihan wilayah-wilayah atas kekuatan teroris dan oposisi disertai dengan terlaksanannya *peace talks* yang menandakan adanya keinginan untuk bernegosiasi konflik. *Astana talks* yang mampu mempertemukan pihak oposisi dan pemerintah berperan besar dalam proses de-eskalasi, terutama ketika berhasil membuahkan hasil empat zona de-eskalasi di provinsi Idlib, Latakia, Hama, dan Homs. Intensitas kekerasan semakin menurun meskipun ada pelanggaran gencatan senjata dengan sistem monitoring yang semakin ditingkatkan sehingga kekerasan langsung dapat semakin terkendali.

Kesepakatan: Setelah berhasil dalam melakukan gencatan senjata secara efektif, koalisi Rusia membangun Pusat Rekonsiliasi sebagai pusat pemantauan serta pengorganisasian pelaksanaan perhentian permusuhan dan gencatan senjata. Kepala Pusat Rekonsiliasi menyatakan bahwa masyarakat sudah lelah dengan perang, dan militant ingin meletakkan senjata dan memulai hidup damai kembali. Kesepakatan damai berhasil ditandatangani oleh 104 kelompok oposisi yang memutuskan untuk menghentikan perlawanan dan bersatu dalam sistem pemerintahan Suriah.

2.3.3.2 Faktor Konflik

Menurut Malik, faktor konflik memiliki tiga elemen yakni elemen pemicu konflik, elemen eskalator konflik, dan elemen akar konflik yang diibaratkan sebagai api, angin, dan rumput. Konflik di Suriah yang berada pada tahap perang dengan korban hingga 700.000 jiwa dan jutaan pengungsi memiliki faktor yang kuat pada ketiganya, melekat baik pada pemerintah dan elitnya maupun pada masyarakat Suriah.

Elemen akar konflik: didefinisikan sebagai sumber konflik yang paling mendasar yang berasal dari kondisi struktural masyarakat. Akar konflik pada konflik di Suriah terdapat pada kekerasan struktural dalam kerangka teori Johan Galtung. Filter yang ketat terhadap informasi dan menyuarakan pendapat selama hampir 40 tahun kekuasaan dinasti Assad serta penahanan aktifis-aktifis politik menunjukkan bahwa hubungan pemerintah dan masyarakat tidak didasari kepercayaan antara satu dengan yang lain. Revolusi ekonomi yang berhasil memajukan ekonomi Suriah berbanding lurus dengan penguatan oligarki. Tingkat pengangguran yang tergolong tinggi, yakni 10% serta sanksi internasional oleh AS menghambat pengembangan ekonominya.

Elemen pemicu konflik: merupakan faktor yang muncul secara tiba-tiba dalam kejadian konflik. Hal yang digolongkan ke dalam pemicu konflik adalah munculnya fenomena *Arab Spring* di berbagai negara yang dikuasai pemimpin otoriter di Timur Tengah. Efek domino terjadi sehingga pemimpin-pemimpin otoriter mundur dari jabatannya, seperti Ben Ali di Tunisia, Muammar Gaddafi di Libya, Abdullah Saleh di Yemen, dan Hosni Mubarak di Mesir. Masyarakat Suriah yang melihat adanya persamaan antara Bashar dan pemimpin-pemimpin lainnya terpicu untuk melakukan revolusi untuk menumbangkan hegemoni kekuatan dinasti. Akhir yang mengenaskan bagi para pemimpin, seperti Gaddafi dan Abdullah Saleh yang terbunuh di tangan pemberontak menjadikan tren kekerasan di *Arab Spring* menjadi semakin kuat,

Dalam praktiknya masyarakat Suriah melakukan demonstrasi secara damai, namun adanya represi dari pemerintah melalui penahanan demonstran serta penggunaan kekerasan fisik untuk menghentikan demonstrasi menjadi pemicu bagi masyarakat untuk meningkatkan kekerasan menggunakan senjata, hingga menjadi ladang subur bagi perkembangan terorisme.

Elemen eskalator konflik: merupakan elemen berperan sebagai penyebar luas konflik yang mendorong konflik menjadi semakin besar. Pada konflik Suriah, elemen yang mendorong meluasnya konflik adalah perpecahan pada tubuh militer Suriah menjadi militant bersenjata pertama dengan membentuk FSA, secara aktif melakukan perlawanan terhadap pasukan pemerintah. Pembentukan FSA mengubah eskalasi konflik yang sebelumnya masih tergolong kekerasan dengan daya penghancur yang sangat terbatas menjadi perang sipil.

Intervensi AS dan koalisi dalam menyokong, mendanai, dan melatih angkatan bersenjata oposisi dapat digolongkan sebagai eskalator konflik. Pihak yang tidak memiliki legitimasi secara hukum meskipun bertujuan untuk memberantas terorisme namun dampak dari tindakan tersebut menyebabkan skala konflik yang lebih besar dengan tingkat destruksi yang lebih tinggi.

2.3.3.3 Aktor Konflik

Aktor konflik memiliki tiga kategori, yakni aktor provokator, kelompok rentan, dan aktor fungsional. Masing-masing kategori memiliki kontribusi terhadap eskalasi dan de-eskalasi konflik. Dalam konflik Suriah aktor konflik merupakan salah satu faktor terkuat dalam eskalasi da-eskalasi konflik, karena masing-masing aktor memiliki peran yang cukup signifikan dalam memicu, memperluas, dan memadamkan api konflik. Aktor konflik yang terlibat di Suriah sangatlah beragam, mulai dari pemerintah, masyarakat oposisi, kelompok oposisi bersenjata, serta intervensi asing yang menyebabkan penyelesaian konflik menjadi lebih kompleks. Tidak ada pemisah yang jelas antara kelompok aktor, dimana kelompok fungsional juga menjadi aktor provokator serta intervensi internasional yang bertujuan untuk

mendamaikan namun penuh dengan kepentingan menjadikan konflik semakin panjang dan berlarut-larut sesuai dengan kepentingan masing-masing golongan.

Pemerintah Suriah yang seharusnya menjadi aktor fungsional dengan fungsi menanggulangi konflik juga berperan sebagai aktor provokator. Kelompok oposisi dianggap sebagai musuh negara yang harus ditangani demi menjaga stabilitas negara. hal tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan pemimpin-pemimpin negara timur tengah seperti Turki yang memerangi PKK yang merupakan kelompok pemberontak Kurdis di Turki bagian timur, dan juga Saudi yang menggempur permukiman warga oposisi di Yaman. Sikap permusuhan serta perlawanan bersenjata terhadap oposisi menjadikan pemerintah Suriah atau Bashar al-Assad sebagai aktor utama dalam konflik Suriah. Namun pada saat yang bersamaan pemerintah Suriah juga merupakan kelompok rentan yang kekuasaannya dibatasi dengan otoritas di atasnya, dalam hal ini Rusia. Perang sipil di Suriah seiring dengan perkembangannya melibatkan intervensi asing baik dalam pihak pro maupun oposisi pemerintah. Maka perang di Suriah menjadi ladang bagi persaingan dua kekuatan besar Rusia dan AS beserta dengan persaingan kekuatan regional Iran dan Saudi.

Rusia yang berperan sebagai juru damai dalam konflik Suriah telah mampu dalam de-eskalasi konflik dan menyelesaikan konflik melalui jalur-jalur diplomatik. Namun Rusia tidak lepas dari kepentingan nasionalnya dengan melakukan uji coba senjata, menunjukkan kekuatan bahwa negaranya adalah negara *superpower*, serta kepentingan geopolitis dengan mendukung pemerintahan Suriah yang menjadi negara penangkal radikalisme secara geografis terhadap negaranya. Rusia telah menunjukkan kekuatannya dengan menguasai Crimea, dan hal tersebut dilakukan di Suriah. Yang membedakan antara intervensi Rusia dan AS adalah legitimasi, Rusia selalu mendapatkan legitimasi bagi negara-negara yang diintervensinya. Meskipun memiliki kepentingan nasional yang kuat, hal tersebut menjadikan intervensi yang dilakukan lebih berprospek dalam mendamaikan Suriah dibandingkan dengan negara lain, karena masih sesuai dengan norma hukum internasional. Pada praktik intervensinya Rusia mengikuti pola relusi konflik, dengan lakukan intervensi militer,

menarik pasukan dan mengganti militer menjadi polisi dan sipil negosiator, menginisiasi *peace talks* dan membentuk wilayah de-eskalasi, serta melakukan pemantauan di daerah-daerah tersebut. meskipun dalam deklarasinya Rusia menyatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberantas terorisme, Rusia tetap melakukan perlawanan terhadap kelompok oposisi dengan tujuan untuk mempertahankan pemerintahan Assad. Meskipun kental dengan kepentingan, namun cara eliminasi menjadi alternatif bagi stabilitas Suriah dan pemerintahan kembali mulai berjalan dengan direbutnya sebagian besar wilayah Suriah dari tangan teroris dan oposisi.

Kelompok teroris, ISIS dan al-Nusra sama-sama bertujuan untuk mendirikan negara dengan sistem khilafah Islam. Meskipun bercita-cita sama kedua kelompok ini juga terlibat dalam pertempuran satu dengan yang lain. ISIS memiliki kekuatan yang relatif lebih besar, dengan berhasil menguasai provinsi Raqqa selama dua tahun serta beberapa kota dan desa di wilayah lainnya. Kedua organisasi merupakan aktor utama dalam konflik, memerangi semua kelompok termasuk pro dan oposisi pemerintah serta pasukan-pasukan internasional.

Kelompok-kelompok oposisi menjadi aktor utama konflik sekaligus kelompok rentan yang dikuasai oleh koalisi internasional. Kelompok oposisi merupakan kelompok yang memiliki militan namun tidak memiliki sumber daya. AS dan negara Arab menyokong kelompok-kelompok tersebut, dengan tujuan mengganti status quo sekaligus perimbangan kekuatan global antara AS dan Rusia, serta Iran dan Saudi. Koalisi AS dapat digolongkan sebagai aktor provokator yang menunggangi kelompok-kelompok oposisi dalam mencapai tujuannya. Intervensi yang dilakukan tidak berbasis legalitas, bahkan AS sudah pernah kalah dalam pengadilan ICJ melalui tindakan yang sama di negara Nikaragua, serta telah lumrah melakukan intervensi tanpa legalitas yang berdampak buruk pada negara-negara seperti yang terjadi di Iraq, Afghanistan, dan Libya. Namun pada saat yang bersamaan AS memadamkan api terorisme yang ada di Suriah. Amerika memiliki kepentingan membangun negara Kurdis yang demokratis, menunggangi kelompok yang

terdiskriminasi selama beberapa dekade pemerintahan Assad yang berkeinginan untuk eksistensinya diakui. Dengan melakukan hal tersebut AS semakin memperkuat geopolitisnya di Timur Tengah dan memperlemah pemerintahan Assad dengan penguasaan Kurdis di sebagian besar wilayah Suriah bagian Utara.

Disamping itu, situasi semakin diperparah dengan sektarisme yang ada di Suriah, sehingga intensitas pertempuran menjadi semakin intens dengan adanya permusuhan antara Sunni dan Syiah, serta sekte-sekte lainnya di Suriah. Dengan tujuan mengganti kekuasaan Syiah di Suriah, kelompok-kelompok ini memerangi milisi Syiah, termasuk Hizbullah dan pasukan pro pemerintah.

Disamping itu media yang seharusnya menjadi aktor provokator yang dengan cepat membentuk perspektif yang tidak utuh terhadap konsumennya, baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintahan Bashar menjadi pihak yang paling banyak disalahkan di dalam media massa, padahal aktor-aktor lain berperan tidak kalah besarnya dalam eskalasi konflik di Suriah.

2.3.3.4 Pemangku Kepentingan

Ketiadaan pemangku kepentingan yang berfungsi sebagai pihak-pihak yang menghentikan konflik menjadikan konflik di Suriah menjadi *intractable conflict*. Peran aktor saling bertumpang tindih menjadikan konflik Suriah bergantung pada kepentingan dan kekuatan global negara-negara *superpower*. Aktor-aktor yang seharusnya berkepentingan untuk menghentikan konflik tidak menjalankan fungsinya dan menjadi aktor yang terlibat dalam konflik. Pemerintah, militer, polisi memiliki kepentingannya untuk menjaga status quo, masyarakat tidak memiliki peran yang besar ditengah dominasi kekuatan global. Media barat tidak menjalankan jurnalisme perdamaian melainkan jurnalisme perang dengan menyiarkan berita-berita propaganda kekejian Assad tanpa ada pengupasan konflik yang menyeluruh, media lokal Suriah menyiarkan berita propaganda yang memihak pada pemerintah, dan media Rusia memberitakan aksi-aksi heroik negara tersebut yang juga tanpa pemberitaan konflik yang menyeluruh. Namun dengan kemudahan

akses terhadap media dari berbagai sumber dan perkembangan teknologi akses terhadap informasi yang begitu cepat terhadap situasi de-eskalasi di Suriah menjadikan propaganda AS yang selalu menyudutkan pemerintahan Assad menjadi tidak begitu berhasil.

2.3.3.5 Kemauan Politik Penguasa

Penguasa politik pada konflik ini tidak berada di tangan pemerintahan Suriah, namun ditangan kekuatan global yang mampu menangani konflik tersebut. Dalam hal ini Rusia menjadi kekuatan politik yang mampu membuat kebijakan bagi Suriah dalam menanggulangi konflik. Berbagai kebijakan telah dibuahkan melalui kesepakatan dalam negosiasi, khususnya pada *Astana talks* berupa pembuatan zona de-eskalasi dan penanganan tahanan dan tawanan perang. Rusia melakukan transisi dari upaya perdamaian dengan menggunakan militer hingga pemberdayaan sipil seiring dengan perkembangan proses perdamaian.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

2.4 Kesimpulan

Analisis terhadap penelitian peran keterlibatan Rusia terhadap konflik di Suriah menghasilkan beberapa kesimpulan terkait pertanyaan, yakni:

1. Kekerasan di Suriah menurut tipologinya mengalami berbagai perubahan sesuai dengan perkembangannya. Perang dimulai dari represi negara terhadap demonstrasi oposisi yang dikategorikan sebagai represi / terorisme negara. Selanjutnya konflik berkembang menjadi perang sipil dengan perpecahan militer yang mengakibatkan pertumbuhan kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Kekuatan kelompok oposisi mampu melewati kekuatan pemerintah dengan keberhasilan kelompok-kelompok tersebut dalam merebut sejumlah kota-kota dan beberapa pangkalan militer di berbagai provinsi. Hal tersebut dikategorikan dalam perang sipil hingga penetrasi karena aktor non-negara mampu menembus sistem pemerintahan, kepemilikan, militer, serta ekonomi dan sosial budaya. Namun teori tipologi Galtung belum mampu untuk mengategorikan tipologi konflik antar aktor-aktor non-negara, yang menjadi konflik utama pada perang sipil di Suriah sebelum adanya intervensi Rusia. Dengan adanya intervensi Rusia maka kekuatan negara kembali dapat mengimbangi kekuatan oposisi, sehingga pada tahapan ini penetrasi hingga represi terjadi kembali dalam upaya menanggulangi kelompok oposisi dan teroris.

Pada konflik di Suriah, kekerasan langsung mendominasi diantara kekerasan lainnya. Hal ini juga dapat terlihat pada analisis eskalasi konflik dimana konflik sudah pada tahapan tertingginya, yakni perang. Kekerasan langsung yang terjadi mengalami eskalasi yang cukup signifikan, dimulai

dari kerusuhan sipil dimana masyarakat terrepresi, mengalami penindasan dan penahanan bagi aktifis-aktifis demonstran memicu demonstrasi menjadi semakin anarkis. Demonstrasi menjadi semakin berdarah, terjadi perpecahan di militer yang menjadi faktor utama munculnya angkatan bersenjata oposisi, serta perang melawan terorisme yang juga pada saat yang bersamaan melawan pemerintah dan oposisi. Intervensi AS dan koalisi menambah kapasitas kelompok bersenjata sehingga kehancuran menjadi lebih besar. Rusia juga berperan dalam kekerasan langsung dengan operasi-operasi diluar dari legitimasinya di Suriah.

Kekerasan struktural di Suriah meliputi pengekangan kebebasan berpendapat yang sudah diterapkan sejak pemerintahan Havez al-Assad. Pemerintahan otoriter membentuk lingkaran elitnya sendiri sehingga kekuasaan dan keuntungan utama dinikmati oleh kaum oligarkis, yang diperparah dengan ketidakterediaan lapangan pekerjaan bagi 10% masyarakat Suriah pada tahun 2003-2011. Keputusan politis Assad dalam hubungan internasional menjadikan negaranya menjadi musuh AS, menerima sanksi dan mempersulit perkembangan ekonomi Suriah. Pada masa perang mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan dan anak-anak kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan. Pengungsi diluar Suriah pun tidak mendapatkan kehidupan yang layak.

Kekerasan kultural meliputi lemahnya sistem pemerintahan Suriah dimana dalam sejarahnya pembentukannya dipenuhi dengan kudeta hingga stabilitas terbentuk pada keberhasilan Assad menguasai pemerintahan pada tahun 1970. Dengan lingkungan timur tengah yang sangat kuat dengan sektarian, maka di Suriah masyarakat juga terkelompok ke dalam sekte tersebut, persatuan Suriah tidak diiringi dengan pembangunan hubungan positif antar sekte hingga perdamaian dengan mudah terpecah menjadi perang sipil. Diskriminasi juga terjadi khususnya pada masyarakat

Kurdi, menjadikan YPG menjadi salah satu angkatan bersenjata terkuat dalam melawan pemerintah. Faktor eksternal Arab Spring juga menjadi tren yang mempengaruhi terjadinya perang sipil.

2. Secara legitimasi, Rusia memenuhi persyaratan intervensi dengan mendapatkan permintaan dari pemerintahan yang sah untuk menanggulangi konflik yang terjadi di negaranya. Sebaliknya bagi AS dan koalisi intervensi mereka tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional, terlebih AS sudah pernah kalah dalam kasus serupa. Hal yang mendasari adalah collective self-defense dalam Piagam PBB Pasal 51, keputusan pengadilan Nikaragua v. AS dan Kongo v. Uganda.

Upaya keterlibatan Rusia di konflik Suriah dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni peacekeeping, peacemaking, dan peacebuilding. Tindakan peacekeeping yang dilakukan Rusia adalah intervensi fisik yang melibatkan pasukan dan persenjataan Rusia. Dengan adanya pangkalan Rusia di Suriah maka tindakan peacekeeping menjadi semakin mudah. Rusia berhasil dalam melumpuhkan kekuatan ISIS dan terorisme lainnya, namun pada saat yang bersamaan intervensinya juga ada yang mengescalasi konflik dengan menyerang kelompok-kelompok oposisi dan timbulnya korban jiwa sipil termasuk wanita dan anak-anak. Pada peacemaking tindakan yang dilakukan pada dengan model 12 pendekatan Galtung adalah pada pendekatan trading dan multilateralisme, yakni menggunakan negosiasi konflik melalui jalur diplomasi informal yang berhasil membuahkan beberapa pencapaian, diantaranya pembentukan zona de-escalasi. Selanjutnya terjadi disintegrasi dalam proses peacebuilding

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Rusia dalam eskalasi / de-escalasi konflik menurut Malik meliputi lima faktor. Faktor eskalasi de-

eskalasi dengan model Ramsbotham konflik Suriah meliputi tahapan polarisasi diawal demonstrasi masa, kemudian berkembang menjadi kekerasan dengan adanya perlawanan baik dari pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya konflik berada pada puncaknya pada tahapan perang yang dimulai dari angkatan bersenjata pemberontak yang menjadi ladang subur terorisme, hingga kehadiran intervensi asing. Intervensi Rusia melalui peacekeeping dan peacemaking berhasil melahirkan zona de-eskalasi sehingga perang dapat turun menjadi gencatan senjata, meskipun masih terjadi kekerasan. Rusia kemudian membangun Pusat Reskonsiliasi untuk pemantauan gencatan senjata dan pengorganisasian perhentian permusuhan. Kesepakatan damai berhasil ditandatangani oleh 104 kelompok oposisi.

Faktor konflik dalam konflik di Suriah meliputi tiga elemen. Elemen akar konflik yakni kekerasan struktural yang telah dijelaskan dalam model segitiga kekerasan Galtung dalam bagian kekerasan struktural. Hal tersebut meliputi filter ketat informasi oleh pemerintah Suriah terhadap masyarakatnya selama 40 tahun, revolusi ekonomi yang semakin menguatkan ekonomi dan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Elemen pemicu konflik dalam konflik Suriah adalah munculnya fenomena Arab Spring dimana negara-negara di Arab melakukan revolusi terhadap kepemimpinan diktator. Hal tersebut berefek domino dan memicu pergerakan di Suriah. Disamping itu kekerasan yang digunakan pemerintah untuk menangani demonstran juga menjadi faktor pemicu anarkisme dan kekerasan yang meluas.

Aktor konflik dalam konflik Suriah tidak memiliki pengelompokan yang jelas, karena setiap aktor memainkan peran dan fungsi yang sering kali ganda maupun berkaki tiga. Pemerintah Suriah idealnya adalah aktor fungsional namun faktanya pemerintah adalah provokator konflik yang

memerangi kelompok oposisi. Pada saat yang bersamaan pemerintah Suriah juga menjadi aktor rentan yang dikendalikan kekuatan besar Rusia hingga pada batasan tertentu. Kelompok ISIS dan al-Nusra menjadi provokator konflik, kelompok oposisi menjadi provokator sekaligus kelompok rentan yang dikuasai koalisi AS hingga pada batasan tertentu, dan Rusia sebagai kelompok fungsional juga bertindak sebagai provokator dengan persaingannya melawan kekuatan AS. Penguasa pada konflik ini bukan terletak pada stakeholdernya melainkan kepentingan internasional. Hal ini yang menjadikan konflik di Suriah menjadi intractable conflict.

Melalui upaya keterlibatannya di Suriah, Rusia mampu melakukan de-eskalasi konflik secara umum meskipun adanya tindakan-tindakan yang memicu konflik dikarenakan posisinya yang berada pada wilayah abu-abu, penyelesaian konflik bergantung pada kepentingan Rusia dan sekutu serta situasi hubungan internasional antar negara-negara yang terlibat pada konflik tersebut. Faktor-faktor yang kuat dalam eskalasi konflik dapat sebagian diselesaikan oleh Rusia yang menjadikan Rusia berhasil melakukan de-eskalasi terhadap konflik Suriah.

2.5 Rekomendasi

2.5.1 Rekomendasi Teoritis

Melalui penelitian ini penulis memiliki rekomendasi terkait dengan teori-teori Damai dan Resolusi Konflik yang berkaitan dengan penelitian Pengaruh Keterlibatan Rusia terhadap Konflik di Suriah dalam Perspektif Resolusi Konflik Johan Galtung (2011-2017) meliputi:

1. Penulis juga menyarankan adanya pengembangan dalam teori eskalasi de-esklasi konflik. Perang dikelompokkan ke dalam satu kategori, sedangkan besaran dan cakupan perang sangat luas. Perang di Suriah dimulai ketika kelompok pemberontak mulai menggunakan senjata, dan semakin berkembang dengan adanya keterlibatan terorisme dengan skala

korban jiwa dan kerusakan yang telah jauh melampaui keadaan awal perang.

2. Adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan konflik di Suriah dalam ranah Damai dan Resolusi Konflik. Penelitian dapat dilakukan dengan berfokus pada peran AS dan koalisi, maupun posisi negara dan aktor lainnya dalam meresolusi konflik Suriah. Penelitian juga dapat dilakukan pada tingkatan *grassroot* yakni meneliti masyarakat dalam kondisi perang.

2.5.2 Rekomendasi Praktis

1. Untuk Rusia, Peneliti juga menyarankan agar Rusia juga dapat terus bertindak sesuai dengan legitimasinya di Suriah agar terhindar dari ketegangan dengan negara lain, dengan tujuan untuk mempercepat terjadinya perdamaian. Upaya eliminasi aktor-aktor non-teroris sudah seharusnya dihentikan. Peneliti juga menyarankan perlibatan yang terbatas dibelakang layar dalam terhadap upaya negosiasi antar pemerintah dan oposisi, agar aktor netral yang lebih berperan di depan supaya dapat tercapai kesepakatan secara lebih cepat. Dalam upaya perdamaianya, Rusia harus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan perdamaian yang berkepanjangan. Upaya peacemaking dan peacebuilding haruslah dilakukan sebesar peacekeeping agar terjadi transformasi konflik.
2. Untuk Suriah, hal yang dapat direkomendasikan penulis meliputi peran pemerintah dalam upaya penyelesaian dapat berkompromi dengan pihak-pihak oposisi, menemui jalan tengah dan saling mengkompromikan kepentingan untuk mencapai *win-win solution*. Agar momentum pertemuan antar pemerintah dan oposisi dapat menjadi titik baru dalam mencapai kepercayaan di masyarakatnya. Kedepannya, Suriah juga diharapkan dapat dapat memfasilitasi dalam pemulihan masyarakat terhadap hak-haknya pasca perang, dalam jangka waktu panjang diharapkan pemerintah dapat memberikan kebebasan berpendapat

terhadap masyarakatnya serta menegakan keadilan dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara.

3. Untuk Indonesia, agar penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia untuk menghindari konflik serupa. Tingginya tingkat intoleransi dan kerentanan masyarakat pada tahun-tahun politik berpotensi menjadi konflik struktural yang jika ada pemicunya dapat sewaktu-waktu menjadi konflik terbuka. Konflik Suriah diperparah dengan kentalnya sektarian diantara masyarakatnya sehingga terjadi permusuhan diantara masyarakat. Peneliti menyarankan agar Indonesia dapat meningkatkan upaya untuk meningkatkan toleransi terhadap SARA untuk meredam konflik laten yang sekarang mulai tumbuh di masyarakat. Peneliti juga merekomendasikan perlibatan diplomasi Indonesia di Timur Tengah khususnya terhadap konflik Suriah agar Indonesia dapat menjadi pionir perdamaian dunia. Indonesia dapat berperan sebagai pihak netral yang dapat turut memfasilitasi dialog perdamaian antara pemerintah Suriah dan oposisi untuk memperkuat perannya di hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- 2005 World Summit Outcome: Resolution.* (2005). New York: UN.
- Abboud, S. (2012, June 20). The Syrian Economy: Hanging by a Thread. Retrieved November 18, 2018, from <http://carnegieendowment.org/2012/06/20/syrian-economy-hanging-by-thread/dwq7>
- Al Jazeera. (2017, October 30). Syrian war: All you need to know about the Astana talks. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/syrian-war-astana-talks-171029160554816.html>
- Al-Khalidi, S. (2012, July 04). Syria reverts to socialist economic policies to ease tension. Retrieved November 18, 2018, from <https://www.reuters.com/article/us-syria-economy-socialist/syria-reverts-to-socialist-economic-policies-to-ease-tension-idUSBRE8630FA20120704>
- Barnard, A. (2018, October 19). Syria Weighs Its Tactics as Pillars of Its Economy Continue to Crumble. Retrieved November 18, 2018, from <https://www.nytimes.com/2013/07/14/world/middleeast/government-in-syria-searches-for-answers-as-economy-crumbles.html>
- Bartholomees, J. (2004). *Guide to National Security Policy and Strategy*. United States: Army war coll strategic studies inst carlisle barracks pa.
- R., Menon. (2012). Beijing and Moscow Balk at “Interference”. *Current History*, 111(748), 310.
- Blanford, N. (2014, May 08). Retreat from Homs Assad conquers cradle of revolution. Retrieved October 31, 2018, from <https://www.thetimes.co.uk/article/retreat-from-homs-assad-conquers-cradle-of-revolution-zzmhp9qc5tm>
- Buckley, C. A. (2012). Learning from Libya, Acting in Syria. *Journal of Strategic Security*, 5(2), 81-104. doi:10.5038/1944-0472.5.2.5

- R., Janik. (2013). China, Russia, and the Failure of the Responsibility to Protect in Syria: Does the Fear of Regime Change offer a Servicable Explanation? *Studia UBB. Europea*, LVII(1), 63-88.
- Collelo, T. (1988). *Syria, a country study*. Washington, D.C.: The Division.
- Conway, M., Nelson, L., Shafer, J., Blatt, L., Sosnik, D., & Lowry, R. (2017, April 07). Timeline: U.S. approach to the Syrian civil war. Retrieved from <https://www.politico.com/story/2017/04/timeline-united-states-response-syria-civil-war-237011>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Data Primer dan Data Sekunder. (2018, March 28). Retrieved from <http://sosiologis.com/data-primer-dan-data-sekunder>
- Dmitry Medvedev's interview with CNN. (n.d.). Retrieved from <http://government.ru/en/news/160/>
- DRC v. Uganda (International Court of Justice (19 Desember 2005)
- From Arab Spring to chemical attacks: A timeline of the Syrian conflict and the U.S. response. dalam <https://www.nbcnews.com/news/us-news/arab-spring-chemical-attacks-timeline-syrian-conflict-n865961>, diakses pada 12 Agustus 2018
- Galtung, J. (1976). *On The Causes of Terrorism and Their Removal*. New Jersey: Princeton University.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means*. SAGE.
- Galtung, J. (1976) *Peace, War and Defense*, Copenhagen: Ejlers.
- George, A. (2003). *Syria: Neither bread nor freedom*. Zed Books: Verlag nicht ermittelbar.

- Guide to the Syrian rebels. (2013, December 13). dalam <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-24403003>, diakses pada 12 Agustus 2018
- Hawari, T. (2016). *Syria's civil war and the sectarian violence dilemma: A study on the development of the Sunni-Alawite struggle*(Unpublished master's thesis). Western Illinois University.
- Hofstede Insight. (n.d.). Syria*. Retrieved November 17, 2018, from <https://www.hofstede-insights.com/country/syria/>
- Holzgrefe, J L; Keohane, R O (Robert O), & J L Holzgrefe, Robert O Keohane. (2003). *Humanitarian intervention: Ethical, legal, and political dilemmas*. Cambridge: Cambridge Univ Press.
- Hourani, A. H., & Smith, C. G. (2018, October 22). Syria. Retrieved November 16, 2018, from <https://www.britannica.com/place/Syria/Media-and-publishing>
- Huntington, S. P., Ajami, F., Mahbubani, K., Bartley, R. L., Liu, B., Kirkpatrick, J. J., . . . Moisi, D. (2010). *The clash of civilizations?: The debate*. New York, NY: Foreign Affairs.
- A., Ryniker. (2001). ICRC's position on humanitarian intervention. *IRRC*,83(June), 842nd ser., 528-531. Retrieved from https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/527-532_ryniker-ang.pdf.
- Jansen, M. (2017, October 02). Russias intervention in Syria has given it regional clout. Dalam <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/russia-s-intervention-in-syria-has-given-it-regional-clout-1.3241587>. Diakses pada 13 Agustus 2018
- Jordan asked Nixon to attack Syria, declassified papers show. (n.d.). Retrieved November 16, 2018, from <http://edition.cnn.com/2007/POLITICS/11/28/nixon.papers/index.html>

Joseph, Y., & Caron, C. (2018, April 08). Burning Eyes, Foaming Mouths: Years of Suspected Chemical Attacks in Syria. Dalam

<https://www.nytimes.com/2018/04/08/world/middleeast/syria-chemical-attacks-assad.html>, diakses pada 12 Agustus 2018

Kamus besar bahasa Indonesia. (2008). Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Ketz, S. (2012). Syria's battling economy may hold on with help from friends.

Retrieved November 18, 2018, from

<https://web.archive.org/web/20120823112658/https://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5ilP7T7v6W5nxdJfSVrQhm5aszqgQ?docId=CNG.7610691ef383e1f07fd5e86d87ebce6e.561>

Khalifa, M. (2013). Arab Reform Initiative. *The Impossible Partition of Syria*,3-5.

Retrieved October 31, 2018.

Lobel, M. (2015, June 23). Syria's economy cut in half by conflict. Retrieved

November 18, 2018, from <https://www.bbc.co.uk/news/business-33244164>

Malik, I. (2017). *Resolusi konflik: Jembatan perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mapendere, J. (2000). Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks. *COPOJ – Culture of Peace Online Journal*,2(1).

Middle East | Syria clamps down on Kurd parties. (2004, June 03). Retrieved

November 17, 2018, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3774055.stm

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (n.d.). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publ.

Milmine, K. (2014). *Is The Red Line Only Rhetoric: Weapons Of Mass Destructions (WMDS), Syria's Civil War, The United States Failed Foreign Policy And Its Unintended Ramifications*(Unpublished master's thesis). Texas Woman's University.

- Mintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J. B., & Ghoshal, S. (2003). *The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases*(2nd ed.). Edinburg Gate, England: Pearson Education Limited.
- Mustafa, K. (2004). The impossible partition of Syria. Retrieved November 18, 2018, from <https://www.arab-reform.net/en/node/510>
- Najem, T. P., Soderlund, W. C., Briggs, E. D., & Cipkar, S. (2016). Was R2P a viable option for Syria? Opinion content in the Globe and Mail and the National Post, 2011–2013. *International Journal: Canadas Journal of Global Policy Analysis*, 71(3), 433-449. doi:10.1177/0020702016662796
- Nicaragua v. the United States of America (International Court of Justice June 27, 1986).
- Nuruzzaman, M. (2015). Rethinking Foreign Military Interventions to Promote Human Rights: Evidence from Libya, Bahrain and Syria. *Canadian Journal of Political Science*, 48(03), 531-552. doi:10.1017/s0008423915000803
- Office of the Press Secretary. (2004, May 11). Fact Sheet: Implementing the Syria Accountability and Lebanese Sovereignty Restoration Act of 2003. Retrieved November 17, 2018, from <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/05/20040511-7.html>
- Online, M. (2017, November 11). Understanding the Legality of Russia's Actions in Syria. Retrieved from http://www.mjilonline.org/understanding-the-legality-of-russias-actions-in-syria/#_ftn3
- Pedro, S. N. (2016). *United States Interventions: Power Vacuums and the Rise of Extremist Groups*(Master's thesis, Old Dominion University). Michigan: Proquest.
- Principles of International Law on the Use of Force by States In Self-Defence. (n.d.). Retrieved from <https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/108106>

- A., Stent. (2016). Putin's Power Play in Syria. *Foreign Affairs*,95(1), new york, 106-113.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2016). *Contemporary conflict resolution: The prevention, management and transformation of dedly conflicts*. Malden, MA: Polity Press.
- Remnick, D. (2017, October 22). Telling the Truth About ISIS and Raqqa. Retrieved October 31, 2018, from <https://www.newyorker.com/news/news-desk/telling-the-truth-about-isis-and-raqqa>
- Rosenberg, S. (2017, December 13). Syria war: Putin's Russian mission accomplished. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-europe-42330551>
- H. Amile (2018, April 13). Russia news: What has Russia got to do with Syria? Why are Putin and Assad allies? dalam <https://www.express.co.uk/news/world/945139/Russia-news-what-has-Russia-got-to-do-with-Syria-Putin-Assad-allies-world-war-3>. Diakses pada 18 Agustus 2018
- Sahnoun, M., & Evans, G. J. (2001). *International Commission on Intervention and State Sovereignty = Commission internationale de lintervention et de la souveraineté des états*. Ottawa: The Commission.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2011). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, aplikasi dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana.
- Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya. (2018, March 07). Retrieved from <http://sosiologis.com/subjek-penelitian>
- Syria. (2018, July 23). Retrieved November 16, 2018, from <https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.htm>
- Syria increasing efforts to build up military after substantial loses. (2014, December 29). Retrieved November 18, 2018, from

<http://www.scmp.com/news/world/article/1670515/syria-increasing-efforts-build-military-after-substantial-loses>

Syria Population 2018. (n.d.). Retrieved October 31, 2018, from <http://worldpopulationreview.com/countries/syria-population/>

Syria profile - Timeline. (2018, April 24). Retrieved November 16, 2018, from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703995>

P., William. (2013). *The Responsibility to Protect. Security studies an introduction*. Oxon: Routledge.

The World Factbook: SYRIA. (2018, October 19). Retrieved October 31, 2018, from <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html>

Tschentscher, A. (n.d.). Syria - Constitution. Retrieved November 17, 2018, from http://www.servat.unibe.ch/icl/sy00000_.html

United Nations charter. (1995). New York: Fiftieth Anniversary Secretariat.

Varieties of Violence: Structural, Cultural, and Direct. (n.d.). Retrieved from <https://www.transcend.org/tms/2013/10/varieties-of-violence-structural-cultural-and-direct/>

Walker, S. (2015, September 30). Russian parliament grants Vladimir Putin right to deploy military in Syria. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/30/russian-parliament-grants-vladimir-putin-right-to-deploy-military-in-syria>

Ward, A. (2018, April 11). The real (but small) danger of a US-Russia war over Syria. Retrieved from <https://www.vox.com/2018/4/11/17225190/syria-trump-russia-attack-war-strike-response>

Yearbook of the United Nations 1966 (excerpts) (31 December 1966). (n.d.). Retrieved November 16, 2018, from <https://unispal.un.org/unispal.nsf/>